

26

Bidang Ilmu: Sosiologi

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING



MODEL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL MELALUI REKONSEPTUALISASI INTEGRASI DAN REKONSTRUKSI IDENTITAS BANGSA (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh Etnis Tionghoa Di Kota Medan)

Peneliti Utama : Drs. Deny Setiawan, M.Si.
Anggota Peneliti : 1. Drs. Onggal Sihite, M.Si.
2. Dra. Yusna Melianti, M.H.
3. Drs. Liber Siagian, M.Si.

Dibuat di Ditjen Dikti T.A. 2011, Nomor: 036/SP2H/PL/Dit.litabmas/IV/2011
Tanggal 14 April 2011

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOVEMBER 2011

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Penelitian : Model Pembangunan Masyarakat Multikultural Melalui Rekonseptualisasi Integrasi dan Rekonstruksi Identitas Bangsa (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh Etnis Tionghoa Di Kota Medan)

2. Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap : Dr. Deny Setiawan, M.Si.
 b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 c. NIP : 196803081993031003
 d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 e. Jabatan Struktural : Kepala Laboratorium PPKn
 f. Bidang Keahlian : Sosiologi Politik
 g. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial/PPKn
 h. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Medan
 i. Tim Peneliti

NO	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Instansi
1.	Drs. Onggal Sihite M. Si.	Antropologi Sosial	PPS Antropologi Sosial	UNIMED
2.	Dra. Yusna Melianti, M.H	Hukum Tata Negara	FIS/PPKn	UNIMED
3.	Drs. Liber Siagian, M.Si.	Pendidikan Kewarganegaraan	FIS/PPKn	UNIMED

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian
 a. Jangka Waktu penelitian yang diusulkan : 2 Tahun
 b. Biaya Total yang diusulkan : Rp. 85.170.000,-
 c. Jumlah biaya yang disetujui tahun ke 1 : Rp. 37.500.000,-

Medan, 14 November 2011

Ketua Peneliti,


 Dr. Deny Setiawan, M.Si.
 NIP. 19680308 199303 1 003


Mengetahui:

Ketua FIS Unimed


 Drs. Restu, M.S.

NIP. 19680719 198703 1 001

Menyetujui,
 Ketua Lembaga Penelitian Unimed


 Dr. Ridwan Abd. Sani, M. Si.
 NIP. 19680110 198803 1 002

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan: (1) rekonseptualisasi integrasi pasca-reformasi di Kota Medan; (2) rekonstruksi identitas bangsa di era globalisasi; dan (3) gagasan para tokoh dalam memproyeksikan pembangunan masyarakat multikultural di Kota Medan.

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dalam situasi yang alami, wawancara dilakukan secara *purposive*, dan studi dokumentasi dilakukan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder.

Temuan penelitian menunjukkan (1) perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa dalam merekonseptualisasikan integrasi mengarah kepada pilihan "*integrated-pluralism*" sebagai suatu kebijakan yang dipandang lebih sesuai dalam membangun integrasi pasca-reformasi di kota Medan, (2) sinergi gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa mengenai rekonstruksi identitas bangsa menghasilkan suatu formulasi identitas bangsa yang lebih pas bagi Indonesia di era globalisasi, yakni identitas hibrid: "Indonesia yang terus menjadi". Formulasi ini menggambarkan suatu identitas yang *fluid* dan dinamis mengarah kepada identitas kebangsaan yang non-ras, tidak rigid dan tidak statis terhadap perubahan, perkembangan dan kebutuhan zaman; dan (3) *Integrated-pluralism* dan identitas hibrid yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa memberikan kontribusi yang kondusif terhadap pembangunan masyarakat multikultural di kota Medan pasca-reformasi, utamanya dalam membangun model "Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika" dengan prinsip *social and political ideal of togetherness in difference*.

Kata Kunci: Integrasi, Identitas, Multikulturalisme

SUMMARY

This study aims to obtain a factual perspective on the thinking of Chinese leaders with respect to: (1) re-conceptualizing integration of post-reform in the city of Medan, (2) reconstruction of national identity in the era of globalization, and (3) the idea of the characters in the project development multikultural community in Medan.

The collection of data using observation techniques, interviews and documentation. Observations made in a natural situation, interviews were conducted purposively, and documentation study conducted on primary sources and secondary.

The study findings show (1) the perspective of the thinking of Chinese leaders in re-conceptualizing integration leads to the "integrated-pluralism" as a policy that is deemed more appropriate in developing the integration of post-reform in the city of Medan, (2) the synergy of ideas from the leaders of ethnic Chinese reconstruction of national identity formulation produces a national identity that is more fitting for Indonesia in the era of globalization, namely the identity of a hybrid: "Indonesia, which continues to be". This formulation describes a fluid and dynamic identity that leads to the identity of a non-racial nation, not rigid and static are not against change, progress and needs of the time, and (3) Integrated, pluralism and identity of the proposed hybrid Chinese leaders contribute conducive to the development of multicultural societies in the city of Medan post-reform, particularly in building models of "Multiculturalism Bhineka Tunggal Ika" to the principle of social and political ideal of togetherness in difference.

Keywords: Integration, Identity, Multiculturalism

PRAKATA

Bagi Indonesia, kemajemukan masyarakat merupakan faktor yang sangat diperhitungkan pada saat awal berdirinya negara. Elemen kemajemukan ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh Geertz (1963: 105) sebagai *primordial attachments* yaitu suatu sifat budaya dan tingkah laku pada suku (*tribe*), daerah (*region*), agama, kelompok etnis, dan pengelompokan-pengelompokan sejenisnya yang bersifat *given*. Kondisi ini dalam banyak hal justru telah menjadi dasar yang kuat dari suatu kekuasaan dan identitas, karena mempunyai sifat pasti dan *inherent*. Bahkan sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya, bangsa ini telah dihadapkan *primordial attachments*. Primordialisme inilah yang merupakan pengikat asli masyarakat Indonesia, dan atas dasar ikatan ini pengelompokan masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang, baik dalam organisasi pemerintahan, massa, maupun kepemudaan.

Suatu masyarakat bangsa yang sarat dengan *primordial sentiment* semacam ini, menurut Geertz, memerlukan suatu *integrative revolution* yaitu suatu gerak integrasi masyarakat ke dalam ikatan-ikatan kultural yang lebih luas, yang mendukung pemerintahan nasional. Tanpa adanya gerak integrasi semacam ini, bila timbul sedikit saja kekecewaan yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan golongan, akan meningkatkan potensi meledaknya disintegrasi politik (Alfian, 1990: 13).

Integrative revolution tersebut sebenarnya termasuk dalam proses yang dikenal dengan *nation building*, yang merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran pada kalangan yang luas dalam masyarakat, bahwa walaupun beraneka ragam latar belakang etnik, agama atau pun budayanya, mereka adalah satu bangsa, yang secara bersama-sama dapat membangun masa depan yang lebih baik di dalam suatu *nation state* (Bahar, 2000: 161).

Pendapat ini menunjukkan bahwa gerak integrasi yang mengalir pada awal pembentukan *nation-state* di Indonesia, berangkat dari *communitarian culture* menuju ke *political culture*, yang atas dasar *le desir de vivre ensemble* (Ernest Renan dalam Hartono, 1994: 54), bangsa-bangsa yang sudah lama hidup di Nusantara bersepakat mengikatkan diri menjadi suatu bangsa yang besar. Bangsa yang menggambarkan *imagined communities* (Anderson, 1983), dimana seseorang membayangkan keanggotaannya terhadap komunitas bangsanya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka integrasi yang dibutuhkan bagi bangsa Indonesia adalah integrasi yang dapat mengakomodir koeksistensi (pluralisme-budaya) guna mendorong pelestarian diversifikasi etnik dan rasial serta memperlakukan semua kategori penduduk secara setara (Habib, 2006). Integrasi dalam koridor *integrated pluralism*, berarti integrasi yang mengakui dan memberi penghormatan pada setiap entitas identitas. Menurut Hogg dan Abram (1988), setiap individu pada dasarnya ingin memiliki identitas sosial yang positif melalui *recognition* dan *social equality*. Pengakuan dan persamaan sosial inilah yang merupakan upaya integratif dalam mendukung proses pembentukan identitas bangsa. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks identitas, terdapat hubungan mutualis antara proses pembentukan identitas bangsa dengan budaya kewarganegaraan. Dalam tataran makro (*political culture*), proses pembentukan identitas bangsa yang demokratis sebagai *impact* dari integrasi yang *integrated pluralism* dapat memberikan suasana kondusif bagi pembangunan masyarakat multikultural; dan sebaliknya pada tataran mikro, melalui semangat multikulturalisme identitas individu yang terikat dengan *communitarian culture* dapat menempatkan diri dan berkesesuaian secara harmoni dengan *political culture*.

Berangkat dari pemikiran ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan kasus untuk kota Medan. Subyek penelitian melibatkan para tokoh etnis Tionghoa yang

Pendapat ini menunjukkan bahwa gerak integrasi yang mengalir pada awal pembentukan *nation-state* di Indonesia, berangkat dari *communitarian culture* menuju ke *political culture*, yang atas dasar *le desir de vivre ensemble* (Ernest Renan dalam Hartono, 1994: 54), bangsa-bangsa yang sudah lama hidup di Nusantara bersepakat mengikat diri menjadi suatu bangsa yang besar. Bangsa yang menggambarkan *imagined communities* (Anderson, 1983), dimana seseorang membayangkan keanggotaannya terhadap komunitas bangsanya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka integrasi yang dibutuhkan bagi bangsa Indonesia adalah integrasi yang dapat mengakomodir koeksistensi (pluralisme-budaya) guna mendorong pelestarian diversifikasi etnik dan rasial serta memperlakukan semua kategori penduduk secara setara (Habib, 2006). Integrasi dalam koridor *integrated pluralism*, berarti integrasi yang mengakui dan memberi penghormatan pada setiap entitas identitas. Menurut Hogg dan Abram (1988), setiap individu pada dasarnya ingin memiliki identitas sosial yang positif melalui *recognition* dan *social equality*. Pengakuan dan persamaan sosial inilah yang merupakan upaya integratif dalam mendukung proses pembentukan identitas bangsa. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks identitas, terdapat hubungan mutualis antara proses pembentukan identitas bangsa dengan budaya kewarganegaraan. Dalam tataran makro (*political culture*), proses pembentukan identitas bangsa yang demokratis sebagai *impact* dari integrasi yang *integrated pluralism* dapat memberikan suasana kondusif bagi pembangunan masyarakat multikultural; dan sebaliknya pada tataran mikro, melalui semangat multikulturalisme identitas individu yang terikat dengan *communitarian culture* dapat menempatkan diri dan berkesesuaian secara harmoni dengan *political culture*.

Berangkat dari pemikiran ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan kasus untuk kota Medan. Subyek penelitian melibatkan para tokoh etnis Tionghoa yang

memiliki kompetensi, peran dan pengaruh terhadap mobilitas dan perubahan sosial pasca-reformasi di Kota Medan. Pelibatan para tokoh etnis Tionghoa dalam penelitian ini dipandang penting, sehubungan dengan konflik hubungan antaretnis yang berulang terjadi, khususnya antara etnis-Tionghoa dengan etnis-etnis lainnya di Nusantara. Perspektif pemikiran para tokoh diungkap untuk memperoleh gambaran faktual yang berkenaan dengan: rekonseptualisasi integrasi pasca-reformasi, rekonstruksi identitas bangsa di era globalisasi, dan pembangunan masyarakat multikultural di era demokratisasi.

Medan, 14 November 2011

Dr. Deny Setiawan, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Integrasi Etnis Tionghoa di Indonesia	4
B. Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia	6
C. Pembangunan Masyarakat Multikultural	8
D. Hasil Penelitian Terlebih Dahulu	11
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
A. Tujuan Penelitian	14
B. Manfaat Penelitian	14
BAB IV. METODE PENELITIAN	16
A. Pendekatan, Metode dan Teknik Penelitian	16
B. Penentuan Subyek Penelitian	21
C. Analisis Data	23

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian.....	28
1. Deskripsi Singkat Keberadaan Etnis Tionghoa di Kota Medan	28
2. Profil Informan.....	37
3. Gagasan Para Tokoh Etnis Tionghoa.....	45
B. Pembahasan.....	59
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76
DRAFT ARTIKEL ILMIAH	95
SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Agama yang dianut penduduk menurut kecamatan..... 36

Tabel 2 : Etnik penduduk kota Medan menurut kecamatan 38

**Tabel 3 : Gagasan para tokoh etnis Tionghoa mengenai rekonseptualisasi
Integrasi 54**

**Tabel 4 : Gagasan para tokoh etnis Tionghoa dalam merekonstruksi
Identitas 62**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Sofyan Tan	42
Gambar 2 : Brilian Moktar	43
Gambar 3 : Indra Wahidin.....	47
Gambar 4 : Lily Tan.....	49
Gambar 5 : Vincent Wijaya.....	50
Gambar 6 : J. Anto.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : MATRIK PENGEMBANGAN PEDOMAN

PENELITIAN..... 93

LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI FOTO..... 99

**LAMPIRAN 3: PERSONALIA TENAGA PENELITI BESERTA
KUALIFIKASI, DLL..... 105**

LAMPIRAN 4: JUSTIFIKASI ANGGARAN TAHUN PERTAMA.. 110



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya merupakan gerak pembaharuan atas perubahan yang terencana yang dilakukan secara sengaja dalam tempo yang ditentukan secara bertahap. Dalam konteks Indonesia, istilah pembangunan sering diartikan sebagai "pembangunan manusia Indonesia seutuhnya" dan "pembangunan masyarakat", yang semenjak lahirnya orde baru direalisasikan dalam bentuk REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan terus berlangsung pada era reformasi saat ini dalam bentuk program pembangunan nasional. Namun hal umum yang sering terjadi pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tujuan pembangunan yang muaranya adalah kesejahteraan, justru masih banyak diwarnai oleh berbagai masalah. Model pembangunan pemerintah yang selama ini bersifat *uniform* dan *top-down*, telah menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pembangunan di Indonesia mengalami persoalan ketika bidang ekonomi yang diletakkan sebagai prioritas utama, berdampak tidak hanya mempengaruhi penataan infrastruktur, tetapi juga struktur serta suprastruktur yang menyangkut ide multikulturalisme. Berbagai kajian pembangunan di Indonesia menunjukkan, perbedaan-perbedaan etnis telah dikesampingkan karena dianggap sebagai faktor penghambat integrasi dan karenanya menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi yang sah bagi orde baru.

Kini salah satu persoalan mendesak berkaitan dengan masalah pembangunan di era reformasi adalah upaya mengintegrasikan perbedaan-perbedaan etnis tersebut dalam bingkai multikulturalisme. Ide multikulturalisme menjadi sesuatu yang tak terbantahkan berkaitan dengan fakta mosaiknya Indonesia sebagai Nusantara beserta atribut multikultur yang melekat padanya. Namun ide dan praktik multikulturalisme mendapat tantangan terberat pada saat jatuhnya rezim orde baru, seiring memasuki era reformasi yang mengidamkan terwujudnya kehidupan demokratis. Harapan terwujudnya masyarakat multikultural yang demokratis, pada awal reformasi justru tercoreng oleh suatu tragedi kemanusiaan yang merusak citra bangsa. Dalam tragedi tersebut, salah

satu dari mereka yang menjadi korban (di-korban-kan) adalah mereka yang selama ini kita golongkan sebagai non-pribumi, yaitu minoritas etnis Tionghoa. Reformasi yang selayaknya adalah suatu gerakan pembaharuan justru diwarnai oleh semacam tumpahan dendam, yaitu dendam terhadap rezim yang selama 32 tahun mengukung kebebasan hingga menjalar pada dendam terhadap etnis Tionghoa yang selama ini dianggap diistimewakan.

Dimulai dari masa kolonial melalui politik *divide et impera*, segregasi dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini memang telah diciptakan. Berlanjut pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, yang justru melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan rezim, telah mengentalkan segregasi dan diskriminasi hingga melestarikan *prejudice* atau prasangka dan *stereotype* pada tataran *private space*. Fakta sejarah ini merupakan salah satu masalah terkendalanya integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa, malah merupakan *contraditio in terminis* dari konsep Bhineka Tunggal Ika (*unity in diversity*). Untuk itu di alam reformasi ini, masalah integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa, masih merupakan suatu tema yang urgen untuk dilakukan sebagai input dalam mendukung agenda reformasi. Tema integrasi dan identitas bangsa pasca reformasi masih perlu banyak dilakukan guna mencari gagasan dan model yang pas dalam mendukung upaya pembangunan masyarakat multikultural.

Pemikiran ini menjadi gagasan awal peneliti untuk mengkaji hubungan antar etnis, khususnya antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis lainnya di Kota Medan dalam kaitannya dengan konseptualisasi integrasi dan formulasi identitas bangsa. Kedua konsep tersebut perlu dikaji ulang melalui dialog dengan beberapa tokoh etnis Tionghoa, yang dalam proses rekonseptualisasi dan rekonstruksinya juga melibatkan organisasi etnis yang ada di kota Medan, pakar akademisi dari beberapa perguruan tinggi, anggota dewan, dan *decision makers*. Luaran dari penelitian ini ditargetkan dapat menghasilkan konstruksi integrasi pasca reformasi dan formulasi identitas bangsa di era globalisasi, sebagai masukan, model dan kebijakan dalam memproyeksikan pembangunan masyarakat multikultural untuk kota Medan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka rumusan masalah penelitian pada tahun pertama adalah :

1. Bagaimanakah gambaran faktual mengenai perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa mengenai rekonseptualisasi integrasi pasca-reformasi untuk Kota Medan?
2. Bagaimanakah gambaran faktual mengenai perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa mengenai rekonstruksi identitas bangsa di era globalisasi untuk Kota Medan?
3. Bagaimanakah gagasan dan proyeksi versi para tokoh etnis Tionghoa mengenai model pembangunan masyarakat multikultural yang cocok untuk kota Medan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Integrasi Etnis Tionghoa Di Indonesia

Blusse (1991: 1) mengemukakan bahwa "Masalah Cina" merupakan isu yang hangat dibicarakan dalam masyarakat Indonesia, dan tanpa bisa dihindari, persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan; apakah etnis Tionghoa di Indonesia harus *survive* pada identitas kebudayaan mereka sendiri, atau harus berintegrasi ke dalam kebudayaan Indonesia. Namun pertanyaan ini belum bisa dijawab final, karena sejak jaman kolonial hingga reformasi 1998, kerusuhan antar etnis - dalam hal ini terhadap etnis Tionghoa di Indonesia - selalu berulang terjadi, seolah-olah terus mengikuti dinamika sejarah Indonesia.

Mengapa kerusuhan terhadap etnis Tionghoa berulang kali terjadi di Indonesia? Kata kuncinya adalah segregasi atau keterpisahan. Pada dasarnya memang sudah menjadi niat penguasa kolonial untuk mencegah terjadinya persatuan antar etnis. Pemerintah kolonial menganggap bahwa monopoli dan otoritas mereka akan terancam apabila berbagai kelompok etnis yang ada saat itu menggabungkan kekuatan untuk melawan mereka (Simbolon, 1991: 40).

Kebijakan penting yang ikut meningkatkan keterpisahan etnis Tionghoa dari masyarakat pribumi adalah sistem status yang membagi stratifikasi sosial secara hierarkhis menjadi tiga kelompok golongan, yaitu: golongan Eropa di atas, golongan Timur Asing di tengah, dan golongan pribumi di bawah. Masing-masing golongan memiliki status dan hak-hak yang berbeda, dan secara umum orang Tionghoa yang masuk kategori Timur Asing berada pada posisi yang lebih menguntungkan daripada golongan pribumi (Coppel, 1993: 13). Oleh karena itu, asimilasi dengan golongan pribumi akan mengakibatkan penurunan status sosial dan sekaligus kehilangan hak-hak istimewanya.

Keterpisahan etnis Tionghoa di Hindia Belanda juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi pemerintah kolonial. Penguasa waktu itu memberikan berbagai monopoli dari penarikan pajak, distribusi perdagangan komoditas tertentu, dan lain-lain kepada segelintir orang Tionghoa yang kaya dan mempunyai koneksi dekat dengan mereka. Di satu pihak dengan memanfaatkan

orang Tionghoa, para penguasa kolonial memperoleh hasil pajak yang besar tanpa harus kerja keras sendiri. Di pihak lain, individu-individu Tionghoa yang menjadi kroni penguasa tersebut juga berhasil membuat keuntungan yang tidak kalah besarnya dari kolusi itu (Williams, 1960: 24-27). Namun demikian, setiap kali muncul kritik atau protes terhadap penurunan kesejahteraan penduduk pribumi, para pejabat kolonial seringkali mengkaitkannya dengan orang Tionghoa yang kegiatannya sebagai pemungut cukai/pajak dan rentenir bisa mudah dituduh menggerogoti kesejahteraan rakyat.

Dua kebijakan di atas, hanya merupakan contoh, bahwa kebijakan pemerintah kolonial mempunyai pengaruh yang besar dalam membuat golongan etnis Tionghoa terpisah dari masyarakat Indonesia. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, pemerintah mulai melancarkan proses pribumisasi di sektor ekonomi untuk mengurangi kekuatan ekonomi etnis Tionghoa dan mengembangkan wiraswasta pribumi. Tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1959 yang melarang orang Tionghoa melakukan perdagangan di pedesaan (Mackie, 1976: 77). Larangan tersebut mengakibatkan eksodusnya orang-orang Tionghoa ke perkotaan, dan dengan begitu semakin mempertegas dikotomi domisili.

Orde Baru pun tidak berbeda dari Orde Lama. Walaupun dalam ruang publik (*public-space*), Orde Baru menghendaki kebijakan asimilasi, namun dalam ruang pribadi (*private-space*) masyarakat masih melakukan diskriminasi. Karena itu, dalam batas tertentu, Orde Baru cenderung menerapkan kebijakan kesetaraan legal daripada kebijakan koeksistensi (*pluralisme-budaya*) terhadap kelompok minoritas etnis Tionghoa. Olsen menggambarkan kesetaraan legal sebagai kebijakan yang munafik, sebab meskipun dalam ruang publik ada pengakuan kesetaraan, tetapi dalam ruang privat malah terjadi permusuhan terhadap etnik minoritas. Kesetaraan legal merupakan kebijakan mendua; yang satu pihak, menetapkan kendala legal terhadap diskriminasi formal oleh organisasi terhadap kelompok minoritas, sedangkan di lain pihak menerima diskriminasi informal dalam hubungan antar-pribadi dengan individu etnik minoritas (Habib, 2006).

Dari gambaran di atas, memperlihatkan segregasi dan diskriminatif telah berlangsung lama. Bahkan sampai pada tanggal 13-15 Mei 1998, segregasi dan

diskriminatif itu diwarnai oleh kerusuhan yang oleh Pattiradjawane (2000: 213) dinilai sebagai titik terendah dalam sejarah etnis Tionghoa di Indonesia.

B. Identitas Etnis Tionghoa Di Indonesia

Menurut Lan (1998) pencarian jati diri orang Tionghoa di Indonesia dihadapkan pada beberapa pilihan, yaitu: menjadi Indonesia, tetap Tionghoa atau mengadopsi identitas lain. Namun demikian nampaknya pilihan-pilihan tersebut tidak selalu menempatkan orang Tionghoa pada keadaan yang mudah. Pilihan dengan identitas Indonesia telah difasilitasi pemerintah Orde Baru yang memberlakukan asimilasi inkorporasi (total) bagi orang Tionghoa untuk menghilangkan identitas Tionghoa-nya dan menjadi Indonesia. Namun demikian motivasi pemberlakuan asimilasi inkorporasi nampaknya lebih bernuansa 'hukuman' karena sangkaan keterlibatan orang Tionghoa dalam pemberontakan PKI tahun 1965. Bahkan kenyataannya kebijakan tersebut justru memberikan kontribusi terhadap berbagai kerawanan dan gejolak sosial yang memprihatinkan seperti prasangka, kerusuhan-kekerasan massa dengan sasaran etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut juga menyisakan trauma bagi golongan minoritas ini, selain akibat berbagai tindakan kekerasan yang dialaminya, juga akibat perlakuan diskriminatif yang membelenggu gerak hidup masyarakat Tionghoa ini (Susetyo, 1999). Asimilasi inkorporasi (total) itu sendiri pada kenyataannya telah gagal. Kenyataan ini membuktikan, tidaklah mungkin untuk meniadakan akar budaya suatu golongan masyarakat begitu saja.

Sedangkan memilih mempertahankan identitas sebagai orang Tionghoa juga bukan persoalan yang mudah, karena ke-Tionghoa-an lekat dengan berbagai citra yang kurang menguntungkan di mata etnis pribumi maupun kalangan birokrasi pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari berkembangnya stereotip, prasangka dan diskriminasi yang semakin mempertegas citra buruk etnis Tionghoa di mata etnis Indonesia lainnya. Sementara di kalangan aparat, birokrasi pemerintahan sendiri sampai sekarang nampaknya masih menggunakan paradigma lama dengan memberlakukan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, misalnya dalam hal status kependudukan ataupun status kewarganegaraan. Walaupun sudah keluar UU No. 22 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI,

namun dalam prakteknya perlakuan diskriminatif tersebut masih saja berjalan (Verdiansyah, 2007).

Sementara di kalangan internal masyarakat Tionghoa sendiri, juga sedang terjadi pergeseran dalam memaknai arti identitas Tionghoa itu sendiri dalam format yang berubah. Menurut Lan (1998) pergeseran tersebut terjadi dari ke-Tionghoa-an yang tradisional dan berorientasi etnis dan negeri leluhur menjadi ke-Tionghoa-an yang modern dan berorientasi nasional dan lokal (dalam hal ini Indonesia). Pergeseran ini nampaknya juga terkait dengan upaya meninggalkan trauma masa lalu, dimana identitas Tionghoa yang berorientasi pada budaya negeri leluhur tidak jarang terjebak pada persoalan-persoalan yang bernuansa politik, misalnya ketika hubungan antara Indonesia dengan RRC memburuk. Keberadaan etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas juga sering kurang menguntungkan dalam konteks relasi minoritas – mayoritas. Etnis minoritas selalu menjadi sasaran prasangka dan diskriminasi dari kalangan mayoritas. Beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pengganti (*displacement*), atau kambing hitam bagi rakyat yang frustrasi di era pemerintahan Orde Baru yang represif dalam bentuk kerusuhan anti Tionghoa. Kedudukan sebagai minoritas bagaimanapun selalu rawan, baik itu dalam posisi sebagai minoritas yang lemah maupun minoritas yang kuat.

Dari berbagai tekanan dan ketidakpastian tersebut, maka banyak orang Tionghoa berada di persimpangan jalan. Hal tersebut setidaknya tergambar dari temuan penelitian dari Lan (1998) yang menunjukkan bahwa sekarang ini berkembang berbagai orientasi identifikasi diri di kalangan orang Tionghoa di Indonesia. Setidaknya ada empat orientasi yang ditemukan, yaitu: kelompok pertama, adalah mereka yang percaya bahwa mereka adalah etnis Tionghoa dan akan selalu menjadi etnis Tionghoa. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi diri, mereka selalu kembali ke asal usul dan warisan budaya etnis Tionghoa. Kelompok kedua, adalah mereka yang merasa telah berhasil berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa asal usul etnis dan budaya mereka merupakan kutukan yang menyulitkan posisi mereka untuk menjadi bagian yang utuh dari masyarakat di mana mereka tinggal. Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkeyakinan bahwa mereka telah melampaui batas

etnis, negara dan bangsa serta telah menjadi seorang yang globalis dan internasionalis. Sedangkan kelompok keempat, adalah mereka yang cenderung beranggapan bahwa hidup mereka ditentukan oleh pekerjaan mereka, sehingga mereka lebih suka menghindari pengidentifikasian diri secara budaya maupun politis.

Demikian pula temuan dari Tan (1998) yang meneliti tentang aspirasi dan partisipasi politik orang Tionghoa, ternyata terpilah-pilah menjadi lima kelompok cara pandang, yaitu: kelompok pertama adalah yang merasa perlu menonjolkan identitas etnis mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai golongan, misalnya dengan mendirikan Partai Tionghoa. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau menjadikan etnis atau agama sebagai basis gerakan, melainkan melalui *platform* persamaan hak, misalnya dengan mendirikan Partai Bhineka Tunggal Ika. Kelompok ketiga adalah kelompok yang lebih menyukai sebuah forum yang tujuan utamanya lebih sebagai *pressure group*. Kelompok keempat adalah mereka yang membentuk paguyuban kelompok karena perasaan senasib sepenanggungan. Misalnya dengan mendirikan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Sedangkan kelompok kelima adalah mereka yang bergabung dalam partai politik yang terbuka seperti PDI Perjuangan, PAN dan lain sebagainya.

Dari paparan di atas, diperoleh gambaran tentang bagaimana dinamika pencarian identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Pada kenyataannya di tengah masyarakat etnis Tionghoa telah berkembang subkultur-subkultur baru yang merupakan respon terhadap realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Tionghoa yang plural.

C. Pembangunan Masyarakat Multikultural

Istilah multikultur berakar dari kata kultur. Pada umumnya, kultur diartikan sebatas pada budaya dan kebiasaan sekelompok orang pada daerah tertentu (Yaqin, 2005: 6). Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham) (Tilaar, 2004). Multikultur sebenarnya merupakan kata dasar yang mendapat awalan. Kata dasar itu adalah kultur yang berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan sedang awalannya adalah multi yang berarti banyak, ragam, atau aneka. Dengan demikian

multikultur berarti keragaman kebudayaan, keaneka kesopanan, atau banyak pemeliharaan.

Multikulturalisme dapat dikatakan berkembang dari negara besar demokrasi yaitu Amerika Serikat. Sebagai pentolan demokrasi, masyarakat Amerika dapat hidup dengan subur dalam segregasi dan diskriminasi ras. Sejarah mencatat terjadinya perang saudara pada pertengahan abad ke-19 sebenarnya merupakan cikal-bakal lahirnya multikulturalisme di dunia. Abraham Lincoln sebagai pejuang demokrasi dengan politik abolisinya dapat menghapus perbudakan. Hasil perjuangannya menempatkan ras negro pada tempat yang layak di Amerika Serikat. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa ras dengan kultur minoritas dapat berbaaur dengan ras dan kultur yang lebih kompleks. Ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat multikultural, ras dan kultur yang bervariasi dapat bersinergi dalam pembangunan.

Namun yang jelas Indonesia bukanlah Amerika Serikat, yang memiliki sejarah, *geist* dan nilai-nilai, serta ideologi yang berbeda. Untuk itu pencarian model multikulturalisme di Indonesia di alam reformasi, demokratisasi, dengan terpaan globalisasi, merupakan upaya yang masih dipandang urgen dalam pembangunan masyarakat multikultural di Indonesia. Singkatnya kajian mengenai multikulturalisme dalam ruang ke-Indonesia-an, perlu diperdalam minimal meliputi dimensi: multikulturalisme sebagai *politic of recognition*, multikultur dalam *ethnic and cultural group*, dan multikulturalisme dalam karakteristik sosial.

Multikulturalisme sebagai *politic of recognitions* sebagai sebuah paham menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme ada pada kesetaraan budaya (Abdullah dalam Kompas, 16 Maret 2003). Sementara multikultur dalam *ethnic and cultural groups*, sebenarnya merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku (etnis), dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang ada

dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Wahid dalam Kompas, 23 Juni 2004). Sedangkan multikulturalisme dalam dimensi karakteristik sosial, digunakan dalam rangka berjalannya interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial (Abidin dkk, 2003: 108).

Sekaitan dengan tiga dimensi multikulturalisme di atas, Parekh (1997) secara jelas menguraikan adanya lima model multikulturalisme yang dapat menjadi alternatif tawaran bagi pembangunan masyarakat multikultural. Tentu saja pembagian kelima bentuk multikulturalisme itu tidak kedap air (*zoatertight*), sebaliknya bisa tumpang tindih dalam segi-segi tertentu. Kelima model multikulturalisme tersebut adalah:

Pertama, multikulturalisme isolasionis yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. *Kedua*, multikulturalisme akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Kepedulian pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok yang dominan. Mereka menentang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar.

Keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, multikulturalisme kosmopolitan, yakni paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya

tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme jenis ini, yang sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernis memandang seluruh budaya sebagai *resources* yang dapat mereka pilih dan diambil secara bebas.

Dari beberapa pengertian tersebut, ada benang merah yang dapat dijadikan pijakan, yaitu hal yang paling utama dari makna dan pemahaman multikulturalisme adalah kesejajaran budaya. Masing-masing budaya manusia atau kelompok etnis harus diposisikan sejajar dan setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih dominan. Semua kebudayaan pada dasarnya mempunyai kearifan-kearifan tradisional yang berbeda-beda.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Fakta sejarah menunjukkan baik pada masa kolonial, Orde Lama dan Orde Baru, kebijakan-kebijakan yang diambil penguasa selalu mengandung unsur segregasi, sehingga kerusuhan terhadap etnis Tionghoa pun selalu berulang terjadi. Sementara dalam *private-space* sendiri, perlakuan diskriminasi terhadap minoritas etnis Tionghoa masih mewarnai dalam hubungan antar etnis sehari-hari.

Fakta di atas didukung oleh beberapa hasil penelitian seperti oleh Patiradjawane (2000: 213) yang menggambarkan kasus kerusuhan 13-15 Mei 1998 sebagai titik terendah dalam sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Hasil penelitian lainnya Rakhmat dan Mulyana (1990), menggambarkan terjadinya penguatan ikatan primordial dalam komunikasi antar budaya, seperti: pembagian peranan yang tidak adil, perlakuan khusus terhadap etnik tertentu, kolusi dan nepotisme, sebagai dampak dari perebutan sumber daya (baik perebutan material, ideologi-politik, sosial-budaya, dan hak historis). Intensitas konflik ini secara potensial dapat menjadi masalah krusial yang membahayakan integrasi nasional. Bahkan secara khusus untuk kasus kota Medan (Pelly, 1983; 1986) mengungkapkan bahwa pemukiman eksklusif kelompok-kelompok etnis Tionghoa di kota berfungsi sebagai "kepompong" atau yang dimanfaatkan oleh mereka sebagai benteng etnik. Orang Tionghoa yang keluar dari pemukiman

Tionghoa (*Chinese Quarter*) tersebut dapat dianggap sebagai pembelotan dari jaringan sosial mereka. Dengan demikian suasana etnik dan ras (*ethnic race-space*) di perkampungan etnik tersebut menguatkan kecenderungan segregasi atau pemisah diri dari kelompok lain.

Hasil penelitian lainnya, diperjelas oleh Witanto (2000), bahwa kekerasan terhadap etnik Tionghoa di Indonesia, khususnya pada Mei 1998, tidak bisa serta merta timbul karena sentimen etnik. Salah satu faktor yang mendorong munculnya konflik dan kekerasan tersebut adalah morfologi fisik pemukiman. Pola pemukiman yang berubah menjadi model sosio ekonomi yang eksklusif telah menumbuhkan citra negatif sebuah kelompok bermodal (baca: Tionghoa). Di lain pihak, kondisi perkotaan yang semakin parah telah memberikan tekanan tersendiri bagi warga kota secara umum. Akibatnya, sentimen etnik terhadap kelompok bermodal yang selama ini tersembunyi, menjadi mengemuka karena kelompok bermodal dianggap tidak terkena dampak krisis ekonomi.

Berbagai kajian dan hasil penelitian di atas, menunjukkan masih terdapatnya "Masalah Cina" (Blusse, 1991: 1) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Begitu pun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sendiri, memandang perlu untuk mengangkat tema integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa untuk menumbuhkan budaya kewarganegaraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pasca reformasi 1998 dalam konteks ke-Indonesia-an baru, penerapan integrasi sebagai strategi dalam proses pembentukan identitas bangsa perlu di dukung oleh dua ruang, yaitu; *public-space* dan *private-space* yang saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan hubungan antara etnis - termasuk terhadap etnis Tionghoa - yang kondusif untuk menumbuhkan budaya kewarganegaraan yang demokratis. Hasil penelitian ini juga menunjukkan, pandangan dan gagasan dari para tokoh senior tentang integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa serta peran mereka dalam Pembangunan Masyarakat Multikultural, telah mempengaruhi anak muda Tionghoa untuk turut serta berkiprah dalam proses pembangunan bangsa. Di era reformasi ini dibutuhkan strategi integrasi yang bersifat terbuka. Melalui bentuk integrasi ini, mereka mendapatkan peluang yang sama untuk memasuki berbagai sektor publik, namun dengan tantangan jaman yang berbeda. Sisi lain

dari penelitian ini juga menggambarkan, profil para aktivis mahasiswa etnis Tionghoa memperlihatkan adanya fenomena pergeseran identitas, seperti telah terjadi pergeseran orientasi *ascribed status* ke *achievement status*. Dari sudut pandang kebangsaan dan kewarganegaraan juga telah terjadi pergeseran pendekatan, dari *ethnic nationalism* ke *civic nationalism* bahkan ke *multicultural nationalism*. Keinginannya untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, menghargai keragaman dan keberbedaan etnis, serta komitmen solidaritas antar kelompok, memungkinkan terwujudnya suatu *social and political ideal of togetherness in difference* (Setiawan, 2009).



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh gambaran faktual mengenai perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa mengenai rekonseptualisasi integrasi pasca-reformasi untuk Kota Medan.
2. Memperoleh gambaran faktual mengenai perspektif pemikiran etnis Tionghoa mengenai rekonstruksi identitas bangsa di era globalisasi untuk Kota Medan.
3. Menghasilkan model pembangunan masyarakat multikultural yang cocok untuk kota Medan.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian tahun pertama ini, tidak hanya untuk mengembangkan ilmu secara teoritis, akan tetapi juga dapat bermanfaat secara praktis. Untuk lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Diharapkan kajian empirik yang menggunakan pendekatan naturalistik ini memiliki urgensi bagi pengembangan Pendidikan Multikultural. Tema-tema integrasi, identitas, dan multikulturalisme, dapat dijadikan sebagai bahan kajian esensial dalam proses pembelajaran Pendidikan Multikultural.

2. Segi Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan dan pencapaian proses integrasi bangsa Indonesia yang multi etnis, terutama integrasi etnis Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Untuk itu penemuan perspektif untuk konstruksi integrasi yang sesuai bagi bangsa Indonesia pasca reformasi di era globalisasi dan demokratisasi ini, diharapkan dapat memberikan dukungan dalam proses pembentukan identitas bangsa. Selanjutnya integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa tersebut, dapat memberikan kondisi yang kondusif bagi pembangunan masyarakat multikultural.

Manfaat penelitian di atas, dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Para pengambil keputusan pemerintah kota dalam menentukan kebijakannya terutama yang terkait dengan program integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa untuk membangun hubungan antar etnik yang kondusif di era otonomi daerah dalam upaya pembangunan masyarakat multikultural di kota Medan.
2. Organisasi Etnis di kota Medan dalam turut membangun hubungan antar etnis yang harmonis dalam koridor ber-bhineka tunggal ika.
3. Dinas pendidikan, Kepala sekolah dan guru, pimpinan perguruan tinggi dan dosen, dalam turut merancang kurikulum pendidikan multikultural untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter peserta didik yang demokratis.
4. Seluruh komponen bangsa dalam mengembangkan nilai-nilai sosial budaya bangsa untuk membangun integrasi, identitas bangsa dan multikulturalisme dalam ruang ke-Indonesia-an.



BAB IV METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Metode, dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap secara mendalam mengenai fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan perspektif partisipan, yaitu perspektif individu-individu sebagai subjek penelitian mengenai tema integrasi, tema identitas bangsa, dan multikulturalisme, melalui situasi yang wajar (*natural setting*).

Bogdan dan Biklen (1992, 29: 33) menjelaskan bahwa istilah penelitian kualitatif sesungguhnya merupakan payung untuk berbagai strategi penelitian yang mempunyai persamaan karakteristik yang antara lain :

- a. *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument.*
- b. *Qualitative research is descriptive.*
- c. *Qualitative researcher are concerned with process rather than simply with outcomes or products.*
- d. *Qualitative researcher tend to analyze their data inductively.*
- e. *"Meaning" is of essential concern to the qualitative approach.*

Dari pendapat di atas, menggambarkan bahwa sebuah penelitian kualitatif mementingkan sumber data langsung dari situasi yang wajar di mana peneliti sebagai instrumen utama dan bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data yang kaya dengan deskripsi tentang orang, tempat, dan peristiwa, yang sulit untuk diproses secara statistik, karena memang kelompok penelitian ini lebih mengutamakan proses daripada produk. Karakteristik lainnya adalah kecenderungan untuk menganalisis data secara induktif, karena dengan proses demikian memungkinkan dilakukannya identifikasi terhadap kenyataan-kenyataan yang begitu majemuk. Fenomena dipelajari dengan cara memperhatikan fenomena lainnya yang sama atau tidak sama, yang kemudian peneliti membangun sebuah teori yang akan menjelaskan apa yang dikajinya secara induktif. Karakteristik lain

yang dimiliki kelompok penelitian dengan pendekatan kualitatif ini ialah dalam kepedulian yang esensial tentang makna. Oleh karena itu perhatian peneliti difokuskan terhadap pandangan atau perspektif para objek penelitian terhadap masalah yang mereka hadapi (*participant perspectives*).

Dengan mempelajari berbagai perspektif ini diharapkan dinamika internal berbagai macam situasi yang sedang diteliti akan dapat dimengerti melalui *verstehen*. Kita dapat mengerti (*verstehen*) tentang tindakan manusia apabila kita mendalami makna-makna subjektif yang diberikan si pelaku terhadap perilakunya sendiri dan terhadap perilaku orang lain (Max Weber dalam Coser, 1971: 220).

Pendapat di atas, menunjukkan bahwa penelitian naturalistik lebih mengungkapkan pandangan tentang kehidupan dari orang-orang yang berbeda-beda. Pemikiran ini didasari pula oleh kenyataan bahwa "makna" yang ada dalam setiap manusia itu berbeda-beda. Oleh karenanya, tidak mungkin untuk mengungkap kenyataan yang ada dalam diri manusia yang unik itu dengan menggunakan alat lain, kecuali manusia sebagai instrumen. Dengan demikian melalui pendekatan kualitatif naturalistik ini, banyak hal yang dapat dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen, seperti; menggambarkan temuan secara holistik, menganalisis, melaporkan pandangan dari para subjek penelitian, dan bekerja dalam situasi yang alamiah.

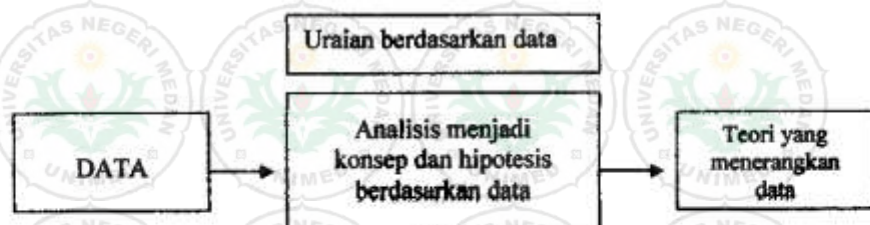
2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *grounded theory*, yang oleh Creswell (1998: 56) dijelaskan bahwa:

A grounded theory study is to generate or discover a theory, an abstract analytical schema of a phenomenon, that relates to a particular situation. This situation is one in which individuals interact, take actions, or engage in a process in response to a phenomenon. To study how people act and react to this phenomenon, the researcher collects primarily interview data, makes multiple visits to the field, develops and interrelates categories of information, and writes theoretical propositions or hypotheses or presents a visual picture of theory.

Ini berarti makna yang terdapat dalam *grounded theory* adalah teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena yang dijelaskannya. *Grounded theory* memberikan peluang yang sangat besar untuk menemukan teori baru, disusun dan dibuktikan melalui pengumpulan data yang sistematis, dan analisis data yang berkenaan dengan fenomena itu. Pengumpulan data, analisis data, dan teori saling terkait dalam hubungan timbal-balik. Peneliti tidak memulai penyelidikan dengan pegangan pada suatu teori tertentu lalu membuktikannya, melainkan dengan berpegang pada suatu kajian dan hal-hal yang terkait dengan kajian tersebut (Strauss dan Corbin, 2003: 10-11). Hal ini berarti bahwa landasan teori sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab terdahulu bukanlah merupakan harga mati, tetapi masih bersifat sementara. Peneliti kualitatif justru dituntut untuk melakukan *grounded research*, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial (Sugiyono, 2008: 296).

Dengan demikian *grounded research* bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif. Dalam penelitian ini data dianggap sebagai inspirasi teori, kemudian bergerak membentuk teori yang menerangkan data. Untuk lebih jelasnya dapat diilustrasikan seperti bagan di bawah ini:



Alur dalam Penelitian *Grounded Research*

Berdasarkan alur dalam penelitian *grounded research* di atas, peneliti berpegang pada format desain sebagai berikut:

Tahap I, Observasi Pendahuluan:

- a. Menemukan tema-tema pokok penelitian
- b. Menemukan *Gatekeepers*
- c. Menemukan gambaran umum tentang alur penelitian

Tahap II, Pengumpulan Data:

- a. Menemukan Informan
- b. Mewawancara dan mengobservasi serta membuat catatan harian
- c. Menemukan informan baru
- d. Mengembangkan strategi wawancara dan observasi
- e. Menggunakan triangulasi untuk menemukan kebenaran data
- f. Terus menerus membuat catatan harian

Tahap III, Pengumpulan Data Lanjutan:

- a. Merevisi draft laporan penelitian
- b. Menemukan kekurangan data dan informasi
- c. Membuang informasi yang tidak penting
- d. Menemukan informan baru
- e. Terus menerus menggunakan triangulasi
- f. Terus menerus membuat catatan harian baru
- g. Memutuskan untuk menghentikan penelitian
- h. Mengembangkan draft laporan menjadi rancangan laporan akhir

(Sumber: Bungin, 2008: 73).

Dalam tradisi penelitian kualitatif, format penelitian di atas bukanlah sesuatu ukuran baku yang tidak dapat diubah dan dikonstruksi ulang. Format desain ini dapat saja mengalami perubahan, tergantung situasi sosial yang dihadapi di lapangan. Format desain *grounded research* dikonstruksi agar peneliti dapat mengembangkan semua pengetahuan dan teorinya setelah mengetahui permasalahannya di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan pendekatan dan metode yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi: studi dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Dalam studi dokumentasi, peneliti memanfaatkan sumber kepustakaan berupa buku teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, data hasil survey/sensus, dan dokumen-dokumen negara/ Pemerintah Kota/Daerah serta catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan fokus dari penelitian ini.

Sementara observasi memungkinkan peneliti melihat sudut pandang subyek dalam menanggapi dunianya, hidup dalam kerangka waktunya, menyaksikan budaya yang dihayatinya dalam keadaan lingkungan yang wajar, serta harapan-harapannya dimasa datang. Melalui pengamatan membuka peluang bagi peneliti, untuk memikirkan secara introspektif reaksi-reaksi emosional subyek berlandaskan *tacit knowledge* baik dari peneliti sendiri maupun dari subyek (Lincoln dan Guba, 1985: 273).

Sedangkan wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang perspektif pemikiran perorangan, seperti: pandangan, gagasan, perasaan, motivasi, kepedulian, tuntutan, dan harapan dari para subyek penelitian. Wawancara juga dilakukan untuk mencari informasi tentang kegiatan seseorang, sehingga diperoleh gambaran faktual mengenai pemahaman, kebiasaan, perilaku atau pola kehidupan seseorang pada berbagai dimensi. Selain itu wawancara juga dilakukan untuk merekonstruksi masa lampau dan proyeksi ke masa depan. Wawancara juga dimanfaatkan untuk mengembangkan informasi yang sudah didapat, atau untuk perubahan dan verifikasi.

3.2. Instrumen dan Peran Peneliti

Dalam penelitian naturalistik, peneliti berperan sekaligus sebagai instrumen (*human instrument*) pengumpul data. Lincoln dan Guba (1985: 193-194) mengemukakan sejumlah alasan manusia (peneliti) sebagai alat pengumpul data, yaitu: (a) *responsiveness*, (b) *adaptability*, (c) *holistic emphasis*, (d) *knowledge base expansion*, (e) *processual immediacy*, (f) *opportunities for clarification and summarization*, dan (g) *opportunities to explore typical or idiosyncratic responses*.

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai *human instrument*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bogdan dan Biklen (1982: 27) bahwa "*Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the key instrument.*" Peneliti yang berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data merupakan aspek penting dalam proses penelitian secara keseluruhan. Peneliti dapat memanfaatkan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk memperoleh data dan informasi secara akurat.

Penetapan peneliti yang berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, didasarkan pada asumsi bahwa: (1) peneliti akan dapat berinteraksi dengan subyek penelitian dan lingkungan yang ada, dan dapat memiliki kepekaan terhadap segala stimulus yang berkaitan dengan fokus penelitian, (2) peneliti akan dapat menyesuaikan diri dengan semua aspek keadaan sehingga dapat memahami situasi dengan segala bentuknya, (3) melalui *verstehen* sebagai *interpretative understanding*, peneliti dapat memahami, merasakan empati (*Einfuehlung*), dan penghayatan (*Nacherleben*) secara simultan terhadap segala fenomena yang muncul secara kontekstual, sehingga dapat menganalisis, menafsirkan, dan merumuskan kesimpulan sementara dalam menentukan proses analisis dan memperjelas temuan penelitian, (4) peneliti akan mengungkap lebih lanjut dan mendalami terhadap segala kemungkinan respon dari jawaban subyek penelitian. Keragaman respon ini selanjutnya akan dapat dipergunakan untuk mempertinggi pemahaman dan validitas mengenai aspek yang diteliti, oleh karena hanya peneliti yang dapat menginterpretasikan data secara kontekstual.

B. Penentuan Subyek Penelitian

Di dalam penelitian naturalistik, penentuan subyek penelitian dilakukan secara purposif sebagaimana diisyaratkan oleh Lincoln dan Guba (1985) maupun oleh Bogdan dan Biklen (1982). Penentuan subyek penelitian yang purposif dimaksudkan untuk dapat menjaring data semaksimal mungkin dengan segala kompleksitasnya. Namun demikian penentuan subyek penelitian yang purposif tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari persamaan yang mengarah pada pengembangan generalisasi, melainkan untuk mencari informasi secara rinci yang sifatnya spesifik yang memberikan citra khas dan unik. Tujuan lain dari penentuan subyek penelitian yang purposif adalah untuk mengembangkan informasi yang diperlukan sebagai landasan dari desain dan teori mendasar (*grounded theory*) yang muncul dari telaah studi ini (Lincoln dan Guba, 1985: 201).

Selanjutnya ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subyek penelitian, yakni latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*events*), dan proses (*process*) (Miles dan Huberman, 1984: 38).

Berdasarkan kriteria di atas dan fokus penelitian yang telah dirumuskan di muka, maka penetapan subyek penelitian yang purposif ditujukan pada tokoh etnis Tionghoa Medan, yang berarti: kriteria latar (*setting*) dalam penelitian ini adalah situasi Kota Medan pasca reformasi 1998 sebagai tempat berlangsungnya proses pengumpulan data. Studi dokumentasi, observasi, dan wawancara akan sering dilakukan di lingkungan kantor, lembaga/organisasi, di rumah, atau di tempat lainnya, baik secara formal maupun informal. Sedangkan kriteria pelaku (*actors*) dalam penelitian ini adalah para tokoh etnis Tionghoa yang mempunyai peran yang besar yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berdasarkan observasi yang cermat, peneliti kemudian akan memfokuskan pemilihan subyek penelitian pada tahap *continuous adjustment* atau *focusing* (Lincoln dan Guba, 1982: 202) pada beberapa orang yang dianggap kompeten, yang kemudian ditetapkan sebagai subyek penelitian terfokus. Selanjutnya mengenai peristiwa (*events*) sebagai kriteria ketiga adalah perspektif pemikiran dari para subyek penelitian terfokus mengenai pandangan dan gagasan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sementara proses (*process*) sebagai kriteria keempat adalah proses wawancara antara peneliti dengan subyek penelitian terfokus baik secara formal maupun informal berkenaan dengan perspektif pemikirannya terhadap "integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa" pasca reformasi 1998 untuk menumbuhkan budaya kewarganegaraan yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat multikultural di kota Medan.

Berdasarkan kriteria pemilihan dan penetapan subyek penelitian di atas, maka ditetapkan subyek penelitian terfokus yaitu tokoh etnis Tionghoa di kota Medan sebagai berikut:

1. Sofyan Tan (Tokoh Pembauran)
2. Brilian Moktar (Ketua Komisi B DPRD Sumut)
3. Lily Tan (Ketua Fraksi Medan Bersatu DPRD Kotan Medan)
4. Vincent Wijaya (Ekonom)
5. Indra Wahidin (Ketua INTI)
6. J. Anto (Penulis Buku)

C. Analisis Data

Tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan temuan-temuan (Patton, 1990: 371). Dengan demikian proses pengumpulan data bukan merupakan akhir dalam penelitian kualitatif. Aktivitas akhir dari penelitian kualitatif adalah analisis, interpretasi, dan penyajian sejumlah temuan. Tantangannya adalah bagaimana mengartikan (*interpretative understanding*) dan memaknai (*verstehen*) sejumlah data, yang kemudian peneliti mengidentifikasi pola-pola yang bermakna dan mengkonstruksi kerangka esensi data yang muncul.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analytic comparison*. Menurut Neuman (2004: 427), *analytic comparison* dapat digunakan dalam analisis kualitatif. *Analytic comparison* di dalam penggunaannya mencakup *method of agreement* dan *method of difference*. Lebih lanjut Neuman (2004: 427) menjelaskan:

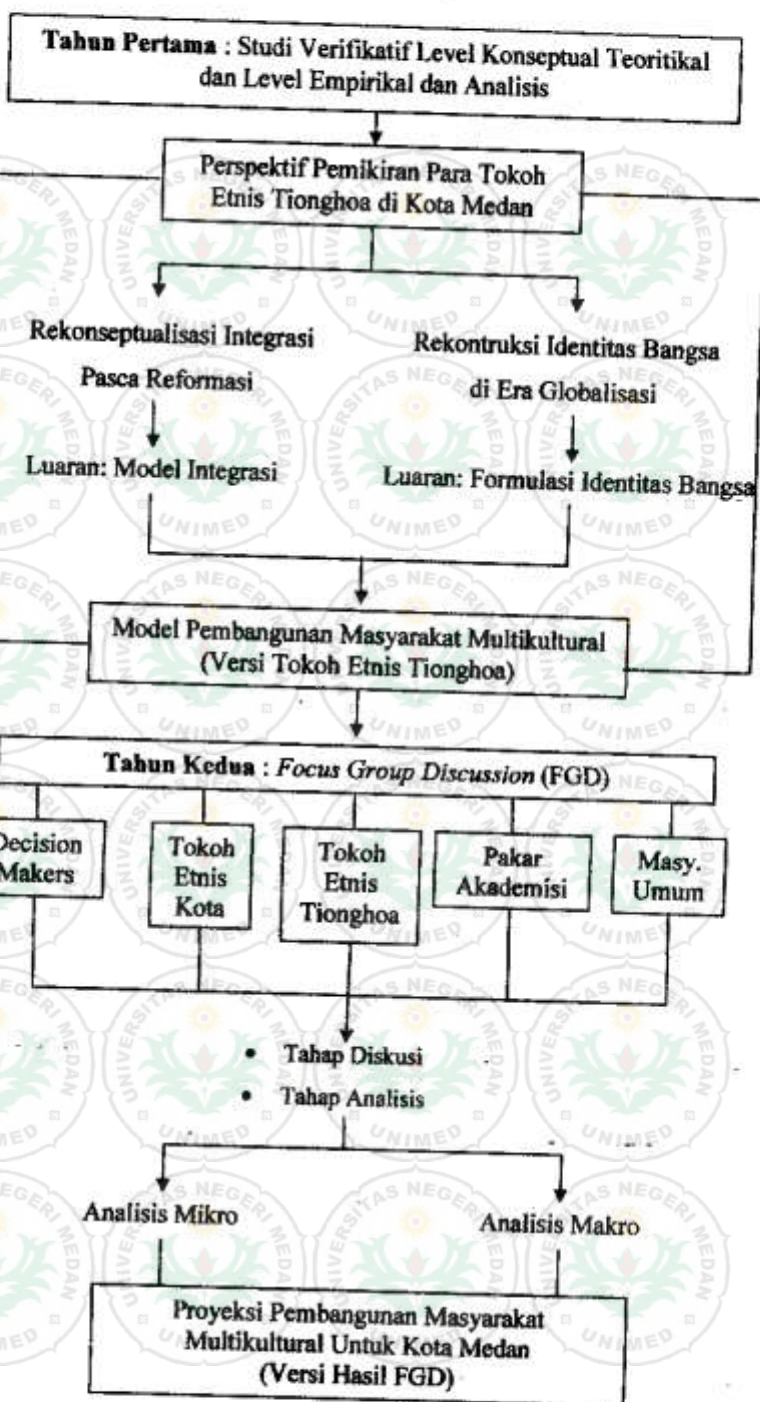
The method of agreement focuses a researcher's attention on what is common across cases. The researcher establishes that cases have a common outcome, then tries to locate a common cause, although other features of the cases may differ". Sedangkan di dalam *method of difference* dinyatakan: *Researchers can use the method of difference alone or in conjunction with the method of agreement. The method of agreements is usually stronger and is a double application. A researcher first locates cases that are similar in many respects but differ in a few crucial ways.*

Dengan demikian di dalam penggunaan *analytic comparison*, *method of difference* dapat digunakan sendiri tanpa *method of agreement*. Berbeda dengan *method of agreement* yang dalam penggunaannya mesti bersamaan dengan *method of difference*. Guna keperluan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua cakupan tersebut dalam menganalisis. Ini berarti dalam menganalisis dengan *method of agreement* dan *method of difference*, peneliti menganalisis pernyataan-pernyataan yang sama dan yang berbeda dari para informan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, peneliti memilah-milah pernyataan-pernyataan yang sama dan yang berbeda pada masing-masing pertanyaan, kemudian dibandingkan antara satu informan dengan informan lainnya. Setelah itu peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori yang ada.

Berdasarkan paparan di atas, maka alir penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut:



Alir Penelitian



Penjelasan Diagram

Ide multikulturalisme dapat digunakan sebagai *check and balance* terhadap model pembangunan dan modernisasi yang dijalankan pemerintah. Di era reformasi yang mengusung tema demokrasi, ide multikulturalisme sudah saatnya diaplikasikan pada setiap dimensi kehidupan, mengingat warga negara selama 32 tahun pada masa orde baru telah mengalami proyek asimilasi dan seragamisasi yang ternyata gagal dan justru menimbulkan berbagai konflik antar-etnis di berbagai wilayah, serta diskriminasi politik terhadap beberapa etnisitas yang dianggap membangkang terhadap pembangunan. Sekaitan dengan konsep pembangunan di era reformasi yang tidak lagi bersifat *top-down*, ide multikulturalisme perlu terus dikaji utamanya dalam membangun paradigma pembangunan yang memberi ruang lebih luas bagi warga negara untuk turut berpartisipasi. Dalam konteks penelitian ini, salah satu warga negara yang dimaksud adalah para tokoh etnis Tionghoa di Kota Medan.

Pada tahun pertama, studi verifikatif pada level konseptual teoritik dan studi empirikal telah menghasilkan sejumlah data mengenai perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa di Kota Medan berkenaan dengan rekonseptualisasi integrasi pasca-reformasi. Beberapa model yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa, yakni model: asimilasi alamiah; strategi integrasi; integrasi-asimilasi; integrasi budaya; persatuan Indonesia; dan multikulturalisme, secara sinergi menghasilkan "*integrated pluralism*" sebagai alternatif kebijakan yang dipandang lebih cocok untuk kondisi kota Medan pasca-reformasi 1998. Gagasan *integrated pluralism* ini mengusung *recognition and difference* dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila.

Perspektif pemikiran para tokoh Tionghoa juga digali berkenaan dengan rekonstruksi identitas bangsa di era globalisasi untuk menemukan luaran, yakni formulasi identitas bangsa. Beberapa model identitas yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa, yakni model: identitas dinamis; identitas nasional; identitas budaya; identitas sosial; identitas kelas; dan identitas multikultural, secara sinergi menghasilkan "identitas hibrid: keidentitasan Indonesia yang terus menjadi". Identitas hibrid: keidentitasan Indonesia yang terus menjadi, sebagai gagasan para tokoh dalam merekonstruksi identitas bangsa, dipandang lebih pas dalam

membangun keidentitasan di era globalisasi, namun tetap pada ruang ke-Indonesia-an.

Hubungan fungsional antara model integrasi dan formulasi identitas bangsa, menjadi data empirik dalam menganalisis model pembangunan masyarakat multikultural yang di pandang pas untuk kota Medan sebagai masukan bagi pemerintah kota. Sinergi gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa mengenai model pembangunan masyarakat multikultural, mengarah pada tawaran model "Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika" sebagai model alternatif yang dipandang pas untuk Kota Medan pasca-reformasi.



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Singkat Keberadaan Etnis Tionghoa di Kota Medan

Secara demografi, penduduk kota Medan adalah heterogen dari sudut etnis. Ada 6 etnis (Jawa, Batak, Tionghoa, Mandailing, Minang dan Melayu) yang jumlahnya masing-masing lebih dari 5 % dari total penduduk kota Medan. Kemudian berturut-turut etnis Karo, Aceh, Nias, Simalungun dan Pakpak yang jumlahnya masing-masing kurang dari 5 % (BPS Kota Medan: 2002). Tetapi yang pasti setidaknya ada 11 etnik yang menjadi unsur penduduk kota Medan.

Penduduk pertama di kampung Medan adalah etnis Melayu dan etnis Karo yang juga merupakan penduduk yang mendiami wilayah Sumatera Timur pada umumnya. Tentang keberadaan etnis Melayu yang mendiami dataran rendah Sumatera Timur termasuk kota Medan disebutkan oleh Koentjaraningrat (1984: 282), bahwa orang Melayu pesisir yakni orang Melayu dalam pengertian yang lebih sempit, mereka ternyata tidak hanya terkonsentrasi pada suatu daerah tertentu melainkan tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera dengan konsentrasi utama pada daerah-daerah di Sumatera Timur, Riau dan Palembang. Jadi sebelum kampung Medan didirikan pada tahun 1590, penduduk etnis Melayu telah mendiami daerah-daerah di sekitar pinggiran sungai Deli sampai ke tepi pantai. Selanjutnya keberadaan etnik lainnya (selain etnik Melayu dan etnik Karo) di kota Medan, berhubungan erat dengan pembukaan perkebunan-perkebunan (tembakau, keret, teh, kelapa sawit) di Sumatera Timur. Kebun percobaan dan pembukaan perkebunan dilakukan oleh orang-orang Eropa sejak pertengahan paruh kedua abad ke-19 sampai awal abad ke-20 yang menjadikan tanah Deli pada saat itu mendapat julukan sebagai *negeri dollar*. Pada masa awal pembukaan perkebunan, tenagakerja kurang tersedia sebab penduduk di daerah Sumatera Timur pada saat itu relatif masih sedikit jumlahnya. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan oleh pengusaha perkebunan mendatangkan para pekerja etnis Tionghoa dari Penang, Melaka, Singapura dan dari daratan Cina.

Sekitar tahun 1880 ribuan orang Jawa dikontrak sebagai buruh kasar atau kuli di Sumatera Utara. Setelah habis kontrak, mereka tidak kembali ke daerah asal melainkan menetap di Sumatera termasuk pekerja etnis Tionghoa yang lebih memilih pekerjaan di sektor perdagangan, industri dan jasa.

Migrasi etnik Batak dan etnik Mandailing dari daerah dataran tinggi Bukit Barisan di Tapanuli ke Sumatera Timur terjadi sekitar awal abad ke-20 berlanjut sampai masa sesudah kemerdekaan. Pelly (1983) menyebutkan migrasi orang Batak ke Sumatera Timur mulai terjadi pada tahun 1906 sejak pemerintah Hindia Belanda membuka persawahan dengan sistem irigasi di daerah-daerah Simalungun, Sidamanik dan Tanah Jawa. Kemudian semakin terbuka lagi peluang migrasi setelah pemerintah membangun jalan raya yang menghubungkan Sumatera Timur dengan Tapanuli (1917 - 1920) untuk membuka keterisolasian daerah Tapanuli. Selanjutnya peneliti tentang etnis Batak yaitu C. Cunningham dalam Koentjaraningrat (1984: 247) menyebutkan jumlah penduduk orang Batak ke daerah pantai timur Sumatera Utara dalam periode tahun 1942 - 1950 sekitar 500.000 orang dan antara tahun 1950 - 1956 sekitar 250.000 orang. Jadi keberadaan etnik Batak dan Mandailing di Sumatera Timur menjadi penduduk yang menetap sebagai pekerja perkebunan, petani sawah, pegawai pemerintahan, dan sebagai pekerja di sektor informal lainnya.

Etnis Minang melakukan migrasi ke daerah Sumatera Timur dimulai sejak awal abad ke-20, berhubung adanya daya tarik kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor perkebunan, perdagangan dan jasa. Disamping itu, fenomena sosial etnis Minang adalah adanya keinginan yang sangat besar untuk merantau keluar dari kampung halaman mencari rejeki di negeri orang. Seperti yang dituturkan Koentjaraningrat (1984 : 284) bahwa etnis Minang adalah salah satu etnis dengan kaki yang tidak pernah tinggal diam dengan semangat dan perasaan ingin tahu yang tinggi dan sentrifugal dalam banyak hal. Pada tahun 1930 jumlah etnis Minang yang ada di Sumatera Timur adalah sejumlah 50.677 orang. Mereka bekerja pada umumnya dalam lapangan perdagangan, pelayanan, pengusaha, dan pegawai kantor .

Etnis lainnya yang jumlahnya relatif lebih kecil, migrasi atau berpindah ke wilayah Sumatera Timur maupun ke kota Medan diperkirakan setelah masa

kemerdekaan dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal atau karna melanjutkan pendidikan dan atau selanjutnya menetap di kota. Keberadaan berbagai etnis di Sumatera Timur sebagai akibat dari transmigrasi tenagakerja maupun migrasi spontan pada abad ke-19 dan sampai pada pertengahan abad ke-20, berbanding sejajar dengan keberadaan ragam etnis di kota Medan khususnya dan daerah-daerah kabupaten/kota di wilayah timur Sumatera Utara.

Kota Medan dengan kepadatan penduduk rata-rata 7.183 orang setiap km² merupakan angka tertinggi rata-rata dibandingkan kepadatan penduduk rata-rata pada daerah-daerah kabupaten/kota lainnya di provinsi Sumatera Utara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keberadaan kota Medan sebagai pusat pemerintahan provinsi; sebagai pusat daerah industri dan jasa; sebagai pusat perdagangan dan bisnis; sebagai pusat sarana/prasarana pendidikan, jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya.

Sebagai pusat pemerintahan dan pusat pemerintahan provinsi Sumatera Utara, kota Medan dijadikan sebagai tempat bermukim para pejabat dan para pegawai pemerintah daerah kota maupun provinsi. Kota Medan sebagai pusat industri dan jasa untuk daerah provinsi Sumatera Utara menjadikan kota Medan tempat bermukim bagi para pengusaha, penyedia jasa termasuk tempat bermukim dan daerah tujuan bagi para tenaga kerja maupun para pencari kerja. Oleh Pemerintah kota Medan, kawasan utara kota Medan ditetapkan sebagai daerah industri yang terkenal dengan sebutan Kawasan Industri Medan (KIM). Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan bisnis menjadikan kota Medan ramai oleh para pelaku bisnis dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Kota Medan sebagai pusat sarana dan prasarana pendidikan untuk provinsi Sumatera Utara dalam hal ini khususnya pendidikan tinggi menjadikan kota Medan menjadi tempat tujuan untuk memperoleh pendidikan. Keberadaan kota Medan seperti di atas, menjadi faktor penarik terjadinya urbanisasi penduduk.

Pada tabel berikut ditunjukkan data penduduk kota Medan berdasarkan agama yang dianut:

Tabel 1
Agama yang Dianut Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	lainnya	Jumlah
1	Medan Tuntungan	31.132	30.083	6.338	177	109	50	67.889
2	Medan Johor	68.392	19.272	4.069	369	9.298	72	101.472
3	Medan Ampias	64.743	18.103	2.057	92	530	46	85.571
4	Medan Denai	91.584	27.175	2.619	95	5.864	67	127.404
5	Medan Area	76.300	5.701	1.090	463	29.070	43	112.667
6	Medan Kota	38.700	20.762	2.015	326	24.469	85	86.357
7	Medan Maimun	34.257	2.751	1.108	1.065	9.396	8	48.585
8	Medan Pololilia	28.4%	5.763	1.553	1.195	6.850	168	44.025
9	Medan Baru	20.125	15.608	2.271	936	2.220	73	41.233
10	Medan Selayang	45.568	13.084	4.788	967	779	91	75.277
11	Medan Sunggal	73.854	16.581	2.963	1.508	11.243	104	106.253
12	Medan Helvetia	82.955	34.700	4.637	384	2.861	59	125.596
13	Medan Petisah	30.971	15.075	2.288	1.723	15.967	121	66.145
14	Medan Barat	51.247	10.070	1.798	1.005	18.412	94	82.626
15	Medan Timur -	70.936	15.058	2.390	888	20.129	49	109.450
16	Medan Perjuangan	57.694	21.884	2.137	604	11.317	69	93.305
17	Medan Tembung	94.861	18.871	3.863	322	10.960	19	128.896
18	Medan Deli	107.813	11.921	1.574	235	6.878	38	128.459
19	Medan Labuhan	71.436	13.579	3.038	124	5.349	17	93.543
20	Medan Marelan	80.022	3.257	433	196	3.123	39	87.070
21	Medan Belawan	70.665	16.412	1.973	214	3.162	24	92.450
Jumlah		1.291.751	345.310	55.002	12.888	197.986	1.336	1.904.27
Persentase,		67,83	18,13	2,88	0,70	10,39	0,07	100

Sumber: BPS Kota Medan Tahun 2002

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk kota Medan mayoritas beragama Islam yaitu sejumlah 1.291.751 orang (67,83 %). Kemudian menyusul pemeluk agama Protestan sebesar 18,13 %, pemeluk agama Budha sebesar 10,39 %, pemeluk agama Katolik sebesar 2,88 % dan pemeluk agama Hindu sebesar 0,70 % serta lainnya 0,07 % (termasuk dalam hal ini adalah penganut aliran kepercayaan). Menurut wilayah kecamatan, terlihat bahwa penyebaran penduduk tidak berdasarkan agamnya yang dianut. Dalam arti tidak terdapat pemukiman penduduk yang menganut suatu agama, terkonsentrasi pada suatu atau beberapa wilayah kecamatan. Hal ini mengimplikasikan bahwa masyarakat kota Medan yang heterogen dari segi agama dapat hidup berdampingan. Walaupun masyarakat kota Medan heterogen agama, tetapi sudah ada kesadaran masyarakat untuk saling menghargai, saling toleransi dan sikap lain yang mendukung yaitu sikap tidak mau mencampuri urusan agama orang lain.

Penduduk yang mendiami wilayah nusantara terdiri dari beragam etnis, tidak terkecuali di provinsi Sumatera Utara dan khususnya penduduk kota Medan juga terdiri dari berbagai etnis. Kondisi keberagaman etnis di kota Medan tidak terlepas, dari keberagaman etnis di daerah Sumatera Timur yang terjadi sejak masa pemerintahan Hindia. Belanda. Faktor utamanya adalah pembukaan perkebunan-perkebunan di pesisir timur dari Sumatera Utara yang sekarang. Tabel berikut menyajikan data penduduk kota Medan di lihat dari etniknya:

Tabel 2
Etnik penduduk kota Medan menurut kecamatan

No	Kecamatan	Jawa	Batak	Timorosa	Minangk	Melayu	Karo	Achik	Nias	Streekong	Pengak	Isaya	Jumlah
1	Medan Timuruga	13.269	17.903	135	3.220	2.500	2.391	21.942	1.207	756	1.134	535	67.889
2	Medan Jobor	33.900	14.549	9.715	11.289	6.544	5.144	11.315	1.774	947	938	2.169	101.472
3	Medan Ampelas	31.714	22.936	723	12.877	5.596	4.368	2.512	1.241	690	853	184	85.571
4	Medan Derak	30.584	32.904	5.968	15.609	27.735	6.227	658	2.542	680	1.102	585	127.404
5	Medan Aras	18.919	8.330	30.246	6.831	35.016	6.444	607	3.240	265	248	215	112.667
6	Medan Kota	12.228	22.527	25.233	6.327	9.679	3.405	623	1.916	731	587	207	86.357
7	Medan Marimun	10.560	3.217	8.886	7.092	9.001	3.166	481	1.262	567	192	48	48.585
8	Medan Polonia	20.783	6.831	6.012	1.285	1.634	1.094	1.163	825	145	54	39	44.025
9	Medan Baru	8.445	10.322	1.160	2.388	2.612	1.453	7.985	1.438	356	594	202	41.233
10	Medan Sebayang	27.926	17.595	984	3.528	2.498	3.839	12.511	1.406	574	1.236	421	75.277
11	Medan Sunggal	40.190	17.803	12.030	6.528	4.883	6.971	4.390	6.737	885	595	131	106.253
12	Medan Helvetia	46.880	38.038	2.674	8.890	6.608	6.211	5.237	5.118	976	1.012	308	125.596
13	Medan Petisah	15.529	15.334	17.316	3.968	2.752	1.762	1.175	3.266	481	437	76	66.145
14	Medan Barat	22.130	11.626	18.915	13.227	5.745	3.768	799	1.378	364	311	78	82.626
15	Medan Timur	41.607	17.179	20.194	7.205	8.197	3.807	1.251	2.720	880	757	124	109.450
16	Medan Perjuangan	23.056	22.908	12.525	13.992	9.111	3.060	1.063	3.127	824	1.289	135	93.305
17	Medan Tembung	41.825	25.798	10.986	30.368	6.737	3.784	1.357	2.713	689	824	307	128.896
18	Medan Deli	78.434	15.044	6.653	5.941	3.623	1.692	781	1.952	976	257	413	128.459
19	Medan Labuhan	33.951	19.089	5.123	5.573	3.714	18.786	832	2.484	746	249	132	93.513
20	Medan Marelan	48.120	5.646	3.258	4.832	2.944	16.851	111	1.440	174	227	175	87.070
21	Medan Belawan	28.848	20.181	3.493	7.338	6.695	13.404	1.376	5.225	573	178	25	92.450
Jumlah		628.894	365.758	202.839	178.308	163.774	125.557	78.129	53.071	13.159	13.078	6.509	1.904.273
Persentase		33,03	19,21	10,65	9,36	8,60	6,59	4,10	2,78	0,70	0,69	0,34	100

Sumber : Kota Medan dalam angka tahun 2002.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa etnis yang paling besar jumlahnya yang mendiami kota Medan adalah etnis Jawa sebesar 33,03 % kemudian berturut-turut adalah etnis Batak sebesar 19,21 %; etnis Tionghoa sebesar 10,65 %; etnis Mandailing sebesar 9,36 %; etnis Minang sebesar 8,60 %; etnis Melayu sebesar 6,59 %; etnis Karo sebesar 4,10 %; etnis Aceh sebesar 2,78 %; etnis Nias sebesar 0,70 %; etnis Simalungun sebesar 0,69 %; etnis Pakpak sebesar 0,34 %; etnis lainnya sebesar 3,95 % (termasuk lainnya adalah etnis Ambon, Manado, etni Sunda, warga keturunan Arab, India, Pakistan dan Eropa).

Data ini menunjukkan bahwa tidak terdapat etnis dan budaya yang dominan pada masyarakat kota Medan sebagaimana yang dikemukakan Koentjaraningrat (1984 : 348), kebudayaan kota Medan tidak didominasi oleh salah satu dari kebudayaan suku bangsa tersebut di atas, artinya di Medan tidak ada suatu kebudayaan dominan. Hal yang senada dengan Pelly (1983) yang menyebutkan tidak ada yang berperan sebagai *dominant culture* di kota Medan. Penyebaran penduduk menurut etnis, hampir merata di tiap wilayah kecamatan. Dalam arti relatif tidak terjadi konsentrasi pemukiman suatu etnis pada satu atau beberapa wilayah kecamatan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat kota Medan yang berbeda etnik dapat hidup berdampingan antara satu dengan lainnya. Pada sektor lapangan pekerjaan yang digeluti masyarakat kota Medan dapat dikemukakan bahwa, pada lapangan kerja formal sebagai pegawai negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Milik Daerah dan pegawai/karyawan swasta, semua unsur kelompok etnis relatif terakomodir. Dalam jenis lapangan kerja formal tidak terdapat unsur diskriminatif atau monopoli salah satu kelompok etnis. Akan tetapi, terdapat kecenderungan bahwa warga etnis Tionghoa memang relatif kurang pada pekerjaan sebagai pegawai negeri. Untuk lapangan pekerjaan informal dapat dikemukakan, etnis Tionghoa lebih mendominasi usaha/bisnis pada perdagangan besar dan menengah, industri besar dan menengah serta bisnis properti. Usaha pertokoan, grosir, pusat perbelanjaan pada umumnya adalah milik kelompok etnis Tionghoa. Sedangkan etnis lainnya seperti etnis Batak, Mandailing, dan Karo lebih pada usaha/bisnis transportasi, dan sebagai pedagang dalam skala kecil, pertukangan, dan pertanian. Etnis Minang lebih pada bisnis industri rumah tangga misalnya, pembuatan sepatu dan tas, sebagai pedagang

dalam skala kecil utamanya usaha restoran/rumah makan. Etnis Jawa lebih pada usaha/bisnis industri rumah tangga, karyawan, jasa, pertukangan dan kebun. Sedangkan etnis Melayu lebih pada usaha/bisnis industri rumah tangga, karyawan, petani dan sebagai nelayan.

Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam penguasaan kegiatan usaha/perkerjaan pada masyarakat merupakan kejadian yang terjadi dengan sendirinya. Pemahaman dan kesadaran akan fungsi masing-masing dalam kegiatan ekonomi, menjadikan masyarakat kota Medan bersinergi dalam peranan dan sumbangannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Di bidang pemerintahan kota, mesin pemerintahan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. Pemerintah Kota Medan dipimpin oleh Walikota yang dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dibantu oleh seorang wakil walikota dan sekretaris daerah. Sebagai badan yang menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum dan urusan swatantra, sekretariat daerah dibagi dalam beberapa bagian yang antara lain bagian umum, tata pemerintahan, hukum, sosial, keuangan, perekonomian dan hubungan antar kota/daerah. Secara struktural masing-masing bagian ini dikoordinir oleh 4 asisten yang terdiri dari asisten bidang administrasi, asisten bidang pemerintahan, asisten bidang ekonomi pembangunan dan asisten bidang kesejahteraan sosial. Empat bidang ini secara fungsional menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan sehari-hari.

Manajemen pemerintahan kota Medan juga dilengkapi dengan Badan Pengawas Daerah (BPD), Badan Perencana. Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) dan Badan Pengelolaan Perpajakan (BPP) yang secara struktural langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota

Efektifitas pemerintahan yang diselenggarakan tentunya dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya manusianya. Data tahun 2001, jumlah Pegawai negeri pada pemerintah kota Medan berjumlah 20.155

orang dengan rincian: pegawai golongan I berjumlah 224 orang; pegawai golongan II 4.846 orang; pegawai golongan III 14.072 orang; pegawai golongan IV 1.013 orang. Keseluruhan pegawai ini bertugas dan tersebar di 3 sekretariat, 7 badan, 21 dinas, 3 Badan Usaha Milik Daerah, 8 kantor, 21 kecamatan dan 151 kelurahan.

Tugas-tugas legislatif diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Medan yang dipimpin oleh 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua. Dalam menjalankan tugasnya, sebagai mitra pemerintah kota, dewan sehari-hari didukung oleh 5 komisi yang terdiri dari komisi A membidangi masalah pemerintahan; komisi B membidangi masalah perekonomian; komisi C membidangi masalah keuangan; komisi D membidangi masalah pembangunan komisi E membidangi masalah kesejahteraan rakyat.

Di bidang politik, stabilitas politik di kota Medan secara umum berjalan kondusif. Bahkan pada pemilu legislatif 2009 menggambarkan adanya semangat multikultural dalam kehidupan politik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya partisipasi politik dari etnis Tionghoa untuk mendaftarkan diri sebagai caleg. Diperkirakan ada sekitar 60 caleg dari warga Tionghoa baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Utara yang ikut dalam pemilu legislatif. Dari jumlah tersebut, tercatat 6 orang di antaranya bertarung memperebutkan kursi DPRD Sumut dan sekitar 40 orang bertarung memperebutkan kursi DPRD Kota Medan. Alhasil untuk DPRD Tingkat I terpilih dua caleg dari etnis Tionghoa yaitu Brilian Moktar dari PDI Perjuangan dan Soni Firdaus dari PPIB. Sedangkan untuk DPRD Tingkat II Medan ada 4 orang yang terpilih yaitu A Hie dari Partai Demokrat, Hasyim dari Partai PDI Perjuangan, Lily Tan dan Jan Lie dari PPIB (Tan dalam Analisa, 8 Juni 2009).

2. Profil Informan

2.1. Sofyan Tan



Gambar 1. Sofyan Tan

Dokter Sofyan Tan adalah tokoh nasionalis keturunan Tionghoa yang dihormati dan disegani di kota Medan. Lahir di Sunggal Medan pada tanggal 25 September 1959 dengan beragama Buddha. "Namaku sebenarnya hanya Sofyan. Untuk membedakan dengan sofyan-sofyan yang lain, rekan rekanku menyarankan untuk memasang nama margaku: Tan, maka jadilah namaku "Sofyan Tan" Begitulah awal wawancara peneliti dengan seorang Sofyan di kantornya Yayasan Ekosistem Lestari Jl. KH. Wahid Hasyim No. 51/74 Medan..

Mungkin ia tidak menyadari bahwa nama sofyan itupun bukan nama sebenarnya Indonesia, tetapi diadopsi dari nama berbahasa Arab, khas muslim. Padahal ia bukan seorang muslim. Di lain pihak, sesungguhnya ia juga tak menganggap penting pencantuman marga 'Tan' yang pada hakikatnya merupakan indikasi identitas ke-tionghoa-annya. Pergaulannya yang sangat luas di tengah masyarakat, membawanya ke berbagai daerah di Indonesia dan mempunyai *contact person* dengan pelbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Non-Government Organization* (NGO) serta tokoh-tokoh formal maupun informal di tingkat nasional, seperti mantan Presiden Abdurrahman wahid, Prof. Dr. Ir. Baharuddin Yusuf Habibie, wakil presiden Hamzah Has dan lain-lain, di samping tokoh-tokoh masyarakat di daerah, utamanya Sumatera Utara maupun di kota Medan, bahkan internasional. Pandangan dan gagasannya dinilai cukup berani, cerdas, kritis, tetapi juga realitis. Terkesan sebagai penyokong kuat bagi pembinaan usaha kecil atau usaha kecil menengah (UKM) yang sebagian besar merupakan orang-orang yang dikenali sebagai pribumi (etnis non Tionghoa). Ia

juga sering diminta untuk memberikan pembicara pada berbagai kegiatan seminar baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Tak mengherankan jika ia terkesan tidak terlalu disukai oleh sebagian masyarakat keturunan Tionghoa di kota Medan, justru karena dianggap terlalu 'nasionalis' Indonesia. Dokter medikal yang hampir tak pernah berkesempatan untuk berpraktik ini juga menyelenggarakan sekolah yang bernama Sekolah Iskandar Muda (SIM) yang dikenal sebagai sekolah pembauran. Atas usaha kerasnya, kini sekolah tersebut telah dijadikan contoh sebagai sekolah model pendidikan multikultural. Sarana kebaktian keagamaan di sekolahnya sengaja dibangun terdiri dari sebuah mesjid, gereja dan kuil/kelenteng. Hampir tidak ada keturunan Tionghoa di kepengurusan staf sekolahnya.

Beberapa keorganisasian diikutinya dengan beberapa jabatan yang melekat padanya, seperti antara lain: Dewan Penasehat DPD KNPI Tk.I Sumut tahun 1988-1995, Dewan Penasehat DPD Golkar Tk.II Medan 1993-1996. Wakil Ketua PDK KOSGORO Tk.I Sumut 1996-2000. Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sumut dari tahun 2001- 2007. Anggota Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dari tahun 2002-sekarang. Penasehat Forum Daerah UKM Prop.Sumut tahun 2004-2007. Calon Anggota DPD mewakili Prop. Sumut pada Pemilu 2004. Dewan Pendidikan Prop. Sumut 2006-2011. Ketua Dewan Penasehat PENGDA PERBASI Sumut 2007-2011. Ketua Dewan Kehormatan Majelis Agama Kong Hu Cu Indonesia (MAKIN) Sumut 2007-2011. Bendahara PDI-Perjuangan Sumut 2005-2010, sekaligus sebagai Tim Sukses Megawati-Prabowo pada PEMILU 2009 lalu.

Atas kerja dan pengabdianya, beberapa penghargaan ia terima, seperti: *Fellow Ashoka Bidang Ethnic Relations and Educations* dari pemerintah Washington DC USA tahun 1989. Pemuda Pelopor Pembangunan di Bidang Kesetiakawanan Sosial dari MENPORA RI tahun 1990. Tokoh Terpopuler dari Harian WASPADA tahun 1994. Anugrah Wiyata Mandala Prop. Sumut sebagai Tokoh Pendidikan dari Gubernur Sumatera Utara tahun 2002. Penghargaan dari Kerapatan Adat Kesultanan Langkat tahun 2008. Penghargaan atas prakarsa dalam mendirikan Warung Pintar oleh Gubernur Sumatera Utara tahun 2008.

2.2. Brilian Moktar



Gambar 2. Brilian Moktar

Brilian Moktar lahir pada tanggal 30 Maret 1966 di Jambi dengan menganut agama Budha, dari pasangan Toha Mok (alm.) dan Kho A Heng yang sama-sama beragama Budha dengan memiliki 7 saudara kandung. Ayah Brilian, Toha Mok adalah generasi ke tiga yang lahir di Indonesia, tepatnya di kota Jambi pada tahun 1930 yang berasal dari suku Tionghoa dengan marga Mok. Sedangkan ibunya Kho A Heng lahir di Palembang pada tahun 1935 berasal dari suku Tionghoa dengan marga Kho. Lahir dari keluarga yang bersahaja, Brilian mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di Taman Sulanjana Jambi pada tahun 1974 dan lulus pada tahun 1980. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jambi pada tahun 1980 dan lulus pada tahun 1983. Kemudian melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jambi. Pada Tahun 1986, Brilian Moktar melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Swasta yaitu Universitas HKBP Nomensen di Fakultas Ekonomi. Setelah tamat Brilian Moktar melanjutkan pendidikannya ke S2 di Universitas Sumatera Utara dengan program magister manajemen dari tahun 2005 sampai sekarang.

Pada tahun 1992, Brilian meminang seorang gadis yang bernama Janice, SE. kelahiran kota Medan dari suku Tionghoa dengan marga Yang yang juga beragama Budha. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri.

Pengalaman kerja Brilian Moktar yaitu pada tahun 1986-1987 sebagai karyawan pada PT. Multi Data Medan. Pada tahun 1987-1991, ia bekerja sebagai supervisor pada PT. Capella Dinamik Nusantara Medan. Tahun 1991-1997, ia

sudah menjadi general manager pada PT. Alfa Scorpii Medan. Karir di swastanya terus meningkat, pada tahun 1997-sekarang menjadi seorang presiden direktur PT. Roda Roda Dinamik Perkasa Medan. Tertarik dengan bisnis media massa, ia pun kemudian mendirikan Koran Nasional Pos. Hobi membaca berita ini pun pada akhirnya mengantarkan karirnya pada dunia politik Pada tahun 2009 terpilih sebagai anggota dewan (DPRP Kota Medan) dari PDI-Perjuangan dan beberapa bulan kemudian ia terpilih sebagai Ketua Komisi E DPRD tingkat I Sumatera Utara untuk masa bhakti 2009-2014.

Brilian Moktar cukup memadai dalam pengalamannya di organisasi dan menjadi salah satu tokoh di kota Medan. Terbukti dengan kedudukannya sebagai Ketua Umum Sahabat Center Sumatera Utara, Ketua Bidang Pengangkutan, Komunikasi dan Pergudangan DPD Apindo Sumatera Utara, Ketua Umum Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI), Bendahara Umum Alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen (IAFEN), Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Wakil Ketua Bidang Luar Negeri KONI Sumut, Ketua Harian Gerakan Nasional Kepedulian Sosial (GNKS), Ketua Bidang Organisasi dan Humas Persatuan Donor Darah Indonesia (PDDI), Penasehat Karang Taruna Medan, Penaschat Anak Medan Bersatu (AMB), Ketua Abdi Mas Pramuka Kwarcab kota Medan, Ketua Umum Perbasi Deli Serdang, Sekjen Persatuan Bodhicitta Mandala Indonesia (PBMI), Ketua I Konservasi Bodhicitta Mandala (KBM) Indonesia, dan Penasehat Kong Hu Chu Sumatera Utara.

Atas dasar kiprahnya tersebut, Brilian mendapatkan beberapa penghargaan dari beberapa pihak. Tahun 2006, ia mendapatkan penghargaan Aditya Karya Mahatva Yodha dari Gubernur Sumatera Utara sebagai Tokoh Peduli Pemuda. Tahun 2006 sebagai Tokoh Muda Agama Budha dari Sekolah Tinggi Agama Budha Medan. Tahun 2006 sebagai Pembina Teraktif PERBASI. Tahun 2007 dari Koran Gebrak ditetapkan sebagai tokoh Sahabat Pers. Tahun 2008 mendapatkan penghargaan tiga kali berturut-turut sebagai Pengusaha Peduli Pendidikan dari IT and B Medan, serta *Man of The Year 2008* dan Tokoh Olahraga Sumatera Utara dari Gubernur Sumut.

2.3. Indra Wahidin



Gambar 3. Indra Wahidin

Tokoh senior dari etnis Tionghoa ini, namanya cukup dikenal di kota Medan. Lahir di Medan pada tanggal 10 Mei 1951 sebagai generasi kedua yang lahir di Indonesia. Berasal dari suku Hokkian dengan marga Huang dan beragama Budha. Dari perkawinannya dengan Yenti yang lahir di kota Medan yang berasal dari suku Teochew dengan marga Jo dan sama-sama beragama Budha, ia dikaruniai tiga orang anak.

Bagi Indra Wahidin, pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terlebih di era globalisasi ini. Untuk itu ia berusaha agar ketiga anaknya menjadi sarjana. Anaknya yang pertama, Alfian Wijaya telah lulus dari S2 (magister) pada Universitas Parahyangan Bandung. Anaknya yang kedua telah lulus dari S1 Universitas Monash Melbourne, dan kini masih melanjutkan studinya di universitas tersebut. Sementara anaknya yang ketiga, Alwi Wijaya adalah jebolan dari Fakultas kedokteran Universitas Tri Sakti Jakarta.

Siapa yang menyangka seorang Indra Wahidin yang kini bekerja sebagai Kepala Cabang P.T Asuransi Centra Asia Medan, adalah seorang dokter jebolan dari fakultas kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara dan alumni LEMHANAS KSA – IX/2001. Kini ia menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumatera Utara, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia) Sumatera Utara, dan Ketua Ikatan Alumni LEMHANAS Republik Indonesia di Sumatera Utara. Jabatan lain yang kini masih disandangnya antara lain: Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Sumut Ketua Asosiasi Provinsi Kembar Bersaudara Indonesia Sumut, Ketua Perhimpunan Marga Huan Seluruh Indonesia, dan Sekretaris Jenderal PMI Sumatera Utara.

2.4. Lily Tan



Gambar 4. Lily Tan

Dra. Lily, MBA, MH, merupakan anggota Komisi A Kota Medan dengan beberapa gelar yang tersemat di depan maupun di belakang namanya. Dra berasal Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, jurusan Pendidikan Dunia Usaha IKIP Medan, MBA dari Netherland dan MH dari Univaersitas Jayabaya Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan studi S3 di Universitas Sumatera Utara jurusan Manajemen.

Sony Firdaus adalah sosok yang sangat dekat dengan Lily Tan. Selain sebagai seorang suami, Soni ternyata salah satu dedengkot dari partai PIB (Partai Indonesia Baru), yang juga sangat berperan bagi pengkaderan Lily Tan dalam kancah politik dari PIB (Partai Indonesia Baru). Tidak main-main, ia menjadi salah satu dari enambelas perempuan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dari PPIB di daerah Pemilihan I dengan perolehan suara 2.876 dari 6.729. Kini, ia pun menjabat sebagai sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD Sumatera Utara.

Kiprahnya di Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD Sumut bisa dibilang aktif, dalam menjalin jejaring sesama anggota kaukus perempuan mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Keberadaan Kaukus ini bertujuan sebagai wadah menyuarakan aspirasi perempuan di Medan, menampung segala masalah yang dihadapi kaum perempuan terutama persoalan pendidikan dan kesehatan. Namun jauh sebelum ia terjun ke dunia politik dan KPP, ternyata sang tokoh ini telah lama mengelola suatu perguruan tinggi yang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia).

2.5. Vincent Wijaya



Gambar 5. Vincent Wijaya

Pengamat dan praktisi ekonomi terkenal dari Medan, Vincent Wijaya bertempat tinggal di sebuah rumah dengan desain sederhana di Jalan S. Parman No. 32 Medan, namun mampu menampilkan kesan elegan walau tak dibalut konsep hunian tertentu. Tampilannya mencerminkan sosok yang tegas, elegan, ramah dan terbuka terhadap semua orang. Praktisi ekonomi yang satu ini punya hobi sepakbola, maka tak heran bila ia pernah jadi pengurus PSMS Medan. Memiliki empat orang anak, dua di antaranya kuliah di Amerika Serikat, Debby dan Kristi. Debby sedang menyelesaikan S2 Akuntansi dan Kristi sudah bekerja di kantor akuntan publik Pricewatercooperhouse. Satu lagi Roy sudah bekerja di Singapura sebagai auditing pajak dan yang paling kecil Rey saat ini bersamanya di Medan.

Lahir sebagai etnis Tionghoa dengan beragama Buddha, ia malah menjadi penyokong partai politik PKS yang banyak didukung masyarakat Islam. Baginya, bukan soal agama dalam kehidupan bernegara, tetapi visi keadilan yang harus diperjuangkan. Namanya sempat melejit, ketika salah satu media menyebut nama Vincent Wijaya sebagai Pimpinan PT Juta Jelita yang bergerak dalam industri makanan, sebagai salah satu konglomerat kota Medan.

Namun bidang ekonomi yang ia geluti, bukan berarti ia tak sosial. Pada 1998 ketika suasana masih tak menentu, masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pokok dan obat-obatan, Vincent Wijaya bersama beberapa dosen USU mendirikan lembaga swadaya masyarakat Bina Solidaritas Masyarakat (BSM). Waktu itu

LSM ini menjual beras murah, gula, minyak goreng dan kebutuhan lain. Di daerah lingkungannya tempat ia tinggal, Vincent Wijaya membuat pos kesehatan dibantu tenaga medis dan dokter yang sukarela mengelola pos kesehatan di Gang Pasir tersebut. Pos kesehatan itu dulunya hanya dibuat temporer dan tidak ada fikiran mempermanenkannya karena tak ada unsur komersial. Tempatnya pun menyewa rumah penduduk setempat. Setelah setahun, pos kesehatan itu kemudian fokus menyediakan pelayanan keluarga berencana penduduk setempat. Apalagi ada lulusan akademi kebidanan yang tamat dan bersedia menjalankannya. Tak terasa sudah 10 tahun berjalan, pos kesehatan yang buka dari pk. 16.00 hingga pk.20.00. tetap memberi pelayanan secara gratis.

2.6. J. Anto



Gambar 6 . J. Anto

Namanya Janto, tapi kemudian orang banyak memanggilnya J. Anto alias Buntomi, lahir di Purwokerto 13 April 1964, dengan beragama Kristen Protestan. Ia adalah alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga (1990). Pernah menjadi wartawan majalah TIARA (1991-1993) dan koresponden majalah D&R untuk wilayah Sumut (1998-1999). Semasa mahasiswa menulis artikel di beberapa surat kabar yang terbit di Semarang (Suara Merdeka, Wawasan, Berita Nasional) dan Jakarta (Suara Pembaruan, Jayakarta dan Bisnis Indonesia), dan saat ini aktif menulis artikel pada surat kabar Medan. Menulis buku *Limbah Pers di Danau Toba, Media Pers Menghadapi Gurita Indorayon* (2001), *Membangun Peradaban Bersama*

Masyarakat Marjinal (2003), *Menolak Menjadi Miskin, Gerakan Rakyat Porsea Melawan Konspirasi Gurita Indorayon* (bersama Benget Silitonga, 2004), *Labirin Politik, Perempuan Sumut Menapak Belantara Politik*, (bersama Dina Lumbantobing, 2004), *Pers Bebas Tapi Dilibas* (2005), dan *Membangun Talisilaturahmi Politisi Dengan Rakyat* (2007). Editor Buku *Jurnalisme (Tidak) Ramah Gender, Luka Aceh Duka Pers* (2002), *Jurnalisme Anti Toleransi* (2003), *Jalan Menuju Masyarakat Anti Diskriminasi* (2004) dan *Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai* (2005) dan *Meretas Jurnalisme Damai di Aceh* (2007). Beberapa tulisannya dimuat pada buku bunga rampai seperti: *Menembus Tirai Asap, Kesaksian Tahanan Politik 1965* (Yayasan Lontar, 2003) dan *Pikiran-pikiran Reformasi yang Terabaikan*, (UKI Press, 2003). Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Geni Salatiga (1990). Kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif KIPPAS (Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera). Aktif memberikan ceramah tentang jurnalisme dan kajian-kajian media massa.

Atas karya-karya di bidang pers dan penulisan buku, serta aktivitasnya pada LSM yang didirikannya, kini ia dikenal sebagai tokoh yang kritis, cerdas, dan berani. Walaupun ia bukan kelahiran Medan, tetapi sejak tahun 1993 ia menjadi warga Medan dan menikah dengan perempuan Batak boru Butar-Butar.

3. Gagasan Para Tokoh Etnis Tionghoa

3.1. Konstruksi Integrasi

Enam tokoh etnis Tionghoa dari kota Medan yang ditampilkan, memiliki perspektif pemikiran yang berbeda berkenaan dengan konstruksi integrasi. Pasca Orde Baru telah memunculkan kembali wacana asimilasi versus integrasi. Versus ini bukan dimaksudkan untuk memilih, namun yang terpenting mengkaji ulang dan melakukan konstruksi yang pas bagi integrasi bangsa ini.

Tabel 3
Gagasan Para Tokoh Etnis Tionghoa Mengenai
Rekonseptualisasi Integrasi

TOKOH	Rekonseptualisasi Integrasi		
	Gagasan	Tuntutan	Harapan
Sofyan Tan	Asimilasi Alamiah	Menghapus diskriminasi	Masyarakat anti diskriminasi
Brilian Moktar	Strategi Integrasi	Menghapus Rasialisme	Nasionalisme Indonesia
Indra Wahidin	Integrasi-Asimilasi	Menghapus Hegemonisme	Demokrasi Indonesia
Lily Tan	Integrasi budaya	Menghapus ketidakadilan	Persamaan hak & kesetaraan
Vincen Wijaya	Persatuan Indonesia	Menghapus kesenjangan	Indonesia Sejahtera
J. Anto	Multikulturalisme	Menghapus kebodohan	Masyarakat multikultural

Sofyan Tan sebagai tokoh pembauran yang telah dikenal pada masa Orde Baru, lebih memilih bentuk asimilasi alamiah. Namun asimilasi yang dimaksud bukanlah asimilasi total (inkorporasi) gaya Orde Baru. Baginya konsep asimilasi dengan wacana *melting pot* ala Amerika Serikat yang diterapkan Orde Baru, dalam praktiknya justru telah menyuburkan prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Menurut ST, bentuk asimilasi alamiah dikonstruksi melalui kebijakan koeksistensi atau pluralisme-budaya yang mendorong diversifikasi etnik dan rasial serta memperlakukan semua kategori penduduk secara setara. Dalam pola demikian, semua kelompok dapat membaur dan keragaman etnik serta rasial dihargai dan dihormati. Tiada satu pun bentuk diskriminasi terhadap suatu kelompok yang ditoleransi. Tatanan dan kebijakan yang demikian memang terasa ideal dan secara praktik sangat sulit. Namun Sofyan Tan telah menunjukkan keberhasilan gagasannya tersebut melalui perguruan Sekolah Iskandar Muda (SIM) sebagai model sekolah pembauran.

Berbeda dengan Sofyan Tan, Brilian Moktar sebagai tokoh politik lebih memilih konsep integrasi. Strategi integrasi dipandang sebagai suatu proses panjang melewati perkembangan waktu yang secara kronologis meliputi masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Masing-masing periode akan menciptakan suatu karakteristiknya sendiri. Berdasarkan perjalanan mulai dari masa pra kolonisasi, kolonisasi, dan kemerdekaan hingga reformasi saat ini, maka strategi integrasi jatuh sebagai pilihannya. Integrasi yang ingin ia wujudkan

adalah melalui strategi integrasi. Integrasi yang wajar, yang nonras, yang mengakui semua suku yang ada di Nusantara sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Hampir sama dengan Brilian Moktar, Indra Wahidin sebagai tokoh jebolan LEMHANAS juga menekankan pada konsep integrasi, namun pada saat yang bersamaan integrasi itu pun disanding dengan asimilasi. Pandangan sang tokoh memang agak berbeda dari yang lain. Ia memilih integrasi dan asimilasi secara bersamaan. Integrasi yang diusulkan bersifat fungsional, dan asimilasi yang dipilih adalah dengan jenis amalgamasi. Konsep integrasi dan asimilasi yang ia pilih diterapkan melalui adanya rekayasa melalui *cross culture fertilization*. Rekayasa dengan metode saling berbagi nilai-nilai budaya ini, dipandang penting dalam menumbuhkan integrasi bangsa. Melalui pembagian nilai silang antar budaya ini, diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai demokratis, seperti: mau menerima perbedaan, saling memahami, menghargai dan menghormati, toleransi, solidaritas, *sense of belonging*, gotong royong dan rasa kekeluargaan, serta mau berbuat untuk berpartisipasi saling membantu.

Tokoh ke-empat, Lily Tan mengangkat integrasi budaya untuk dikonstruksi dalam membangun integrasi bangsa. Seperti argumennya, secara hukum dan politik sudah ada kesepakatan integrasi bangsa dibangun atas dasar persamaan dan kesederajatan. Tapi secara budaya, terutama pada kehidupan masyarakat, belum terjadi kesepakatan secara menyeluruh. Gagasan Lily Tan dalam membangun integrasi budaya, nampaknya sejalan dengan perjuangannya dalam gender. Ketidakadilan gender adalah hasil dari konstruksi sosial-budaya, yang mengakibatkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dan marjinal. Harapan yang ia perjuangkan dalam membangun integrasi budaya, yaitu integrasi atas dasar persamaan hak dan kesederajatan.

Tokoh berikutnya, Vincent Wijaya. Ia menolak istilah integrasionis dan asimilasionis, karena dua-duanya sudah cacat secara politik. Ia lebih suka dengan istilah Persatuan Indonesia. Konsep Persatuan Indonesia, tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya bersatu tanpa menghilangkan identitas budaya dan suku dari masing-masing komponen masyarakat. Jadi konsep itu jelas tidak berdasarkan ras,

tetapi berdasarkan *nation* dalam artian politik, yaitu *nation* Indonesia. Ia berpendapat *nation* Indonesia itu sebagai suatu hasil kesepakatan bersama, untuk mewujudkan Persatuan Indonesia.

Tokoh terakhir, J. Anto yang memiliki pandangan terhadap terbentuknya integrasi bukan berdasarkan etnisitas dan agama, akan tetapi kemajemukan yang ditempatkan dalam bingkai multikulturalisme dan bukan pluralisme. Ia lebih memilih multikulturalisme. Multikulturalisme sebagai praktik sosial dan kebijakan pemerintah dewasa ini sudah menjadi *trend* dunia. Multikulturalisme pada hakekatnya dimaksudkan untuk menciptakan suatu konteks sosiopolitis yang memungkinkan individu dapat mengembangkan kesehatan jati diri, mengembangkan sikap-sikap antar kelompok yang positif, dan tegaknya demokrasi.

Ada perbedaan pandangan dan gagasan dari ke enam tokoh etnis Tionghoa di atas, namun secara general, perspektif pemikiran tersebut mempunyai kesamaan yaitu menempatkan Persatuan Indonesia sebagai tujuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sinergi dari gagasan-gagasan yang dilontarkan ke enam tokoh, menghasilkan suatu konsep integrasi yang lebih pas bagi Indonesia pasca-reformasi. Konsep itu diusulkan dengan nama *integrated pluralism*, suatu konsep "keberagaman yang disatukan atas dasar penghargaan terhadap keberbedaan".

Gagasan *integrated-pluralism* sebagai suatu kebijakan yang merupakan sinergi dari beberapa model (asimilasi alamiah, strategi integrasi, integrasi-asimilasi, integrasi budaya, persatuan Indonesia, dan multikulturalisme), menunjukkan di kalangan etnis Tionghoa sendiri telah tumbuh realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Tionghoa yang plural. Untuk itu integrasi yang koeksistensi (pluralisme budaya) dalam koridor *integrated pluralism* merupakan strategi yang paling dibutuhkan bagi Indonesia yang *polyethnic* ini.

Gagasan *integrated-pluralism* sebagai apresiasi dari para tokoh etnis Tionghoa, dilihat dari latar belakangnya merupakan kritik terhadap kebijakan negara yang tidak memberikan tempat yang sama bagi identitasnya. Pada tataran *public-space*, pemerintah dari masa ke masa (masa Kolonial, masa Orde Lama,

dan masa Orde Baru) dalam pengambilan kebijakan integrasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia selalu mengandung unsur segregasi, sehingga kerusuhan dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa selalu berulang terjadi. Ini menunjukkan kebijakan yang diambil pemerintah turut mengentalkan keterpisahan etnis Tionghoa dalam kehidupan kebangsaan. Dampak pengambilan kebijakan ini, berpengaruh pada kehidupan *private-space*, di mana hubungan antar etnis selalu diwarnai perlakuan diskriminasi dari golongan mayoritas terhadap minoritas etnis Tionghoa. Sebaliknya golongan minoritas itu sendiri mencirikan identitasnya yang eksklusif. Keadaan ini membuat keterpisahan etnis Tionghoa semakin jauh dalam kehidupan kemasyarakatan. Dampak dari kondisi ini telah menyebabkan diskriminasi, prasangka, stereotype, dan pengkambinghitaman terus terpelihara sebagai masalah klasik yang menghambat proses integrasi bangsa, malah merupakan *contraditio in terminis* dari konsep Bhineka Tunggal Ika (*unity in diversity*) dan bertentangan dengan nilai-nilai intrinsik yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini Abdulkadir Besar (Amal dan Armawi, 1995: 52) menjelaskan:

Bangsa itu terpelihara persatuannya berkat adanya seperangkat nilai yang dihayati bersama oleh para warganegarannya. Perangkat nilai itu pada bangsa yang satu berbeda dengan perangkat nilai pada bangsa yang lain. Bagi bangsa Indonesia, perangkat nilai itu adalah Pancasila. Hakekat yang terkandung di dalam ideologi Pancasila adalah kebersamaan. Kebersamaan bisa terwujud karena realitas terintegrasinya sejumlah pluralitas, dan integrasi bisa berwujud suatu idea yang mengakui adanya pluralitas yang secara alami membutuhkan kebersamaan.

Dalam kaitannya dengan apresiasi pluralitas, maka integrasi dalam konteks ke-Indonesia-an harus ditempatkan dalam koridor *integrated pluralism* (Besar, 1994). Dengan konsep ini, integrasi tidak selamanya menghilangkan deferensiasi karena yang terpenting di sana adalah memelihara kesadaran dalam menjaga keseimbangan hubungan. Dengan demikian eksistensi dan identitas masing-masing kelompok sosial yang terintegrasi tetap diakui (Sunyoto Usman dalam Amal dan Armawi, 1995: 80).

Integrasi dalam koridor *integrated pluralism*, berarti integrasi yang mengakui dan memberi penghormatan pada setiap entitas identitas. Menurut Hogg dan Abram (1988), setiap individu pada dasarnya ingin memiliki identitas sosial yang positif melalui *recognition* dan *social equality*. Pengakuan dan persamaan

sosial inilah yang merupakan upaya integratif dalam mendukung proses pembentukan identitas bangsa. Pengakuan akan adanya perbedaan (*recognition and difference*) pada hakekatnya bermuara pada pengakuan terhadap hak asasi manusia untuk memiliki kebudayaan sendiri yang perlu diakui oleh komunitas lainnya (*the politics of recognition*) (Tilaar, 2007: 170).

Berangkat dari konsepsi integrasi dalam koridor *integrated pluralism*, maka dua strategi yang pernah ditawarkan Weiner (1971: 647), yaitu: konsep asimilasi dan konsep pluralisme, tampaknya perlu direkonstruksi dengan mengajukan pertanyaan: bentuk asimilasi dan pluralisme yang seperti apa yang cocok dengan kondisi Indonesia pasca-reformasi?

Asimilasi struktural, tampaknya menjadi alternatif dalam membangun integrasi di Indonesia. Oleh Marger (1985: 72), asimilasi struktural sering juga disebut dengan istilah integrasi. Dalam konteks ini, integrasi diartikan sebagai situasi yang memberikan peluang berpartisipasi dengan bebas di dalam semua bentuk interaksi sosial (baik pada tingkat primer/informal maupun dalam tingkat sekunder/formal), tanpa mempermasalahkan etnisitas seseorang. Dengan integrasi semacam ini, secara kultural kelompok-kelompok etnik tetap terpelihara, dan secara vertikal terjadi persamaan di bidang politik, ekonomi, dan lainnya.

Sementara bentuk pluralisme yang menjadi alternatif pilihan adalah *cultural pluralism*, yang mempunyai implikasi dipertahankannya berbagai sistem budaya di dalam kerangka politik dan ekonomi yang umum (Gordon, 1964). Setiap kelompok etnik harus bebas menentukan berapa banyak dari unsur-unsur warisan etniknya yang akan tetap mereka pertahankan. Kelompok-kelompok etnik minoritas menghendaki persamaan derajat dalam kedudukan sebagai warganegara dengan kelompok etnis mayoritas; akan tetapi tetap memiliki budayanya sendiri. Horace Kellen (Pelly, 1983) dalam konteks ini menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnis yang berbeda satu sama lain justru harus didorong untuk kebersamaan agar dengan demikian dapat memperkaya kehidupan masyarakat majemuk.

Gambaran masyarakat majemuk di atas, dapat dilihat dari bangsa Amerika yang dikenal sebagai bangsa yang pluralistik secara etnik. Dengan pluralistiknya, Amerika menjadikan *E Pluribus Unum* sebagai jargonnya. Begitupun dengan

bangsa Kanada yang memiliki kebijakan multikulturalisme dengan *mozaic*-nya, menjadikan *unity in diversity* sebagai jargonnya. Dua jargon tersebut, mirip dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun Indonesia bukanlah Amerika atau Kanada. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia justru besar karena primordialismenya. Primordialisme inilah yang merupakan pengikat asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu, konstruksi integrasi yang dibangun bukanlah integrasi dengan cara menghilangkan identitas primordial yang kaya dengan perbedaan itu. Hanya masalahnya sekarang, bagaimana bangsa ini belajar dalam membangun prestasi persatuan bangsa yang menghargai perbedaan, melalui penciptaan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dipersatukan oleh nilai-nilai bersama; menghargai keragaman etnis serta berkomitmen terhadap kesamaan antar kelompok yang memungkinkan terwujudnya suatu *social and political ideal of togetherness in difference* (Young, 1990: 175).

Terwujudnya *social and political ideal of togetherness in difference*, pada hakikatnya merupakan perwujudan persatuan Indonesia sebagai bangsa yang pluralis. Pluralisme multidimensional ini telah membentuk mozaik ke-Indonesiaan yang sangat indah dan mempesona. Guna membangun mozaik yang indah itu pada *nation-state* yang multikultural, Marger (1985:258) mengusulkan perlunya kebijakan multikulturalisme. Hal ini ditegaskan oleh Stavenhagen (1986), bahwa multikulturalisme merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang heterogen. Hampir 95 % negara-negara di dunia pada dasarnya adalah bersifat multikultural mengingat secara etnis dan budaya bersifat plural. Untuk itu multikulturalisme dapat diangkat sebagai keyakinan maupun kebijakan yang menghargai pluralisme etnik dan budayanya sebagai sesuatu yang berharga yang harus dipelihara dalam membangun integrasi dalam koridor *unity in diversity*. Pentingnya multikulturalisme dalam membangun integrasi, diungkapkan oleh Blum (2001:19) karena elemen-elemen multikulturalisme mencakup tiga sub-nilai, yaitu; (a) menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang, (b) menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang etnik/kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya, dan (c) menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri.

3.2. Rekonstruksi Identitas Bangsa

Gagasan para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan rekonstruksi identitas bangsa juga berbeda-beda. Namun perbedaan hanya terletak pada alur berpikir bukan pada hal yang prinsip, karena masing-masing tokoh tetap pada satu muara yaitu bangsa Indonesia.

Tabel 4

Gagasan Para Tokoh Etnis Tionghoa dalam
Merekonstruksi Identitas Bangsa

TOKOH	Formulasi Identitas Bangsa		
	Gagasan	Tuntutan	Harapan
Sofyan Tan	Identitas Dinamis	Menghapus kategori mayoritas minoritas	Harmonisasi
Brilian Moehtar	Identitas Nasional	Menghapus Berbagai Penyakit Budaya	Indonesia Bersatu
Indra Wahidin	Identitas Budaya	Menghapus diskriminasi politik & budaya	Tumbuhnya nilai-nilai demokrasi budaya
Lily Tan	Identitas Sosial	Toleransi	Indonesia Menjadi
Vincen Wijaya	Identitas Kelas	Produktivitas	Masyarakat Multikultural Sejahtera
J. Anto	Identitas multikultural	Politisasi Etnis	Identitas Bangsa Multi-Budaya

Sofyan Tan berpandangan sama seperti ikrar Sumpah Pemuda 1928. Namun menurutnya ikrar "satu bangsa yaitu bangsa Indonesia", dalam perjalanannya belum pernah dilaksanakan sepenuh hati. Beberapa kebijakan negara yang mewarisi gagasan kolonial, telah membuat masing-masing komunitas lebih mementingkan identitas kesukuan atau identitas etnisnya sendiri. Sudah saatnya di alam reformasi masyarakat Indonesia menggeser kepentingan identitas kesukuan atau identitas etnisnya itu ke identitas sebagai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Terbentuknya identitas bangsa yaitu bangsa Indonesia bukan berarti menghilangkan identitas kesukuan atau identitas etnis, tetapi masing-masing identitas bersinergi membentuk bangsa yang lebih besar, yaitu bangsa Indonesia. Cara yang tepat untuk mempercepat pemahaman ini adalah melalui

kesetaraan pendidikan. Melalui kesetaraan pendidikan ini, keidentitasan Indonesia akan lebih dinamis. Masyarakat kita yang majemuk memiliki beragam identitas, dan jaman ini pun terus berubah. Semua menanggapi perubahan, merekonstruksi. Jadi apapun perubahan itu, yang penting keidentitasan Indonesia terus menjadi. Pandangan Sofyan Tan ini, jelas menunjukkan dirinya sebagai tokoh pembauran yang menghendaki berfungsinya identitas dinamis, suatu identitas yang terbuka, yang alami mengikuti arus perubahan baik secara internal maupun eksternal.

Pandangan Sofyan Tan ini, mendapat dukungan dari tokoh MABMI Medan, Bapak Syamsul Arifin yang sekaligus sebagai gubernur Sumatera Utara: "Identitas Indonesia merupakan hasil ramuan dari identitas-identitas etnis yang ada di Nusantara. Ramuan ini terus berproses seiring perkembangan jaman, namun tetap dalam koridor Pancasila" (wawancara, tanggal 27 Oktober 2009).

Sementara Brilian Moktar berpandangan dengan menghadapi identitas budaya versus identitas politik. Menurutnya, pemenggalan budaya dan pembatasan politik selama masa Orde Baru telah membuat etnis Tionghoa sebagai *outsider*. Asimilasi inkorporasi dan desinoisasi (pelarangan budaya Tionghoa secara menyeluruh), justru telah membuat etnis Tionghoa berkepribadian ganda. Mengaku sebagai orang Indonesia tapi tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia. Bukan warga negara RRC tapi disebut Cina. Dengan demikian harus dipilah, mana yang identitas budaya dan mana yang identitas politik. Artinya kecenderungan berbudaya tidak identik dengan kecenderungan berpolitik. Dengan demikian mempunyai identitas kebudayaan Tionghoa bukan berarti mempunyai identitas politik Tiongkok.

Di era reformasi telah terbuka kebebasan, budaya Tionghoa tidak lagi dianggap budaya asing, bahkan diakui sebagai salah-satu budaya nasional Indonesia. Agama Khonghucu yang identik dengan Tiongkok sudah diakui sebagai salah satu agama resmi. Bahkan di bidang politik, sudah banyak tokoh-tokoh Tionghoa yang masuk ke bursa politik. Dalam diri mereka ingin membuktikan, walaupun mereka berbudaya Tionghoa tapi nasionalisme mereka adalah Indonesia.

Konsep nasionalisme yang ia lontarkan, jelas menunjukkan dirinya sebagai tokoh yang berpegang pada identitas nasional (lokal=Indonesia). Identitas

ini berpegang pada norma-norma politik yang membutuhkan dukungan penuh dari semua institusi negara. Dalam konteks norma politik modern, identitas ini mengacu kepada gagasan tentang loyalitas politik terhadap negara.

Sedangkan Indra Wahidin berpandangan bahwa formulasi identitas bangsa perlu didukung dengan adanya strategi adaptasi dari setiap individu warga negara. Artinya setiap individu yang berada dalam *communitarian culture* dapat menempatkan identitas dirinya secara harmoni dengan *political culture* dalam suatu *nation-state*.

Di era reformasi, *political culture* di Indonesia sudah kondusif. Ada dua hal yang mendasar. Pertama, di bidang budaya telah dipulihkannya hak-hak budaya etnis Tionghoa. Budaya adalah roh suatu masyarakat, suatu etnis dan suatu bangsa. Kedua, di bidang politik dan hukum telah diundangkannya tiga undang-undang yang sangat penting, yaitu: UU RI No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI, UU RI No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU RI No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Hanya sekarang masalahnya bagaimana setiap individu dapat membawa identitas budayanya itu secara harmoni dalam ruang keindonesiaan.

Penekanan budaya yang dinyatakan sang tokoh, menunjukkan dirinya lebih berpegang pada identitas budaya, suatu identitas yang menekankan pada pelestarian dan kekhasan budaya. Ide gagasan mengenai *cross culture fertilization* yang kemudian ia wujudkan dengan membentuk Ikatan Sinergi Antara Marga Huang dengan Marga Siregar, menunjukkan sang tokoh berpegang pada norma budaya.

Sementara tokoh berikutnya, Lily Tan lebih menempatkan identitas sosial atas dasar toleransi. Gagasan Lily Tan ini pada dasarnya menempatkan identitas sosial atas dasar toleransi dari berbagai identitas yang berbeda, dengan memberi kebebasan kepada individu untuk memiliki identitas sosial yang positif. Upaya untuk mencapai identitas sosial yang positif dapat dicapai salah satunya melalui perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud, dapat dilakukan melalui cara memperbaiki citra, atau menggeser nilai atau orientasi dari yang tradisional ke yang modern.

Gagasan Lily Tan tampaknya sejalan dengan perannya sebagai pejuang gender. Perempuan yang selama ini ter subordinasi, ia perjuangkan melalui suatu perubahan citra melalui pemberdayaan perempuan. Sekaitan dengan perannya itu, maka sang tokoh juga sedang melakukan perubahan sosial melalui upaya menggeser orientasi ke-Tionghoa-an dari yang berorientasi tradisional menjadi ke-Tionghoa-an yang berorientasi modern.

Sedangkan tokoh Vincent Wijaya, punya keyakinan yang lain. Mengenai gagasan dalam memformulasikan identitas bangsa, ia ajukan melalui identitas kefas yang bersandar pada norma-norma ekonomi. Vincent Wijaya menuntut semua kalangan (tidak saja pemerintah tetapi pada semua komponen) untuk tidak bersikap diskriminatif, karena fakta akibat diskriminatif selama ini telah menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan. Namun sebaliknya, masalah diskriminasi juga dapat dieliminir ketika masyarakat dan negara ditopang ekonomi yang mantap.

Pandangan sang tokoh ini, lebih dilatarbelakangi oleh keadaan zaman. Globalisasi yang semakin intens, menuntut bangsa ini untuk dapat bersaing dengan bangsa lain, yang berarti menuntut pada semua warga negara untuk mempunyai daya saing, berorientasi pada *achievement* dan menumbuhkan perilaku produktif. Identitas kebangsaan akan mempunyai *bargaining*, jika ditopang oleh kekuatan ekonomi yang mantap.

Sedangkan J. Anto sebagai tokoh terakhir berpendirian, identitas etnis ketionghoan belum menjadi bagian sepenuhnya dari masyarakat multikultur di kota Medan. Alasannya, segregasi masih tampak pada beberapa bidang kehidupan, seperti: pemukiman, pekerjaan dan pendidikan. Sebagai penulis buku, ia juga menilai masih minimnya sumber-sumber historiografi (tokoh-tokoh) masyarakat Tionghoa, baik dalam konteks masa lalu maupun kekinian. Keadaan ini menjadi salah satu penghambat dalam upaya untuk memahami masyarakat Tionghoa di Medan. Bahkan, ia menilai suasana kehidupan kelompok masyarakat secara umum masih memiliki stereotip-stereotip tertentu ketika memandang kelompok di luar lingkarannya. Hal inilah yang kerap melahirkan prasangka-prasangka rasial.

Dari pandangannya ini, J. Anto mengajak semua warga kota Medan (baik etnis Tionghoa maupun etnis-etnis lain di kota Medan) untuk belajar menyelami: memahami, menghayati, dan menilai identitas-identitas yang ada pada masyarakat multikultural. Menurutnya, identitas itu pun multikultural yang berarti harus ada sikap saling menghargai di antara pemilik identitas. Pandangan ini jelas, sang tokoh menganut identitas multikultural.

3.3. Pembangunan Masyarakat Multikultural

Gagasan para tokoh etnis Tionghoa mengenai pembangunan pada masyarakat multikultural, memiliki pandangan dan proyeksi yang berbeda. Namun ada benang merah yang dapat dijadikan pijakan, yaitu hal yang paling utama dari makna dan pemahaman multikulturalisme adalah kesejajaran budaya. Masing-masing budaya manusia atau kelompok etnis harus diposisikan sejajar dan setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih dominan. Semua kebudayaan pada dasarnya mempunyai kearifan-kearifan tradisional yang berbeda-beda.

Tabel 5
Gagasan Tokoh Mengenai Pembangunan Masyarakat Multikultural
Di Kota Medan

TOKOH	Pembangunan Masyarakat Multikultural	
	Pandangan	Proyeksi
Sofyan Tan	Multikulturalisme Alamiah	Pendidikan Multikulturalisme
Brilian Moktar	Multikulturalisme Nasionalis	Nation & Character Building
Indra Wahidin	Multikulturalisme Otonomis	Pembangunan Kebudayaan
Lily Tan	Multikulturalisme Konstruksionisme	Pembangunan Kebudayaan
Vincent Wijaya	Multikulturalisme Pancasila	Masyarakat Adil & Makmur
J. Anto	Multikulturalisme Kosmopolitan	Pendidikan Multikulturalisme

Tokoh pertama, Sofyan Tan tetap konsisten dengan kata "alamiah". Model Asimilasi Alamiah, Identitas Alamiah, tetap ia bawa dalam menawarkan pembangunan masyarakat multikultural, yakni model Multikulturalisme Alamiah. Kata "alamiah" mengandung makna pembangunan masyarakat multikultural tidak lagi bersifat *uniform* dan *top-*

down, tetapi harus berakar dari arus bawah. Arah dari proses pembangunan harus menuju pada proses pembukaan ruang yang lebih luas bagi partisipasi warga negara tanpa sekat suku, agama, ras dan golongan. Dengan demikian konsep multikulturalisme alamiah yang ia maksudkan dalam pembangunan adalah pembangunan berbasis pada pemberdayaan warga negara. Untuk itu, proyeksi pembangunan masyarakat multikultural yang ia tawarkan untuk kota Medan dijalankan dengan memprioritaskan pada jalur pendidikan multikultural.

Tokoh kedua, Brilian Moktar berpandangan lain. Ia menekankan pembangunan masyarakat multikultural pada pentingnya model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Namun ia sendiri mengingatkan semangat nasionalisme yang dibangun jangan lagi terjebak pada watak yang eksklusif, tetapi harus inklusif. Model kebijakan multikultural jangan lagi terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian yang berada di tangan suatu kelompok elite tertentu. Untuk itu, pembangunan masyarakat multikultural yang ia tawarkan untuk kota Medan harus diletakkan pada prioritas *nation and character building*. Baginya semangat kebangsaan adalah semangat multikulturalisme yang berprinsip pada *recognition and different*.

Indra Wahidin sebagai tokoh ketiga, tetap konsisten pada perannya dalam membangun kebudayaan dengan semangat semboyan Bhineka Tunggal Ika. Kebijakan masa lalu yang monokulturalisme telah menyebabkan lahirnya bentuk *exclusivity* ditataran *private space*, yang menyebabkan terjadinya persaingan antar etnis yang tidak kondusif. Pemikiran sang tokoh menempatkan gagasannya dalam pembangunan masyarakat multikultural, dengan menawarkan model multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Kepedulian pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok yang

dominan. Mereka menentang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar. Sekaitan dengan model yang ia tawarkan, proyeksi pembangunan masyarakat multikultural ia prioritaskan pada pembangunan kebudayaan dalam koridor *unity in diversity*.

Sementara Lily Tan, menawarkan konsep pembangunan masyarakat multikultural yang bertolak pada paham konstruksionisme. Dalam pandangan ini, kebudayaan dipandang sebagai "kata kerja" yakni suatu proses yang berlangsung terus. Dengan demikian kebudayaan bersifat dinamis. Kebudayaan selalu dikonstruksikan oleh mereka yang terlibat dalam kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, manusia akan terus menerus berada dalam proses membentuk sekaligus dibentuk oleh budayanya. Untuk itu proyeksi pembangunan masyarakat multikultural juga harus meletakkan pembangunan kebudayaan sebagai unsur yang prioritas dalam membangun mozaiknya warna warni budaya Indonesia.

Sedangkan Vincent Wijaya, tetap konsisten pendiriannya pada konsep persatuan Indonesia yang tergambar pada semboyan Bhineka Tunggal Ika. Konsep *nation* tidak lagi bersifat ras, namun berdasarkan konsep politik sebagai suatu kesepakatan bersama untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, konsep pembangunan masyarakat multikultural juga harus diletakkan pada konsep *nation* yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Gagasan sang tokoh menunjukkan pembangunan masyarakat multikultural harus dibangun berdasarkan multikulturalisme Pancasila, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Terakhir J. Anto yang memiliki pandangan multikulturalisme kosmopolitan, yakni paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme jenis ini, memang sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan

postmodernis yang memandang seluruh budaya sebagai *resources* yang dapat mereka pilih dan diambil secara bebas. Namun demikian sang tokoh, tetap menunjukkan kejadiannya sebagai bangsa Indonesia. Di tengah globalitas yang terus mendera, ia mengingatkan para generasi muda untuk dapat memiliki daya saing atas dasar kompetensi yang dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat multikultural. Untuk tercapainya pembangunan masyarakat multikultural yang demikian, ia menawarkan pendidikan multikulturalisme yang mengedepankan hak-hak individu untuk dapat meraih sejumlah kompetensi agar dapat bersaing di era global.

B. Pembahasan

Perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa di kota Medan berkenaan dengan rekonseptualisasi integrasi pasca-reformasi, menampilkan perspektif yang beragam. Pertama, integrasi yang dibutuhkan bagi masyarakat dapat diterapkan melalui model asimilasi alamiah sebagai kebijakan koeksistensi yang dapat mengayomi seluruh identitas budaya yang begitu beragam dan berbeda-beda. Melalui model ini, dibelajarkan perilaku mau memahami dan menerima keberagaman dan perbedaan etnis yang ada, sikap saling menghargai, solidaritas di semua lingkup kehidupan, dan *senses of belonging* terhadap semua identitas yang ada sebagai milik bangsa Indonesia. Integrasi bangsa memang harus tetap menjadi program besar setiap pemerintahan, namun dalam keberlanjutannya harus dibangun atas dasar integrasi dari bawah oleh masyarakat (*popular nations integration*) sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masa kini dan mendatang.

Kedua, strategi integrasi (integrasionis) yang pernah digagas pada masa lalu tampaknya perlu disesuaikan dengan alam di era reformasi ini. Integrasi yang wajar, yang nonras, yang mengakui semua suku yang ada di Nusantara sebagai bagian dari bangsa Indonesia, termasuk suku peranakan Tionghoa. Untuk tercapainya integrasi yang wajar, seluruh anggota masyarakat berinteraksi secara terbuka saling mengisi kebutuhan, tidak saling merintangi, dan yang penting ada konsensus, yaitu konsensus terhadap konsep bangsa Indonesia yang lebih modern Konsep bangsa Indonesia yang tidak lagi berbau ras, tapi konsep bangsa Indonesia yang ditempatkan dalam batasan arti politik, bahwa warga negara Indonesia sejati

dilihat bukan dari keturunannya. Tuntutan ini jelas menghendaki dihapuskannya rasialisme, yang akan membawa pada harapan: semua suku-suku yang ada di Nusantara bersatu-padu dan berintegrasi membangun Indonesia yang satu.

Ketiga, memadukan strategi integrasi dengan asimilasi secara bersamaan, merupakan gagasan alternatif yang bisa menjadi masukan. Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dilihat melalui pendekatan integrasi, dalam arti sebagai strategi yang mengharuskan semua suku yang ada masuk ke dalam *mainstream* bangsa Indonesia. Namun integrasi itu harus bersifat fungsional, yaitu penyatupaduan yang didasari dengan adanya saling bergantung antara bagian-bagian dalam suatu sistem sosial untuk mewujudkan penyatuan yang harmoni. Tapi pada sisi lain, suku-suku yang ada di Nusantara ini pun secara natural berhubungan dan bergabung membentuk sebuah kelompok yang baru, yang lebih besar, yakni bangsa Indonesia. Integrasi yang diusulkan bersifat fungsional, dan asimilasi yang dipilih dengan jenis amalgamasi.

Keempat, gagasan mengangkat integrasi budaya untuk dikonstruksi dalam membangun integrasi bangsa, menjadi gagasan alternatif berikutnya. Alasannya, secara hukum dan politik, sudah ada kesepakatan integrasi bangsa dibangun atas dasar persamaan dan kesederajatan. Tapi secara budaya, terutama pada kehidupan masyarakat, belum terjadi kesepakatan secara menyeluruh. Mungkin ini akibat pengaruh hukum dan politik kolonial yang sudah mengakar lama, dampaknya nilai-nilai yang berlaku pada masing-masing kelompok dalam kehidupan masyarakat menjadi bahan pertentangan. Gagasan membangun integrasi budaya, diperjuangkan untuk mengangkat ketidakadilan yang masih tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perjuangan dalam menghapus ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah hasil dari konstruksi sosial-budaya, yang mengakibatkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dan marjinal. Ada semacam benang biru, perjuangan dalam gender identik dengan perjuangan dalam membangun integrasi budaya. Perjuangan untuk gender adalah untuk membangun budaya, budaya yang mau menerima dan menghargai perbedaan dalam kebersamaan. Tidak perlu lagi membeda-bedakan, karena semua punya hak yang sama tanpa melihat darimana asal-usulnya. Harapan yang diperjuangkan dalam membangun integrasi budaya,

yaitu integrasi atas dasar persamaan hak dan kesetaraan.

Kelima, menolak istilah integrasionis dan asimilasionis, karena dua istilah itu sudah cacat secara politik, menjadi latar belakang gagasan untuk mempergunakan istilah Persatuan Indonesia yang dipandang pas lebih mengindonesia. Strategi konsep Persatuan Indonesia, tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya bersatu tanpa menghilangkan identitas budaya dan suku dari masing-masing komponen masyarakat. Jadi konsep itu jelas tidak berdasarkan ras, tapi yang ada adalah *nation* Indonesia. *Nation* Indonesia merupakan suatu kesepakatan bersama untuk mewujudkan Persatuan Indonesia.

Keenam, integrasi dikonstruksi bukan berdasarkan etnisitas dan agama, tapi dibangun berdasarkan konsensus politik atas dasar perbedaan dan penghargaan. Kemajemukan bangsa ini, sudah saatnya ditempatkan dalam bingkai multikulturalisme bukan pluralisme. Selama ini kita hanya diajak untuk belajar tentang keberagaman, namun perbedaan dan penghargaan belum diajarkan sampai akar rumput. Kita hanya diajak untuk menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan yang ada, tetapi pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya orang lain belum dijadikan *trend*. Pandangan ini menunjukkan integrasi bangsa sudah saatnya ditempatkan dalam bingkai multikulturalisme untuk terwujudnya masyarakat multikultural yang demokratis, yang mau menerima perbedaan dan menghargai perbedaan dalam suatu keragaman.

Sedangkan gagasan para tokoh berkenaan dengan rekonstruksi identitas bangsa, menghasilkan suatu formulasi identitas bangsa yang lebih pas bagi Indonesia di era globalisasi. Formulasi itu diusulkan dengan nama "identitas hibrid: Indonesia yang terus menjadi". Formulasi ini menggambarkan suatu identitas yang *fluid*, yang terbuka, yang dinamis yang membawa kepada identitas kebangsaan yang nonras, tidak rigid, tidak kaku, tidak tertutup, dan tidak statis terhadap perubahan, perkembangan, dan kebutuhan jaman. Bagi mereka, keidentitasan Indonesia adalah identitas yang terus menjadi.

Berangkat dari perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa di kota Medan berkenaan dengan formulasi identitas bangsa, tampaknya gagasan mereka

dapat dijadikan masukan berarti bagi pemerintah kota/negara dalam merumuskan kembali identitas kebangsaan dalam ruang ke-Indonesia-an di era global, yakni:

Pertama, usulan untuk memfungsikan identitas dinamis sebagai suatu identitas yang terbuka, yang alami dalam mengikuti arus perubahan baik secara internal maupun eksternal. Usulan ini dapat menjadi alternatif masukan yang berharga. Terlebih di era globalisasi, masyarakat lokal dihadapkan pada dua sisi yang harus saling melengkapi, yakni: sadar bahwa mereka harus mengadaptasi diri dengan dunia yang tengah berubah, dan pada saat yang bersamaan mereka pun sadar untuk menjaga kontinuitas dan identitasnya. Kondisi inilah yang sering disebut sebagai *dynamic equilibrium*. Dalam kerangka *dynamic equilibrium*, maka kata "identitas" bukanlah sesuatu yang bersifat statis tetapi merupakan proses yang dinamis berdasarkan konteks sosial tertentu. Pandangan ini menunjukkan identitas bukan sesuatu yang *fixed*, tetapi sebaliknya identitas didefinisikan sebagai sesuatu yang *fluid*, yaitu yang terbuka terhadap proses *reflexivity*, *reevaluation*, *reinterpretation* atau *reconstruction*. Dengan demikian identitas atau keaslian bukanlah suatu harga mati melainkan sesuatu yang selalu berubah dalam proses dengan lingkungan luar atau bisa jadi sebagai proses dinamika internal masyarakat itu sendiri. Model identitas dinamik ini, menuntut konsep *nation* tidak lagi dirumuskan berdasarkan ras, tetapi secara politik yang mengandung arti kesepakatan bersama untuk membangun keidentitasan Indonesia yang terus menjadi. Gagasan ini menuntut untuk dihapuskannya kategori mayoritas-minoritas, yang dalam perjalanan sejarah di republik ini telah memunculkan garis pemisah antara *insiders* dan *outsiders* dalam hubungan interaksinya yang tidak seajar (*imbalanced relationship*). Dengan tuntutan ini diharapkan akan muncul harmonisasi dalam hubungan antar etnis dalam mosaik-nya Indonesia yang berwarna-warni.

Kedua, usulan untuk tetap membangun identitas nasional (lokal=Indonesia) yang berpegang pada norma-norma politik. Identitas ini mencirikan diri pada norma-norma politik yang membutuhkan dukungan penuh dari semua institusi negara. Dalam konteks norma politik modern, identitas ini mengacu kepada gagasan tentang loyalitas politik terhadap negara. *Sense of belonging* dan *sense of solidarity* adalah wujud dari loyalitas untuk membangun

nasionalisme Indonesia. Nasionalisme tidak mengenal suku dan agama, karena nasionalisme Indonesia adalah cinta tanah air. Nasionalisme Indonesia tidak eksklusif tapi inklusif. Ini berarti semua suku yang ada di tanah air Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam membangun tanah air Indonesia. Model identitas ini, menuntut dihapuskannya berbagai penyakit budaya yang dirasakan masih melekat, seperti: prasangka, *stereotype*, diskriminasi, *scape goating*, etnosentrisme dan rasisme. Harapan dari tuntutan ini mendambakan terwujudnya Indonesia Bersatu.

Ketiga, usulan untuk memprioritaskan dibangunnya identitas budaya dalam memformulasikan keidentitasan Indonesia. Usulan ini dapat dijadikan masukan yang positif. Namun, model identitas ini perlu didukung dengan adanya strategi adaptasi dari setiap individu warga negara. Artinya setiap individu yang berada dalam *communitarian culture* dapat menempatkan identitas dirinya secara harmoni dengan *political culture* dalam suatu *nation-state*. Model identitas budaya, menekankan pada pelestarian dan kekhasan nilai-nilai budaya. Ide gagasan ini dapat diwujudkan melalui *cross culture fertilization*, di mana dua atau lebih budaya yang berbeda dapat saling berbagi nilai-nilai budaya khasnya sekaligus melestarikannya melalui suatu ikatan budaya. Model identitas ini menuntut dihapuskannya diskriminasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan utamanya budaya. Melalui tuntutan ini akan terbangun suatu harapan tumbuhnya nilai-nilai budaya demokratis dalam suatu masyarakat plural.

Keempat, usulan untuk menempatkan identitas sosial atas dasar toleransi dari berbagai identitas yang berbeda. Model ini memberi kebebasan kepada individu untuk memiliki identitas sosial yang positif. Upaya untuk mencapai identitas sosial yang positif dapat dicapai melalui mobilitas sosial dan perubahan sosial. Mobilitas dan perubahan sosial yang dimaksud, mengisyaratkan setiap individu warga negara untuk secara berkualitas dapat melakukan pergeseran nilai atau orientasi ke arah perubahan yang lebih baik. Perubahan nilai, perubahan orientasi atau citra adalah suatu yang positif sebagai suatu strategi dalam beradaptasi dengan jaman yang terus berubah. Tetapi perubahan-perubahan itu bukan berarti meninggalkan sama sekali sesuatu yang lama. Artinya, etnis apa pun yang ada di Nusantara ketika melakukan transformasi, bukan berarti

meninggalkan nilai-nilai khas yang menjadi identitasnya. Apapun bentuk perubahan itu, setiap entitas tetap harus berpegang pada nilai-nilai identitas bersama, yakni nilai-nilai identitas kebangsaan yang menjadi milik semua identitas-identitas yang ada di Nusantara. Model identitas ini menuntut terpeliharanya toleransi dalam hubungan antar etnis dalam melakukan mobilitas dan perubahan sosial, sekaligus dalam menghadapi perubahan itu sendiri. Melalui tuntutan ini, akan terwujud harapan lahirnya Indonesia Baru, dalam arti Indonesia yang terus menjadi.

Kelima, alternatif usulan untuk mengajukan identitas kelas dalam memformulasikan identitas bangsa. Model identitas ini bersandar pada norma-norma ekonomi. Dilatarbelakangi oleh keadaan zaman dan globalisasi yang semakin intens, menuntut bangsa ini untuk dapat bersaing dengan bangsa lain, yang berarti menuntut pada semua warga negara untuk mempunyai daya saing, berorientasi pada *achievement* dan menumbuhkan perilaku produktif. Identitas kebangsaan akan mempunyai *bargaining*, jika ditopang oleh kekuatan ekonomi yang mantap. Model identitas ini menuntut semua warga untuk memiliki orientasi sikap dan perilaku yang produktif, untuk membangun harapan terwujudnya masyarakat multikultural yang sejahtera.

Keenam, usulan untuk menempatkan identitas multikultural dalam memformulasikan identitas kebangsaan di era global yang penuh dengan paradoks. Pertemuan antara nilai-nilai global-mondial versus nilai-nilai lokal, menuntut semua warga untuk belajar menyelami: memahami, menghayati, menilai dan memberi penghormatan pada setiap identitas-identitas yang ada dalam masyarakat multikultural. Identitas multikultural yang lahir dari sikap saling menghargai di antara pemilik identitas merupakan kekuatan utama sebagai basis lahirnya masyarakat multikultural. Kesadaran identitas seperti ini tidak muncul begitu saja tetapi lahir dari suatu proses pembelajaran multikulturalisme yang mampu mengedepankan nilai-nilai persatuan melalui: penghargaan terhadap identitas etnis/budaya orang lain; menghormati dan rasa ingin tahu tentang etnis dan budaya lain; serta merasa senang dan ikut memelihara perbedaan etnis/kultural sebagai bagian komunitasnya. Namun sayangnya, pasca-reformasi di era otonomi daerah telah muncul fenomena politisasi etnis yang membawa

dampak bagi generasi mendatang. Untuk itu model ini menuntut penghapusan politisasi etnis dalam praktik-praktik berpolitik, melalui pembelajaran multikultural guna membangun identitas kebangsaan berwawasan multi-budaya.

Ada perbedaan gagasan, tuntutan dan harapan dari keenam tokoh etnis Tionghoa di atas. Namun secara general, perspektif pemikiran tersebut mempunyai kesamaan yaitu pemahaman, penghayatan, penilaian dan penghargaan terhadap berbagai identitas yang berbeda, sekaligus pengakuan akan posisi identitasnya sebagai bagian integral dari identitas kebangsaan Indonesia. Tuntutan pengakuan ini membawa identitasnya untuk dapat menempatkan diri secara harmoni dalam suatu identitas yang lebih besar, yaitu identitas kebangsaan Indonesia.

Untuk tema yang ketiga yakni pembangunan masyarakat multikultural, masing-masing tokoh dengan latar belakang pekerjaan dan kompetensinya, telah memilih jalur yang dianggap pas sebagai wadah pembangunan masyarakat multikultural.

Satu hal yang menarik untuk kasus kota Medan adalah gairahnya tokoh-tokoh etnis Tionghoa dalam memasuki kancah politik. Hal ini ada beberapa alasan: Pertama, mungkin sebagian dari para tokoh etnis Tionghoa ingin menjadikan pengabdian mereka terhadap Indonesia semakin sempurna, dengan mengintegrasikan pengabdian sosial ekonomi yang telah dicapainya selama ini kepengabdian di bidang politik, melalui politik formal. Ini sebagai bentuk partisipasi politik yang konkrit karena selama puluhan tahun hak-hak politik mereka telah dipasung oleh negara.

Kedua, terkait dengan kegelisahan sejumlah etnis Tionghoa yang sudah sukses secara ekonomi, namun masih banyak ketimpangan sosial dan kebijakan-kebijakan yang tidak mensejahterakan masyarakat. Sebagian dari mereka ada yang terjun ke dunia organisasi non-politik. Bersama-sama rakyat kecil mereka berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dan sebagian lagi memilih untuk terjun ke politik praktis dengan bergabung ke partai politik. Para tokoh etnis Tionghoa di kota Medan yakin, bahwa pasca reformasi saat ini dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan membuat atau merevisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan belum adil.

Ketiga, dilihat secara statistik jumlah masyarakat etnis Tionghoa dewasa ini cukup signifikan baik di tingkat Sumatera Utara maupun di Medan. Dari 12,8 juta penduduk Sumut, sekitar 1,04 juta di antaranya adalah etnis Tionghoa. Sementara itu, dari sekitar 2,1 juta penduduk kota Medan, sekitar 500.000 orang atau 25 persennya merupakan etnis Tionghoa. Data ini menunjukkan bahwa dari segi jumlah cukup signifikan dan wajar bila masyarakat Tionghoa memiliki wakil mereka di lembaga legislatif.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan adanya kegairahan berpolitik dari etnis Tionghoa di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan yang pada tahun-tahun belakangan ini dinilai semakin meningkat, terutama pada pemilu legislatif 2009 lalu. Fenomena ini perlu dipandang sebagai upaya positif dan bentuk konkrit partisipasi politik etnis Tionghoa di kota Medan untuk turut membangun Medan secara bersama. Satu hal juga yang menjadi catatan, kebijakan negara ternyata sangat berpengaruh terhadap peran mereka pada suatu ruang. Kalau dulu, etnis Tionghoa dibatasi pada ruang ekonomi, namun kini muncul fenomena menarik, mereka sudah berani masuk pada ruang-ruang publik, terutama ruang politik yang dulu dianggap paling tabu untuk didekati. Data ini menunjukkan adanya pergeseran dari ruang yang tertutup ke arah terbukanya ruang-ruang sosial yang baru bagi mereka.

Berkaitan dengan perannya sebagai tokoh etnis Tionghoa, mereka berapresiasi pada ruang-ruang publik yang berbeda. Namun ada kesamaan dalam pengabdian mereka sebagai warga negara, yaitu pembangunan masyarakat multikultural yang "demokratis" melalui wujud nyata yaitu "partisipasi". Temuan ini, dapat diperjelas dengan merujuk klasifikasi budaya politik sebagaimana yang diuraikan Almond (1963). Mereka tampil sebagai warga negara yang aktif, memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai warga negara, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik, dan berperan sebagai aktivis dalam kehidupan masyarakat. Perilaku nyata yang dicontohkan para tokoh, merupakan wujud partisipasi dirinya sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik, sekaligus upaya nyata mereka dalam pembangunan masyarakat multikultural. Diperjelas oleh Putnam (1994), bahwa partisipasi tersebut harus dibangun atas hal-hal yang mendasar, yakni: (1) egalitarianisme atau hubungan timbal-balik secara horizontal sesama warga; (2)

pluralisme, di mana perbedaan paham, kepercayaan dan kepentingan sesama warga diterima sebagai kenyataan hidup yang harus dihargai, karena toleransi sosial-politik memberi ciri krusial terhadap *civic community*; dan (3) rasa saling percaya (*trust*) dan solidaritas sesama warga.

Profil para tokoh etnis Tionghoa ini, perlu dijadikan ikon bagi warga kota Medan, tujuannya adalah untuk melibatkan lebih banyak warganegara yang memiliki andil (*stakeholders*) dalam pembangunan masyarakat multikultural yang demokratis. Berdasarkan gagasan yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa di kota Medan, dapat dinyatakan bahwa: perlunya pembangunan masyarakat multikultural di kota Medan melalui pembangunan budaya kota secara bersama. Wahana untuk mengembangkan pembelajaran multikulturalisme perlu diperkuat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim dengan menghadirkan pendidikan multikultural pada institusi-institusi. Hal ini dipandang penting, karena pendidikan multikultural sebagai wahana pembelajaran multikulturalisme pada hakekatnya merupakan seperangkat kepercayaan (*set of beliefs*) yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (Banks, 2001). Fungsi multikulturalisme ini dengan pendekatan aksi sosial dari pendidikan multikultural, mengajarkan warga pelajar menjadi kritis (*social critics*), aktif (*political activists*), dan sebagai agen perubahan (*change agents*), serta pemimpin yang berkompeten dalam masyarakat yang berbeda secara etnis dan pluralistik secara kultural.

Pengembangan kompetensi warga pelajar yang bercirikan multikultural di atas, menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya pengembangan warga negara multikultural. Kompetensi kewarganegaraan multikultural oleh Branson (1998:16), diuraikan menjadi: (1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; (2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan (3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Sinergi keterkaitan tiga kompetensi tersebut, membentuk *civic competence* dengan tujuan *desirable personal qualities* yakni warga negara yang berkualitas (kompeten, percaya diri dan komitmen) yang memiliki *civic virtue*, budaya kewarganegaraan (*civic culture*), serta nilai dan kepercayaan terhadap demokrasi (*democratic values and beliefs*) menuju terbentuknya kepribadian yang memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Winataputra, 2005).

Dari kajian teori di atas, diperoleh gambaran faktual bahwa profil enam tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini, dengan *civic competence* yang dimilikinya mampu memasuki klasifikasi budaya politik partisipan. Nilai-nilai demokrasi yang mereka terapkan dibarengi dengan partisipasi konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi indikasi tumbuhnya multikulturalisme di kota Medan. Satu hal yang menarik, dalam konteks keruangan, sebelum reformasi mereka terdogma pada ruang stagnan (ekonomi), kini mereka memiliki kebebasan dalam memilih ruang. Ruang-ruang sosial baru mereka apresiasi karena ada penghargaan terhadap identitas yang berbeda. Namun komitmen (*civic commitment*) pun mereka tunjukkan, bagaimana identitas yang melekat padanya (*communitarian culture*) dapat ditempatkan secara harmoni dalam identitas yang lebih besar yaitu: identitas kebangsaan Indonesia (*political culture*).

Civic competence yang mereka miliki yang kemudian diwujudkan dalam budaya politik partisipan, merupakan respon tidak saja terhadap kebijakan negara tetapi juga terhadap berbagai peristiwa, termasuk reformasi yang membuka peluang bagi mereka. Peluang dan kesempatan mereka raih melalui mobilitas sosial dan perubahan sosial dengan membuktikan identitasnya sebagai bagian integral dari kebangsaan Indonesia. Keberhasilan beberapa tokoh etnis Tionghoa dalam melakukan mobilitas dan perubahan untuk masyarakat multikultural pasca-reformasi, bukan semata faktor *luck* dari keadaan yang memberinya kesempatan. Hogg dan Abram (1988) dengan teori identitasnya, memandang keberhasilan seseorang, salah satunya ditentukan oleh kemampuannya melalui proses *social comparison* dalam rangka mendapatkan pengakuan (*recognition*) dari pihak lain dan persamaan sosial (*social equality*). *Social comparison* sebagai cara untuk menentukan posisi dan status identitas sosialnya, merupakan proses pembelajaran yang menuntut kemampuan individu dalam beradaptasi.

Dalam konteks *social learning theory*, proses *adaptive learning* menunjuk kemampuan individu berusaha untuk membebaskan diri dari masalah yang menghimpit, berusaha keluar dari penderitaan yang dialami dan berusaha ke arah yang lebih baik (Ubaydilah, 2008). Hal ini ditunjukkan para tokoh etnis Tionghoa pasca-reformasi di kota Medan yang berusaha menembus sekat-sekat etnis dan ruang. Bahkan, mereka pun melakukan *generative learning*, sebagai suatu proses pembelajaran untuk mendapatkan dan mewujudkan apa yang diinginkan, seperti: visi, tujuan dan target. Hal ini dibuktikan oleh para tokoh dengan keberhasilannya meraih posisi-posisi elit dalam pemerintahan. Merujuk pada teori *social learning*, beberapa tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini sebagai ikon pluralisme, merupakan model yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran sosial bagi warga kota Medan dalam membangun masyarakat multikultural yang demokratis.

Seluruh paparan di atas, menunjukkan adanya keterkaitan tiga tema dalam penelitian ini (rekonseptualisasi integrasi, formulasi identitas bangsa dan pembangunan masyarakat multikultural) secara fungsional. Gagasan *integrated pluralism* yang diusulkan sebagai alternatif kebijakan yang mengukung *recognition and difference* membuka peluang berfungsinya identitas yang dinamis, "identitas hibrid: keidentitasan Indonesia yang terus menjadi". Hubungan fungsional dari dua tema ini, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan masyarakat multikultural, utamanya dalam membangun masyarakat kota multikultural yang demokratis dengan berprinsip pada *social and political ideal of togetherness in difference*.

Hubungan fungsional antara model integrasi dengan luaran "Integrated-Pluralism dan rekonstruksi identitas bangsa dengan luaran: "Identitas Hibrid: Indonesia yang Menjadi", memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya pembangunan masyarakat multikultural yang di pandang pas untuk kota Medan. Sinergi gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa mengenai tiga tema di atas (rekonseptualisasi integrasi, rekonstruksi identitas bangsa, dan pembangunan masyarakat multikultural, mengarah pada tawaran "Model Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika" sebagai model alternatif yang dipandang pas untuk Kota Medan pasca-reformasi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, ketiga tema (rekonseptualisasi integrasi, formulasi identitas bangsa dan pembangunan masyarakat multikultural) sebagai fokus dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rekonseptualisasi Integrasi:

a. Beberapa model yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa, yakni model: asimilasi alamiah; strategi integrasi; integrasi-asimilasi; integrasi budaya; persatuan Indonesia; dan multikulturalisme, secara sinergi menghasilkan "*integrated pluralism*" sebagai alternatif kebijakan yang dipandang lebih cocok untuk kondisi kota Medan pasca-reformasi 1998. Gagasan *integrated pluralism* ini mengusung *recognition and difference* dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila.

b. *Integrated pluralism* sebagai suatu gagasan, dilatarbelakangi oleh tuntutan dan harapan dari para tokoh dalam membangun integrasi untuk masa depan kota Medan. Tuntutan dari keenam tokoh merupakan kritik terhadap kondisi masa lalu, sekaligus sebagai upaya dalam menghapuskan: diskriminasi; rasialisme; hegemonisme; ketidakadilan; kesenjangan; dan kebodohan. Keenam tuntutan ini lahir dari suatu harapan untuk mewujudkan masa depan kota Medan, yakni: masyarakat yang anti diskriminasi; nasionalisme Indonesia; demokrasi Indonesia; persamaan hak dan kesetaraan; Indonesia sejahtera; dan masyarakat multikultural yang demokratis.

2. Formulasi Identitas Bangsa:

a. Beberapa model identitas yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa, yakni model: identitas dinamis; identitas nasional; identitas budaya; identitas sosial; identitas kelas; dan identitas multikultural, secara sinergi menghasilkan "*identitas hibrid: keidentitasan Indonesia yang terus menjadi*". Identitas hibrid: *keidentitasan Indonesia yang terus menjadi*" sebagai gagasan para tokoh dalam merekonstruksi identitas bangsa, dipandang lebih pas dalam

membangun keidentitasan di era globalisasi, namun tetap pada ruang ke-Indonesia-an.

b. Identitas hibrid: keidentitasan Indonesia yang terus menjadi sebagai suatu gagasan, dilatarbelakangi oleh tuntutan dan harapan dari para tokoh dalam membangun keidentitasan di era globalisasi. Tuntutan dari keenam tokoh merupakan kritik sekaligus upaya dalam menghapus: katagori mayoritas-minoritas yang secara politik telah melahirkan garis pemisah; menghapus berbagai penyakit budaya (prasangka, stereotip, *scape goating*, rasisme, dan etnosentrisme); menghapus diskriminasi di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya); membangun toleransi; membangun sikap dan perilaku produktif; menghapus politisasi etnis. Keenam tuntutan ini lahir dari suatu harapan, yakni: terwujudnya harmonisasi; Indonesia bersatu; tumbuhnya nilai-nilai budaya demokratis; Indonesia Baru (Indonesia yang menjadi); masyarakat multikultural yang sejahtera; dan keidentitasan bangsa berwawasan multi-budaya.

3. Pembangunan Masyarakat Multikultural:

a. Gagasan *integrated pluralism* yang diusulkan sebagai alternatif kebijakan yang mengusung *recognition and difference* membuka peluang berfungsinya identitas yang dinamis, "identitas hibrid: keidentitasan Indonesia yang terus menjadi". Hubungan fungsional dari dua tema ini, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan masyarakat kota multikultural yang demokratis. Gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa mengenai model pembangunan masyarakat multikultural yang dipandang cocok untuk kota Medan pasca reformasi mengarah pada tawaran model multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika

b. Peran dari para tokoh berkenaan dengan upaya pembangunan masyarakat multikultural di kota Medan pasca-reformasi 1998, dimanfaatkan oleh para tokoh dengan mengambil kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial dan perubahan. *Social comparison*, *sosial learning* dan pembelajaran multikultural, mereka manfaatkan untuk mengembangkan *civic competence* melalui model multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika sebagai pilihannya.

B. Saran

1. Para pengambil keputusan pemerintah kota Medan dalam menentukan kebijakan, terutama yang terkait dengan program integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa, hendaknya dapat merumuskan *integrated pluralism* yang kondusif bagi tumbuhnya keidentitasan yang *fluid*, yang dinamis dalam menghadapi perkembangan, perubahan dan kebutuhan zaman. Formulasi identitas bangsa dirumuskan untuk membangun keidentitasan Indonesia yang terus menjadi, dalam mendukung terwujudnya pembangunan masyarakat kota multikultural yang demokratis.
2. Seluruh institusi-institusi kota Medan secara bersama sepakat menetapkan pendidikan multikultural dalam konteks ke-Indonesia-an sebagai program sistemik dalam membangun masyarakat kota multikultural yang demokratis. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk meningkatkan *civic competence* warga kota di era global.
3. Warga kota Medan, untuk dapat belajar menyelami: mengenal, memahami, menghayati, menilai, dan menghargai identitas-identitas yang ada, sehingga terjalin hubungan antaretnis yang harmonis atas dasar *recognition and difference*. Langkah awal ini kondusif untuk membangun masyarakat kota multikultural yang demokratis.



DAFTAR PUSTAKA

- Blusse, L. (1991). *The Role of Indonesian Chinese in Shaping Modern Indonesian Life*, in Indonesia, Cornell Southeast Asia Program.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduce to Theory and Methods*. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.
- Coppel, C. A. (1993). *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Crewell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions*. Thousand oaks: Sage Publication.
- (1976). "Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-Negara Baru". *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Habib, A. (2006). *Dinamika Hubungan Etnis Tionghoa dan Jawa*. Makalah disampaikan pada Seminar Sinologi Tgl. 3-4 Maret 2006. Malang: Lembaga Kebudayaan UMM.
- Lan, T. J. (1998). *Pengalaman Etnik Tionghoa dalam Pemberentukan Identitas (Nasional) Indonesia*. Makalah Simposium Etnis Tionghoa sebagai Minoritas di Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1998. Depok.
- (1999). "Susahnya Jadi Orang Cina: Ke-Cina-an sebagai Konstruksi Sosial", dalam I. Wibowo (ed.), *Harga yang Harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Lincoln, Y.S dan Guba, E.G. (1985). *Naturalistik Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Mackie, J.A.C. (1976). "Anti-Chinese Outbreaksin Indonesia, 1959-68", dalam J.A.C Mackie (ed.). *The Chinese in Indonesia: Five Essays*. Melbourne: Nelson.
- Marger, M.N. (1985). *Race and Ethnic Relations. (American and Global Perspectives)*. Belmont, California: Wadworth Inc.
- Miles, M. B dan Huberman, A. M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UNI Press.

- Parekh, B. (1997). *National Culture and Multiculturalism*. In Kenneth Thompson (ed.) *Media Culture Regulation*. London-Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications in association with the Open University.
- Pattiradjawane, R. L. (2000). "Peristiwa Mei di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Tionghoa di Indonesia", dalam I. Wibowo, *Harga yang Harus Dibayar: Skesta Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Tionghoa.
- Patton, M.Q. (1978). *Utilazion - Focused Evolution*. Beverly Hill, C.A: Sage Publications.
- _____. (1990). *Qualitative Evolution and Research Methods*. (2nd ed.). London: Sage Publication Ltd.
- Pelly, U. (1983). *Urban Migration and Adaption in Indonesia: A Study of Minangkabau and Mandailing Batak Migrants in Medan City North Sumatera*. Michigan: University Microfila International.
- _____. (1986). *Masalah Assimilasi Antar Pelajar Pribumi dan Non Pribumi Pada Sekolah Pembauran Di Kota Madya Medan*. Jakarta: Proyek Dikti.
- _____. (1992). *Pengukuran Itensitas Potensi Konflik dalam Masyarakat Majemuk*. (Makalah). Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH.
- Phinney, J. (2003). "Ethnic Identity and Acculturation", dalam K.Chun, P.B. Organista dan G. Marin. (ed). *Accultaration: Advances in Theory, Measurement, and Applied Research*. Washington DC: American Psychological Association.
- Rakhmat dan Mulyana. (1990). *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Remaja Karya.
- Schermerhorn, R.A. (1970). *Comparative Ethnic Relations: A Framework of Theory and Research*. New York: Random House.
- Setiawan, Deny. (2009). *Integrasi dalam Proses Pembentukan Identitas Bangsa untuk Menumbuhkan Budaya Kewarganegaraan*. (Hibah Penelitian Mahasiswa Program Doktor). Tidak Diterbitkan. Bandung: UPI Bandung.
- Simbolon, P.T. (1991). *Tapping on the Wall: Ethnicity and Marketplace Trade in the Urban Context of Jakarta*. Amsterdam: VU University Press.
- Skinner, G.W. (1967). "The Chinese Minority", in Mc Very Ruth T. *Indonesia, Survey World Cultural Southeast Asia Studies*. Yale: University of Yale.

Susetyo, D.P.B. (1999). *Asimilasi Etnis Cina di Era Reformasi*. Surat Kabar Harian SOLOPOS. 1 Juni 1999.

----- (2002) *Stereotip dan Relasi Antar Etnis Cina dan Etnis Jawa Pada Mahasiswa Di Semarang*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Strauss, A dan Corbin, J. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritis Data*. Terjemahan M. Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tilaar, H.A.R. (2007). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tan, M.G. (1999). *Identitas Etnis Tionghoa Pasca Reformasi*. dalam Majalah Tempo. Edisi 14-22 Februari 1999.

Ubaydilah, A.N. (2008). *Social Learning at Work* [Online]. Tersedia: http://www.e-psikologi.com/industri_detail.asp.171.id [28 Maret 2011]

Verdiansyah, C. (2007). *Jalan Panjang Menjadi WNI Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Williams, L.E. (1960). *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia 1900-1916*. Glencoe Illinois: The Free Press.

Witanto, E. P. (2000). "Mengapa Pemukiman Mereka Dijarah: Kajian Historis Pemukiman Etnis Tionghoa di Indonesia," dalam I. Wibowo. *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Tionghoa.

A. Lampiran
LAMPIRAN I

MATRIK PENGEMBANGAN PEDOMAN PENELITIAN

No.	Fokus Penelitian	Data yang Dibutuhkan	Situs Penelitian	Sumber dan Subyek Penelitian	Teknik Pengumpulan Data
1.	Rekonseptualisasi Integrasi	Gagasan, tuntutan dan harapan dari tokoh etnis Tionghoa, mengenai rekonseptualisasi integrasi pasca-reformasi 1998	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah kota Medan Berbagai kantor dinas terkait Lembaga/organisasi/perkumpulan terkait Perpustakaan Internet 	<ul style="list-style-type: none"> Decision makers Pakar akademisi Tokoh masyarakat kota Tokoh etnis Tionghoa Medan Undang-undang/Peraturan/Surat Keputusan Naskah Dokumen resmi Eksemplar hasil-hasil penelitian Eksemplar hasil seminar/lokakarya/simposium/diskusi/forum ilmiah Photo/rekaman/prosiding Kliping 	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi
2.	Formulasi Identitas Bangsa	Gagasan, tuntutan dan harapan dari tokoh etnis Tionghoa mengenai formulasi identitas bangsa dalam ruang ke-Indonesia-an	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah kota Medan Berbagai kantor dinas terkait Lembaga/organisasi/perkumpulan terkait Perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> Decision makers Pakar akademisi Tokoh masyarakat kota Tokoh etnis Tionghoa Medan Undang-undang/Peraturan/Surat Keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi

		<ul style="list-style-type: none"> • Internet 	<ul style="list-style-type: none"> • Naskah • Dokumen resmi • Eksemplar hasil-hasil penelitian • Eksemplar hasil seminar/lokakarya/simposium/diskusi/forum ilmiah • Photo/rekaman/prosiding • Klipping 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan pengalaman peneliti (hasil observasi dan wawancara) • Analisis dokumen
3.	<p>Proyeksi Pembangunan Masyarakat Multikultural</p> <p>Perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa dalam upaya Pembangunan Masyarakat Multikultural</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah kota Medan • Berbagai kantor dinas terkait • Lembaga/organisasi/perkumpulan terkait • Perpustakaan • Internet 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Decision makers</i> • Pakar akademisi • Tokoh masyarakat kota • Tokoh etnis Tionghoa Medan • Undang-undang/Peraturan/Surat Keputusan • Naskah • Dokumen resmi • Eksemplar hasil-hasil penelitian • Eksemplar hasil seminar/lokakarya/simposium/diskusi/forum ilmiah • Photo /rekaman/prosiding • Klipping 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan pengalaman peneliti (hasil observasi dan wawancara) • Analisis dokumen
	<p>Profil para tokoh etnis Tionghoa berkaitan dengan perannya dalam Pembangunan Masyarakat Multikultural</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah kota Medan • Berbagai kantor dinas terkait • Lembaga/organisasi/perkumpulan terkait • Perpustakaan • Internet 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Decision makers</i> • Pakar akademisi • Tokoh masyarakat kota • Tokoh etnis Tionghoa Medan • Undang-undang/Peraturan/Surat Keputusan • Naskah 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan pengalaman peneliti (hasil observasi dan wawancara) • Analisis dokumen

			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen resmi • Eksemplar hasil-hasil penelitian • Eksemplar hasil seminar/ lokakarya/simposium/diskusi/forum ilmiah • Photo /rekaman/prosiding • Klipping 	
--	--	--	--	--

MATRIK PENGEMBANGAN PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Pertanyaan Penelitian	Fokus Masalah	Aspek yang Diteliti	Sumber Data
<p>Bagaimana perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa di Kota Medan, mengenai integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa untuk Pembangunan Masyarakat Multikultural</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana gagasan dari para tokoh etnis tionghoa mengenai rekonseptualisasi integrasi pasca reformasi 1998? 2. Bagaimanakah tuntutan dan harapan para tokoh dalam membangun integrasi untuk masa depan Kota Medan? 3. Bagaimanakah gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa dalam merekonstruksi identitas bangsa dalam ruang ke-Indonesia-an? 	<p>Rekonseptualisasi Integrasi</p> <p>Formulasi identitas bangsa</p>	<p>Gagasan subyek terfokus mengenai konstruksi integrasi pasca reformasi 1998</p> <p>Tuntutan dan harapan subyek terfokus mengenai konstruksi integrasi pasca reformasi 1998</p> <p>Gagasan subyek terfokus mengenai formulasi identitas bangsa di era globalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Decision makers</i> 2. Pakar akademisi 3. Tokoh masyarakat kota

<p>4. Bagaimanakah tuntutan dan harapan para tokoh dalam membangun identitas kebangsaan pada era globalisasi / kota medan?</p>	<p>5. Bagaimanakah perspektif pemikiran para tokoh dalam mengaggas rekonseptualisasi dan formulasi identitas bangsa berpengaruh terhadap upaya Pembangunan Masyarakat Multikultural pada era demokratisasi di Kota Medan?</p>	<p>6. Bagaimanakah profil dari para tokoh berkenaan dengan upaya Pembangunan Masyarakat Multikultural?</p>	<p>Tuntutan dan harapan subyek terfokus mengenai formulasi identitas bangsa di era globalisasi</p>	<p>Perspektif pemikiran subyek terhadap Pembangunan Masyarakat Multikultural</p>	<p>Peran subyek dalam upaya Pembangunan Masyarakat Multikultural</p>
	<p>Proyeksi Pembangunan Masyarakat Multikultural</p>				

MATRIK PENGEMBANGAN PEDOMAN OBSERVASI

Fokus Penelitian	No.	Catatan Deskriptif	Catatan Reflektif
Rekonseptualisasi integrasi	1.	Gagasan subyek penelitian	
	2.	Tuntutan subyek penelitian	
	3.	Harapan subyek penelitian	
Formulasi identitas bangsa	1.	Gagasan subyek penelitian	
	2.	Tuntutan subyek penelitian	
	3.	Harapan subyek penelitian	
Proyeksi Pembangunan Masyarakat Multikultural	1.	Perpektif pemikiran subyek terhadap Pembangunan Masyarakat Multikultural	
	2.	Peran subyek dalam upaya Pembangunan Masyarakat Multikultural	

MATRIK PENGEMBANGAN PEDOMAN DOKUMENTASI

Fokus Penelitian	No.	Aspek	Dokumen	Analisis Dokumen
Integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa untuk Pembangunan Masyarakat Multikultural	1.	Rekonseptualisasi integrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang/Peraturan/Surat Keputusan • Naskah • Dokumen resmi • Eksemplar hasil-hasil penelitian • Eksemplar hasil seminar/lokakarya/simposium/diskusiforum ilmiah • Photo/rekaman/prosiding • Klipping • Undang-undang/Peraturan/Surat Keputusan • Naskah • Dokumen resmi 	
	2.	Formulasi identitas bangsa		

	<ul style="list-style-type: none"> • Eksemplar hasil-hasil penelitian • Eksemplar hasil seminar/lokakarya/simposium/diskusi/forum ilmiah • Photo/rekaman/prosiding • Klipping 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang/Peraturan/Surat Keputusan • Naskah • Dokumen resmi • Eksemplar hasil-hasil penelitian • Eksemplar hasil seminar/lokakarya/simposium/diskusi/forum ilmiah • Photo/rekaman/prosiding • Klipping 	<p>3. Proyeksi Pembangunan Masyarakat Multikultural</p>	

LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI FOTO**1. Sofyan Tan**

2. Brilian Mokhtar



3. Indra Wahidin



4. Lily Tan



5. Vincent Wijaya



6. J. Anto





UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)
LEMBAGA PENELITIAN
(RESEARCH INSTITUTE)

Jl. Willem Iskandar Psr.V- Kotak Pos No.1589 Medan 20221 Telp (061)6636767 atau (061)6613365 Psw.22B
E-Mail: penelitian_unimed@yahoo.com, Penelitian.unimed@gmail.com

Nomor : 115 /UN33.8/PL/2011

Lamp :

Hal : **Kesediaan Menjadi Sumber Informan**

Kepada :

1. Bpk Sofyan Tan
2. Bpk. Brilian Mukhtar
3. Ibu. Lily Tan
4. Bpk. Vincent Wijaya
5. Bpk. Indra Wahidin
6. Bpk. J. Anto

di
Medan

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Saudara untuk bekerjasama sebagai sumber informan dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama

: Dr. Deny Setiawan, M.Si

NIP

: 196803081993031003

Pangkat/Golongan

: Pembina Tk. I/IVb

Fakultas/Jurusan

: FIS/PP-Kn

Jabatan

: Dosen PPKn UNIMED

Judul Penelitian

: Model Pembangunan Masyarakat
Multikultural Melalui Rekonseptualisasi
Integrasi dan Rekonstruksi Identitas Bangsa
(Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh Etnis
Tionghoa Di Kota Medan)

Masa Penelitian

: Juni s/d September 2011

Sumber Dana

: Dirjen Dikti T.A. 2011, Nomor:

036/SP2H/PL/Dit.litabmas/TV/2011

Lokasi Penelitian

: Kota Medan

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terimah kasih.

Medan, Juni 2011



Eddywan Abd. Sami, M. Si.

NIP. 19640110 198803 1 002

SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA (SP2D)

No. : 129 /UN33.8/PL/2011

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ridwan Abd. Sani, M.Si :Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan,dan atas nama Rektor Unimed, dan dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Deny Setiawan, M.Si :Dosen FIS bertindak sebagai Peneliti/Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) untuk melakukan penelitian yang dibiayai dari Dirjen Dikti Tahun anggaran 2011 sesuai surat perjanjian penugasan Nomor 036/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, tanggal 14 April 2011, DP2M Dikti Depdiknas untuk Penelitian Hibah Bersaing dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan judul: " Model Pembangunan Masyarakat Multikultural Melalui Rekonseptualisasi Integrasi dan Rekonstruksi Identitas Bangsa (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh Etnis Tionghoa di Kota Medan." yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dengan masa kerja 5 (lima) bulan, terhitung mulai bulan Juli s/d Nopember 2011.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar ketentuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SP2D ini, yaitu:

1. Sesuai dengan proposal yang diajukan
2. UU RI No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
3. UU RI No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
4. UU RI No. 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.
5. DIPA No. 0541/023-04.1.01/00/2011, Tanggal 20 Desember 2010, DP2M.

Pasal 3
PENGAWASAN

Untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pekerjaan adalah Lembaga Penelitian Unimed dan Sistem pengendalian Internal (SPI) Unimed.

Pasal 4
NILAI PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian tersebut pada pasal 1 sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap.
2. Tahap pertama sebesar 70% yaitu Rp. 26.250.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan sewaktu Surat Perjanjian Penggunaan dana (SP2D) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Tahap kedua sebesar 30% yaitu Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran/penggunaan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA membayar pajak (PPh) sebesar 15% dari jumlah dana penelitian yang diterima dan fotocopy bukti pembayaran diserahkan ke Lembaga penelitian 2 rangkap.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

4. PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 SP2D ini selambat-lambatnya tanggal 14 Nopember 2011.

Pasal 6
LAPORAN

1. PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian paling lambat tanggal 08 Agustus 2011 dan PIHAK KEDUA menyampaikan draft laporan akhir penelitian paling lambat tanggal 17 Oktober 2011. Untuk pelaksanaan seminar yang dikordinasi oleh Lemlit dan laporan akhir penelitian sebagaimana disebut dalam pasal 1 sebanyak 8 (delapan) eksampir beserta Soft Copy.
2. PIHAK KEDUA harus menyampaikan naskah artikel hasil penelitian dalam bentuk compact disk (CD) untuk diterbitkan pada jurnal Nasional terakreditasi dan bukti pengiriman disertakan dalam laporan.
3. Sebelum laporan akhir penelitian diselesaikan PIHAK KEDUA melakukan diseminasi hasil penelitian melalui forum yang dikordinasikan oleh Lembaga Penelitian dengan kontribusi dana sebesar 1% dari jumlah dana penelitian yang tertulis dalam pasal 2 dan pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
4. Seminar penelitian dilakukan di Lembaga Penelitian dengan mengundang dosen dan mahasiswa sebagai peserta seminar lembaga penelitian.
5. Bahan pelaksanaan seminar dimaksud (makalah) disampaikan ke Lembaga Penelitian sebanyak 2 (dua) exemplar.
6. Bukti pengeluaran keuangan (kuitansi) dan RAB menjadi arsip pada PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap diserahkan ke Lembaga penelitian Unimed dalam bentuk laporan penggunaan dana penelitian paling lambat tanggal 10 Agustus 2011 yang pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
7. Dana penelitian tahap II tidak dapat dicairkan jika bukti pengeluaran keuangan belum diserahkan oleh peneliti, dan dikembalikan ke kas Negara jika melewati batas akhir SP2D.
8. Sistematika Laporan Akhir penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Laporan hasil penelitian yang tersebut dalam pasal 4 harus memenuhi ketentuan sbb:
 - a. Bentuk kuwarto
 - b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan Ditjen Dikti
 - c. Dibawah bagian kulit/cover depan ditulis : Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan surat Perjanjian Hibah Penugasan Penelitian Hibah Bersaing No. 036/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011 tanggal 14 April 2011
 - d. Melampirkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) pada lampiran laporan.

Pasal 7
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA- dalam penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 5 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi:

1. Denda sebesar 1 % perhari dengan maksimum denda sebesar 5 % dari nilai Surat Perjanjian Penggunaan dana (SP2D)
2. Tidak akan diikutsertakan dalam pelaksanaan penelitian atau kegiatan lainnya.
3. Apabila pelaksana program melalaikan kewajiban baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud.
4. Apabila ketua peneliti berhalangan melaksanakan diseminasi karena suatu hal, maka wajib menunjuk salah seorang anggota yang mampu.

Pasal 8

Laporan Akhir Penelitian ini dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 (satu) pada Perpustakaan Nasional
- 1 (satu) pada PDII (LIPI)
- 1 (satu) pada BAPENAS
- 1 (satu) perpustakaan perguruan tinggi
- 1 (satu) pada Lembaga Penelitian Unimed

Demikian surat perjanjian penggunaan dana (SP2D) ini diperbuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dr. Ridwan Abi Sami, M.Si
NIP. 196803081993031017

PIHAK KEDUA

Drs. Deny Setiawan, M.Si
NIP. 196803081993031003

**LAMPIRAN 3:
PERSONALIA TENAGA PENELITI BESERTA KUALIFIKASI, DLL**

A. Ketua Peneliti

1. Identitas Peneliti serta Alamat Lengkap

- a. Nama : Dr. Deny Setiawan, M.Si
 b. NIP : 196803081993031003
 c. Tempat/tanggal lahir : Bandung/ 08 Maret 1968
 d. Pekerjaan : Dosen Jur. PPKn FIS UNIMED
 e. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/IV a
 f. Pangkat : Penata Tingkat I
 g. Pendidikan Terakhir : Doktor Pendidikan IPS
 h. Bidang Keahlian : Pendidikan IPS
 i. Alamat : Jl. Juang 45 No. 12 Medan Estate Medan 20371
 j. Alamat Kantor : Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate Medan 20221
 k. Telepon Kantor/Hp : 061 (6625973) – 082163850433

2. Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
S1	IKIP Bandung	1992	PPKn
S2	UGM Yogyakarta	1998	Ketahanan Nasional
S3	UPI Bandung	2011	Pendidikan IPS

3. Pengalaman Kerja dalam Penelitian dan Pengalaman Profesional serta Kedudukan saat ini

Institusi	Jabatan	Periode
PPKn FIS UNIMED	Ketua Jurusan	2002-2006
Center for Civic Education	Koordinator Wilayah	2002-2006
PPKn FIS UNIMED	Koordinator Program Hibah Kompetisi (PHK) A1 DIKTI	2004-2006
Lemlit UNIMED	Tim Penyeleksi Proposal Penelitian	2002-2006
PPKn FIS UNIMED	Ketua Penyunting Jurnal PKn	2004-sekarang
FIS UNIMED	Sekretaris Penyunting Jurnal JUPIIS	2008-sekarang
Program Studi PKn SPs UPI Bandung	Editor Jurnal Acta Politicus	2007-sekarang

4. Daftar Publikasi yang Relevan

Tahun	Penerbit	Judul Riset
2009		Integrasi Dalam Proses Pembentukan Identitas Bangsa Untuk Menumbuhkan Budaya Kewarganegaraan (Penelitian, Hibah

2009		Penelitian Mahasiswa Program Doktor) Penerapan Model Controversial Issues Dalam Pembelajaran Studi Masyarakat Indonesia (Penelitian Teaching Grand FIS UNIMED)
2008		Strategi Budaya Lokal Sebagai Daerah Tujuan Wisata Dalam Merespon Globalisasi Modernitas : Kajian Sosiologi Pariwisata Dalam Perspektif Identitas dan Integrasi
2010		Integrasi dan Identitas Masyarakat Multikultural (Pemakalah Dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh FIS UNIMED

Medan, 14 November 2011


Dr. Deny Setiawan, M.Si



B. Anggota Peneliti I**1. Identitas Peneliti serta Alamat Lengkap**

- a. Nama Lengkap : Drs. Onggal Sihite, M.Si
 b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 c. NIP/Golongan : 130 860 014
 d. Strata/Jabatan Fungsional : S2/Lektor
 e. Jabatan Struktural : -
 f. Fakultas/Jurusan : Antropolgi/Pascasarjana Unimed
 g. Bidang Ilmu : Etnokultural
 h. Alamat Kantor : Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate
 i. Alamat Rumah : Kompl. Veteran RI Blok B/15
 Medan Estate
 j. Telepon/Faks : 08126574279

2. Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1.	S1	ISI Yogyakarta	1988	Seni Lukis
2.	S2	UI Jakarta	1996	Antropologi

Pengalaman Riset dan Publikasi

No.	Judul Riset	Tahun
1	Studi Anak Jalanan di Semarang	2006
2	Kerjasama dan Konflik Masyarakat Pelaku Kesenian Batik Kampung Taman	2005
3	Peta Etnik dan Agama dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara	2007

Medan, 14 November 2011



Drs. Onggal Sihite, M.Si

C. Anggota Peneliti II

1. Identitas Peneliti serta Alamat Lengkap

- a. Nama : Dra. Yusna Melianti, M.H
 b. NIP : 196107191987031001
 c. Tempat/tanggal lahir : Aceh Tenggara/ 10 Oktober 1959
 d. Pekerjaan : Dosen Jur. PPKn FIS UNIMED
 e. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/IV b
 f. Pangkat : Penata Tingkat I
 g. Pendidikan Terakhir : Magister Hukum
 h. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
 i. Alamat : Jl. Perumahan Taman Ubud Blok B No. 09
 j. Alamat Kantor : Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate
 Medan 20221
 k. Telepon Kantor/Hp : 061 (6625973) – 081361416441

2. Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
S1	IAIN-SU	1985	Hukum Islam
S2	UI Jakarta	2000	Hukum Tata Negara

3. Pengalaman Kerja dalam Penelitian dan Pengalaman Profesional serta Kedudukan saat ini

Institusi	Jabatan	Periode
MKU UNIMED	Sekretaris MKU	2001-2005
PPKn FIS UNIMED	Ketua Jurusan	2006-2010
UNIMED	Integrasi Masyarakat Pendatang Terhadap Budaya Melayu	2003
UNIMED	Peran DPRD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Binjai (Hibah Bersaing DIKTI)	2005

Medan, 14 November 2011


 Dra. Yusna Melianti, M.H

D. Anggota Peneliti III**1. Identitas Peneliti serta Alamat Lengkap**

- a. Nama : Drs. Liber Siagian, M.Si
 b. NIP : 196309171990031003
 c. Tempat/tanggal lahir : B. Batu / 17 September 1964
 d. Pekerjaan : Dosen Jur. PPKn FIS UNIMED
 e. Jabatan/Golongan : Lektor/III d
 f. Pangkat : Penata Tingkat I
 g. Pendidikan Terakhir : Magister Ketahanan Nasional
 h. Bidang Keahlian : Pendidikan Kewarganegaraan
 i. Alamat : Jl. Nilam 19 No. 09 Perumnas Simalingkar
 Medan
 j. Alamat Kantor : Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate
 Medan 20221
 k. Telepon Kantor/Hp : 061 (6625973) – 081397669915

2. Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
S1	IKIP Medan	1988	PMPKn
S2	UGM Yogyakarta	2004	Ketahanan Nasional

3. Pengalaman Kerja dalam Penelitian dan Pengalaman Profesional serta Kedudukan saat ini

Institusi	Jabatan	Periode
PPKn FIS UNIMED	Sekretaris Jurusan	2006-2008
FIS UNIMED	Pembantu Dekan III	2008-2010
UNIMED	Integrasi Sosial Masyarakat majemuk Kota Medan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional	2004
UNIMED	Integrasi Sosial Masyarakat Majemuk (Jurnal Pascasarjana UGM)	2005
UNIMED	Pertindungan Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya (Jurnal Kewarganegaraan)	2008

Medan, 14 November 2011

Drs. Liber Siagian, M.Si

LAMPIRAN 4:

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN HIBAH BERSAING T.A 2011

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN / URAIAN/ SUB URAIAN	SATUAN BILAY		JUMLAH	
1	Persiapan, Analisis Situasi Awal dan Pembagian Tugas				
	Pertemuan dan pembagian tugas tim peneliti (2hr x 4 org)	8	60,000	480,000	
	Pertemuan dan Analisis studi awal (2hr x 4 org)	8	60,000	480,000	
	Survei Lokasi (4 org x 3 hr)				
	Pelaksanaan (gaji dan Upah)	Oh	12	225,000	2,700,000
2	1 Orang ketua peneliti (20 jam @ Rp. 3500 x 40 minggu)	keg	800	3,500	2,800,000
	3 orang anggota peneliti (15 jam @ 3.000 x 40) x 3 org anggota		600	9,000	5,400,000
3	Peralatan				
	Block Note (70 x @ Rp. 6.000)		70	5,500	385,000
	Alat Tulis (70 x @ Rp. 2.500)		70	2,500	175,000
	Penggunaan literatur atau media - media pendukung				
	Sewa Kamera Digital (samsung 4.5 mega pixel)	keg	1	2,750,000	2,750,000
	Penggunaan Bahan (60 x @ Rp. 3000)		1	1,800,000	1,800,000
	Recorder wawancara		60	8,000	480,000
4	Bahan Habis		2	772,500	1,545,000
	kertas HVS 80 gram				
	Amplop AA Putih		13	30,000	390,000
	Cartride Printer HP		2	15,000	30,000
5	Casette Handycam durasi 360 menit		3	350,000	1,050,000
	Cartride Canon Pixma 5000		3	65,000	195,000
	Lem, gasing, bad nama peneliti, dll		1	575,000	575,000
	Perjalanan	keg	1	1,200,000	1,200,000
6	Uang Transport Ketua Panitia		1	550,000	550,000
	Uang Transport Anggota Peneliti		3	450,000	1,350,000
	Uang Transport Validator		2	250,000	500,000
7	Pertemuan / Persestasi				
	makan dan snack Penyusunan Proposal penelitian (4org x 3 kali)		12	70,000	840,000
	makan dan snack Penyusunan Rencana Kegiatan (4org x 3 kali)		12	70,000	840,000
	makan dan snack Pelatihan Kegiatan yang sedang berlangsung (4org x 3 kali)		12	70,000	840,000
	makan dan snack analisis data (4 org x 3 kali)		12	70,000	840,000
	Seminar proposal dan Hasil (Lumpsum) 1 x 2 hr)		2	1,300,000	2,600,000
	makan dan snack penyusunan laporan (4 org x 5 kali)		20	70,000	1,400,000
	makan dan snack revisi naskah (4 org x 1 hari)				
	Evaluasi kegiatan dan publikasi	keg	4	70,000	280,000
	Penulisan Laporan (2 org x 3 hr)				
7	Analisis data keseluruhan		6	70,000	420,000
	Penggunaan Laporan (200 lbr x Rp. 150 x 50 bh)	keg	1	1,425,000	1,425,000
	Pembuatan Caper Depan Laporan Penelitian (10000x50)		50	30,000	1,500,000
	pengiriman Laporan ke Ditri		50	10,000	500,000
	Publikasi jurnal nasional	keg	1	180,000	180,000
	JUMLAH	keg	1	1,000,000	1,000,000
					37,500,000

TOTAL PENGGUNAAN UANG PENELITIAN HIBAH BERSAING T.A 2011:

DESKRIPSI PENGELUARAN	JUMLAH PENGELUARAN
Survei Lokasi	3,660,000,-
Pelaksanaan (gaji dan upah)	8,200,000,-
Peralatan	7,135,000,-
Bahan Habis	3,440,000,-
Perjalanan	2,400,000,-
Presentasi/Seminar	7,640,000,-
Laporan/Publikasi	5,025,000,-
Lain-lain	-
Total keseluruhan	37.500.000,-
<i>(Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)</i>	

B. DRAFT ARTIKEL ILMIAH

MODEL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL MELALUI REKONSEPTUALISAI INTEGRASI DAN REKONSTRUKSI IDENTITAS BANGSA (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh Etnis Tionghoa di Kota Medan)

Oleh: Deny Setiawan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan: (1) rekonseptualisasi integrasi pasca-reformasi di Kota Medan; (2) rekonstruksi identitas bangsa di era globalisasi; dan (3) gagasan para tokoh dalam memproyeksikan pembangunan masyarakat multikultural di Kota Medan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dalam situasi yang alami, wawancara dilakukan secara *purposive*, dan studi dokumentasi dilakukan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder. Temuan penelitian menunjukkan (1) perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa dalam merekonseptualisasikan integrasi mengarah kepada pilihan "*integrated-pluralism*" sebagai suatu kebijakan yang dipandang lebih sesuai dalam membangun integrasi pasca-reformasi di kota Medan, (2) sinergi gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa mengenai rekonstruksi identitas bangsa menghasilkan suatu formulasi identitas bangsa yang lebih pas bagi Indonesia di era globalisasi, yakni identitas hibrid: "Indonesia yang terus menjadi". Formulasi ini menggambarkan suatu identitas yang *fluid* dan dinamis mengarah kepada identitas kebangsaan yang non-ras, tidak rigid dan tidak statis terhadap perubahan, perkembangan dan kebutuhan zaman; dan (3) *Integrated-pluralism* dan identitas hibrid yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa memberikan kontribusi yang kondusif terhadap pembangunan masyarakat multikultural di kota Medan pasca-reformasi. Gagasan para tokoh etnis Tionghoa mengenai model pembangunan masyarakat multikultural, menawarkan alternatif model yang dipandang cocok untuk kota Medan pasca reformasi yakni model "Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika.

Kata Kunci: Integrasi, Identitas, Multikulturalisme

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Berawal dari tuntutan dan harapan pada saat reformasi meledak di bulan Mei 1998, sebuah tuntutan akan adanya perubahan dan sebuah harapan akan munculnya kehidupan demokratis yang kondusif di republik ini. Namun tuntutan dan harapan tersebut, teriris oleh suatu tragedi: kerusuhan, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap sesama anak bangsa. Tragedi kemanusiaan 13-15 Mei 1998 telah mencoreng citra bangsa yang beradab,

menjadi bangsa yang beringas. Salah satu mereka yang menjadi korban (di-korban-kan) dalam kerusuhan tersebut, adalah mereka yang selama ini kita golongkan sebagai non-pribumi, yaitu minoritas etnis Tionghoa.

Reformasi yang selayaknya adalah suatu gerakan pembaharuan dalam mencari perubahan bentuk ideal kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, justru diwarnai oleh semacam tumpuhan dendam, yaitu dendam terhadap rezim yang selama 32 tahun mengukung kebebasan hingga menjaral pada dendam terhadap etnis Tionghoa yang selama ini dianggap diistimewakan.

Bermula dari masa kolonial melalui politik *divide et impera*, segregasi dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini memang telah diciptakan. Berlanjut pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, yang justru melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan rezim, telah mengentalkan segregasi dan diskriminasi hingga melestarikan *prejudice* atau prasangka dan *stereotype* pada tataran *private space*.

Hubungan antar etnis yang tidak harmonis ini, diperparah ketika suatu program pembangunan yang dicanangkan rezim mengalami kegagalan, yang kemudian rezim menuding segelintir etnis Tionghoa dianggap sebagai biang keladi kegagalan tersebut. Pengkambinghitaman ini telah menyulut potensi konflik yang bersifat laten pada dimensi horizontal menjadi konflik terbuka, karena dipicu oleh faktor vertikal seperti kecemburuan ekonomi dan kepentingan politik elit. Namun lagi-lagi konflik tersebut berulang terjadi, seakan-akan mengikuti dinamika dari sejarah bangsa ini.

Tiga belas tahun reformasi telah bergulir, memang pasca kerusuhan Mei 1998 sepertinya sudah ada upaya dalam memperbaiki hubungan antar etnis antara mayoritas (pribumi) dengan minoritas (etnis Tionghoa). Pemerintah reformasi pun sudah mengeluarkan berbagai peraturan yang mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, yang antara lain : Kepres No. 6/2000 tentang Pembatalan Inpres No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Inpres No.26/1998 tentang Penghapusan Penggunaan Istilah Pri dan Non Pri, Surat Edaran Mendagri No.471.2/1269/SJ tanggal 18 Juni 2002 perihal SBKRI, Surat Edaran Dirjen Imigrasi Depkeh dan HAM No. P.U.M. 01. 10. 0626 tanggal 14 April 2004 tentang SBKRI bagi Permohonan Paspor RI, Surat Edaran Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan No. 6 Tanggal 11 Juni

2004 tentang SBKRI dalam Dokumen Perbankan, Serta Kepres No. 19/2002 tentang Ditetapkannya Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional. Bahkan kesulitan dalam memperoleh status WNI telah teratasi dengan adanya kebijakan pemerintah dalam UU Kewarganegaraan No. 12/2006.

Banyak elit yang mengatakan undang-undang tersebut merupakan hal yang revolusioner. Namun juga ada yang mengatakan undang-undang tersebut masih harus terus disosialisasikan, sehubungan dengan umurnya yang masih berusia lima tahun. Namun sayangnya, dalam praktik di lapangan masih menimbulkan pertanyaan, apakah adanya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12/2006 tersebut dapat menjamin kemudahan dalam memperoleh status WNI, khususnya bagi etnis Tionghoa. Pertanyaan ini sama halnya dengan masih perlukah SBKRI bagi etnis Tionghoa yang lahir dan berdomisili di Indonesia. Beberapa pakar justru membuktikan bahwa dalam praktiknya di lapangan SBKRI masih terus ditanyakan oleh pegawai Dinas Kependudukan kepada etnis Tionghoa yang hendak mengurus surat atau pun dokumen yang berkaitan dengan kependudukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disatu pihak negara menginginkan pembauran dan integrasi bangsa, namun dilain pihak perlakuan diskriminatif masih berlangsung baik secara formal maupun informal.

Fakta di atas, hanyalah merupakan salah satu masalah terkendalanya integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa, malah merupakan *contraditio in terminis* dari konsep Bhineka Tunggal Ika (*unity in diversity*). Untuk itu di alam reformasi ini, masalah integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa, masih merupakan suatu upaya yang urgen untuk dilakukan sebagai input dalam mendukung agenda reformasi.

Dalam konteks dunia akademis, tema-tema integrasi dan identitas bangsa pasca reformasi masih perlu banyak dilakukan guna mencari gagasan dan model yang pas bagi pembangunan masyarakat multikultural yang demokratis. Namun penelitian mengenai integrasi dan identitas di kalangan etnis Tionghoa yang berkaitan secara khusus dengan *civic culture* (budaya kewarganegaraan), masih belum banyak dilakukan. Kajian *civic culture* di kalangan etnis Tionghoa merupakan sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Alasannya bahwa sebaik apapun kebijakan yang dikeluarkan rezim dalam ruang publik yang berkenaan dengan

integrasi dan identitas, masih akan terkendala manakala pada tataran *private space* belum tumbuh budaya kewarganegaraan di kalangan subyek-subyek individu etnis Tionghoa itu sendiri. Pembangunan Masyarakat Multikultural bagi generasi etnis Tionghoa di Indonesia pasca reformasi, merupakan wahana bagi tumbuhnya kesadaran secara kolektif akan jatidirinya sebagai bagian dari generasi bangsa ini. Bahkan melalui *civic culture* dalam konteks pengembangan karakter dan nilai-nilai demokratis, diharapkan mereka dapat menempatkan identitasnya itu secara harmoni dalam ruang ke-Indonesia-an.

Pemikiran ini menjadi gagasan awal peneliti untuk mengkaji keberadaan komunitas etnis Tionghoa, khususnya para tokoh etnis Tionghoa di Kota Medan, dalam kaitannya dengan rekonseptualisasi integrasi dan formulasi identitas, serta pengaruhnya terhadap Pembangunan Masyarakat Multikultural pasca reformasi 1998.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diajukan: "Bagaimanakah perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa di Kota Medan, mengenai integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa untuk menumbuhkan budaya kewarganegaraan?"

Rumusan masalah ini selanjutnya, dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang difokuskan pada tiga tema besar, yakni: (1) rekonseptualisasi integrasi, dengan pertanyaan penelitian: bagaimanakah gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa mengenai rekonseptualisasi integrasi pasca reformasi 1998?; (2) formulasi identitas bangsa, dengan pertanyaan penelitian: bagaimanakah gagasan dari para tokoh dalam merekonstruksi identitas bangsa dalam ruang ke-Indonesia-an?; dan (3) pembangunan masyarakat multikultural, dengan pertanyaan penelitian: apakah perspektif pemikiran para tokoh dalam menggagas rekonseptualisasi integrasi dan formulasi identitas bangsa berpengaruh terhadap Pembangunan Masyarakat Multikultural pada era demokratisasi di kota Medan?

3. Tujuan Penelitian

Dari masalah pokok di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan: (1) memperoleh gambaran faktual tentang perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa mengenai integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa untuk

menumbuhkan budaya kewarganegaraan pasca reformasi di Kota Medan; (2) menghasilkan rekonseptualisasi integrasi dan formulasi identitas bangsa yang dipandang pas bagi tumbuhnya budaya kewarganegaraan yang demokratis dalam ruang ke-Indonesia-an; (3) menemukan pola pembangunan masyarakat multikultural yang dilakukan para tokoh etnis Tionghoa di kota Medan sebagai upaya pengembangan karakter warga negara yang demokratis.

B. Kajian Teoretis

1. Integrasi Etnis Tionghoa di Indonesia

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional terdapat dua aliran yang sudah sering kita kenal yaitu, asimilasionis dan pluralis dalam meletakkan identitas golongan minoritas, terutama yang berkaitan dengan penerapan suatu kebijakan. Wirth (1945: 347) mengatakan bahwa kebijakan asimilasionis merupakan upaya untuk menggabungkan para anggota minoritas ke dalam masyarakat lebih luas dengan cara melarang kebudayaan mereka dan mengharuskannya mengadopsi sistem nilai dan gaya hidup kelompok dominan atau superordinat. Hal tersebut adalah berbeda dengan upaya yang dianut oleh kaum pluralis. Kelompok dominan bersikap toleran terhadap kebudayaan kelompok subordinat, atau dengan kata lain golongan minoritas diperkenankan mempertahankan kebudayaan mereka. Jika diperbandingkan, maka kebijakan asimilasi yang diterapkan bagi orang Tionghoa di Indonesia dengan berbagai suku-bangsa yang ada di Indonesia, terdapat perbedaan. Untuk orang-orang Tionghoa yang telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia berlaku kebijakan yang bersifat asimilasionis; sedangkan untuk berbagai suku-bangsa di Indonesia cenderung berlaku paham pluralis. Namun dalam perjalannya, ke dua kebijakan tersebut, sejak jaman kolonial, Orde Lama, hingga berakhirnya rezim Orde Baru, dalam penerapannya selalu menimbulkan masalah berkenaan dengan posisi etnis Tionghoa di Indonesia. Begitu dianggap penting persoalan etnis Tionghoa di Indonesia, sehingga memunculkan suatu isu khusus, yang dikenal dengan istilah "Masalah Cina".

Blusse (1991: 1) mengemukakan bahwa "Masalah Cina" merupakan isu yang hangat dibicarakan dalam masyarakat Indonesia, dan tanpa bisa dihindari,

persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan; apakah etnis Tionghoa di Indonesia harus *survive* pada identitas kebudayaan mereka sendiri, atau harus berintegrasi ke dalam kebudayaan Indonesia. Namun pertanyaan ini belum bisa dijawab final, karena sejak jaman kolonial hingga reformasi 1998, kerusuhan antar etnis - dalam hal ini terhadap etnis Tionghoa di Indonesia - selalu berulang terjadi, seolah-olah terus mengikuti dinamika sejarah Indonesia.

Mengapa kerusuhan terhadap etnis Tionghoa berulang kali terjadi di Indonesia? Kata kuncinya adalah segregasi atau keterpisahan. Pada dasarnya memang sudah menjadi niat penguasa kolonial untuk mencegah terjadinya persatuan antar etnis. Pemerintah kolonial menganggap bahwa monopoli dan otoritas mereka akan terancam apabila berbagai kelompok etnis yang ada saat itu menggabungkan kekuatan untuk melawan mereka (Simbolon, 1991: 40).

Kebijakan penting yang ikut meningkatkan keterpisahan etnis Tionghoa dari masyarakat pribumi adalah sistem status yang membagi stratifikasi sosial secara hierarkhis menjadi tiga kelompok golongan, yaitu: golongan Eropa di atas, golongan Timur Asing di tengah, dan golongan pribumi di bawah. Masing-masing golongan memiliki status dan hak-hak yang berbeda, dan secara umum orang Tionghoa yang masuk kategori Timur Asing berada pada posisi yang lebih menguntungkan daripada golongan pribumi (Coppel, 1993: 13). Oleh karena itu, asimilasi dengan golongan pribumi akan mengakibatkan penurunan status sosial dan sekaligus kehilangan hak-hak istimewanya.

Keterpisahan etnis Tionghoa di Hindia Belanda juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi pemerintah kolonial. Penguasa waktu itu memberikan berbagai monopoli dari penarikan pajak, distribusi perdagangan komoditas tertentu, dan lain-lain kepada segelintir orang Tionghoa yang kaya dan mempunyai koneksi dekat dengan mereka. Di satu pihak dengan memanfaatkan orang Tionghoa, para penguasa kolonial memperoleh hasil pajak yang besar tanpa harus kerja keras sendiri. Di pihak lain, individu-individu Tionghoa yang menjadi kroni penguasa tersebut juga berhasil membuat keuntungan yang tidak kalah besarnya dari kolusi itu (Williams, 1960: 24-27). Namun demikian, setiap kali muncul kritik atau protes terhadap penurunan kesejahteraan penduduk pribumi, para pejabat kolonial seringkali mengkaitkannya dengan orang Tionghoa yang

kegiatannya sebagai pemungut cukai/pajak dan rentenir bisa mudah dituduh menggerogoti kesejahteraan rakyat.

Dua kebijakan di atas, hanya merupakan contoh, bahwa kebijakan pemerintah kolonial mempunyai pengaruh yang besar dalam membuat golongan etnis Tionghoa terpisah dari masyarakat Indonesia. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, pemerintah mulai melancarkan proses pribumisasi di sektor ekonomi untuk mengurangi kekuatan ekonomi etnis Tionghoa dan mengembangkan wiraswasta pribumi. Tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1959 yang melarang orang Tionghoa melakukan perdagangan di pedesaan (Mackie, 1976: 77). Larangan tersebut mengakibatkan eksodusnya orang-orang Tionghoa ke perkotaan, dan dengan begitu semakin mempertegas dikotomi domisili.

Orde Baru pun tidak berbeda dari Orde Lama. Walaupun dalam ruang publik (*public-space*), Orde Baru menghendaki kebijakan asimilasi, namun dalam ruang pribadi (*private-space*) masyarakat masih melakukan diskriminasi. Karena itu, dalam batas tertentu, Orde Baru cenderung menerapkan kebijakan kesetaraan legal daripada kebijakan koeksistensi (*pluralisme-budaya*) terhadap kelompok minoritas etnis Tionghoa. Olsen menggambarkan kesetaraan legal sebagai kebijakan yang munafik, sebab meskipun dalam ruang publik ada pengakuan kesetaraan, tetapi dalam ruang privat malah terjadi permusuhan terhadap etnik minoritas. Kesetaraan legal merupakan kebijakan mendua; yang satu pihak, menetapkan kendala legal terhadap diskriminasi formal oleh organisasi terhadap kelompok minoritas, sedangkan di lain pihak menerima diskriminasi informal dalam hubungan antar-pribadi dengan individu etnik minoritas (Habib, 2006).

Dari gambaran di atas, memperlihatkan segregasi dan diskriminatif telah berlangsung lama. Bahkan sampai pada tanggal 13-15 Mei 1998, segregasi dan diskriminatif itu diwarnai oleh kerusuhan yang oleh Pattiradjawane (2000: 213) dinilai sebagai titik terendah dalam sejarah etnis Tionghoa di Indonesia.

Apa yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah turut memberikan kontribusi terhadap keterpisahan etnis Tionghoa di Indonesia. Masalah konflik antar etnik di Indonesia adalah masalah yang lebih banyak berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Pernyataan ini sekaligus

menunjuk pemerintah sebagai aktor yang mempunyai peran sentral dalam melakukan proses integrasi sosial. Namun sebaliknya dalam *private-space*, individu sebagai warga negara, juga mempunyai peran penting dalam mendukung terciptanya hubungan antar etnik yang intergratif.

2. Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia

Dalam pandangan teori identitas sosial, keinginan untuk memiliki identitas sosial yang positif dipandang sebagai motor psikologik penting dibalik tindakan-tindakan individu dalam setiap interaksi sosial. Hal tersebut berlangsung melalui proses *social comparison* yang dipandang sebagai cara untuk menentukan posisi dan status identitas sosialnya. Proses *social comparison* merupakan serangkaian perbandingan dengan orang/kelompok lain yang secara subyektif membantu individu membuat penilaian khusus tentang identitas sosialnya dibanding identitas sosial yang lain (Hogg dan Abram, 1988). Selalu ada upaya-upaya untuk mempertahankan identitas sosial yang positif dan memperbaiki citra, jika ternyata identitas sosialnya sedang terpuruk baik dalam skala individual maupun skala kelompok. Dalam konteks makro sosial (kelompok, masyarakat) maka upaya mencapai identitas sosial positif dicapai melalui: mobilitas sosial dan perubahan sosial.

Mobilitas sosial adalah perpindahan individu dari kelompok yang lebih rendah ke kelompok yang lebih tinggi. Mobilitas sosial hanya mungkin terjadi jika peluang untuk berpindah itu cukup terbuka. Namun demikian jika peluang untuk mobilitas sosial tidak ada, maka kelompok bawah akan berusaha meningkatkan status sosialnya sebagai kelompok. Pilihan pertama adalah dengan menggeser statusnya ke tingkat lebih atas. Kalau kemungkinan menggeser ke posisi lebih atas tidak ada, maka usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan citra mengenai kelompok agar kesannya tidak terlalu jelek (Hogg dan Abram, 1988).

Dinamika pencarian identitas etnis Tionghoa sebenarnya terkait perlakuan yang diterima dari pihak penguasa. Sarwono (1999) dan Susetyo (2002) mengemukakan bahwa pada jaman pemerintahan kolonial Belanda, perbedaan status etnis diberlakukan dengan tegas. Orang Eropa diberi status tertinggi dan mempunyai hak dan fasilitas terbaik. Orang Tionghoa yang waktu itu disebut orang Timur Asing (*vreemde osterlingen*) mempunyai status di bawah orang

Eropa, namun berada di atas golongan pribumi (*inlander*). Dengan demikian golongan pribumi diberi status yang paling rendah (kecuali bangsawan yang diberi status seperti Eropa). Dalam statusnya yang di tengah ini, orang Tionghoa meningkatkan citranya dengan melakukan mobilitas sosial, yaitu mengadopsi berbagai identitas yang melekat pada orang Eropa ataupun Belanda. Dengan demikian, yang menonjol pada orang Tionghoa di era kolonial Belanda adalah perpaduan antara identitas Tionghoa tradisional dan identitas ala Eropa.

Namun demikian situasinya nampak berbeda sama sekali ketika memasuki era kemerdekaan. Persoalan yang mengedepan terutama adalah tentang kepastian status kewarganegaraan. Dikemukakan oleh Coppel (1994), orang Tionghoa pada masa itu terjepit antara berbagai kepentingan baik yang berskala nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia pada waktu itu tidak bisa segera memberikan kepastian. Bahkan undang-undang yang mengatur hal ini ditengarai akan membatasi jumlah orang Tionghoa yang bisa menjadi warganegara. Sementara pemerintah RRC pada waktu itu masih memberlakukan kewarganegaraan ganda bagi orang Tionghoa di perantauan. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, sejumlah tokoh Tionghoa mendirikan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang inti perjuangannya ingin menempatkan etnis Tionghoa sejajar dengan etnis/suku lain dengan konsep integrasi. Sementara kelompok Tionghoa yang lain menghendaki asimilasi sebagai solusi. Namun demikian sejak terjadinya peristiwa pemberontakan PKI 1965, keadaannya berbalik sama sekali. Konsep integrasi secara politis telah dikategorikan sebagai bagian dari ideologi komunis sosialis (Lan, 1998). Keadaan ini telah menjadikan pilihan satu satunya yang diberi ruang oleh penguasa adalah dengan asimilasi. Sebenarnya disinilah akar permasalahannya, mengapa pencarian identitas etnis Tionghoa menjadi sedemikian rumit. Pasca peristiwa 1965, status etnis Tionghoa sedang dalam kondisi terendah. Mereka dipojokkan oleh penguasa maupun masyarakat bukan Tionghoa. Pada saat itu berbagai kekerasan massa anti Tionghoa mulai marak.

Mengacu pada teori identitas sosial, maka ketika suatu kelompok citranya sedang terpuruk selalu ada upaya untuk bereaksi terhadap keadaan dalam rangka meraih kembali citra/identitas sosial yang positif. Adapun modus yang biasa

terjadi adalah dengan mobilitas sosial dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang dilakukan nampaknya cukup bervariasi tergantung dari persepsi masing-masing kelompok tentang bagaimana harus memperbaiki citra. Salah satu reaksi yang muncul adalah dengan eksodus ke luar negeri seperti ke Belanda, kembali ke RRC dan sebagainya. Sementara kelompok asimilasi nampaknya mendapat angin, salah satu tokohnya Junus Jahja mendorong orang Tionghoa untuk memeluk agama Islam sebagai kunci pembauran total.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susetyo (2002), ditemukan juga bahwa ada kecenderungan subyek dari etnis Tionghoa untuk mengadopsi sifat-sifat positif dari etnis di luar dirinya sebagai identitas sosialnya. Hal ini nampak menjadi salah satu solusi dalam pencarian identitas ini. Pada akhirnya mereka akan menemukan identitas Tionghoa yang Jawa, Tionghoa yang Batak, Tionghoa yang Padang, Tionghoa yang Sunda dan sebagainya. Namun demikian ketika mereka tidak dapat menemukan hal-hal yang mendukung perbaikan citra dirinya sebagaimana hal di atas, banyak juga yang akhirnya pindah ke luar negeri menjadi kelompok yang beridentitas kosmopolitan, internasional, lintas etnis maupun lintas negara.

Selain melalui mobilitas sosial, nampaknya juga ada kecenderungan melakukan perubahan sosial, yaitu dengan memperbaiki citra dari ke-Tionghoa-an. Salah satunya adalah dengan menggeser orientasi ke-Tionghoa-an dari yang berorientasi tradisional menjadi ke-Tionghoa-an yang berorientasi nasional. Kecenderungan ini lebih banyak berkembang di kalangan generasi yang lebih muda, di mana mereka sudah tidak begitu menguasai lagi adat istiadat Tionghoa tradisional, tidak bisa berbicara dalam bahasa mandarin, dan memiliki pendidikan yang modern. Artinya pada masa kini, ke-Tionghoa-an tampil dalam kemasan dan citra baru yang lebih bisa diterima dan tidak lagi berasosiasi dengan masa lalu yang traumatis.

3. Pembangunan Masyarakat Multikultural

Transisi dari pemerintahan nondemokratis menuju pemerintahan demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan. Dari kondisi latar belakang persatuan nasional, proses transisi dari pemerintah nondemokratis menuju pemerintahan demokratis melalui tiga tahap.

Pertama, tahap persiapan yang ditandai adanya perjuangan politik untuk menjatuhkan rezim nondemokratis. Kedua, tahapan keputusan, dimana elemen dari tertib atau kelembagaan demokrasi telah terbentuk. Ketiga, tahapan konsolidasi, dimana lembaga dan praktek demokrasi mendarah daging dalam budaya politik (Sorenson, 2003: 81).

Apabila memperhatikan kebutuhan mendasar dari konsolidasi demokrasi yang ketiga, yaitu lembaga dan praktek demokrasi telah membudaya, maka upaya membudayakan budaya politik demokrasi atau budaya politik kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan suatu keharusan mutlak. Hal ini di akui Bahmuller (1997: 216-221), bahwa perkembangan demokrasi tergantung oleh sejumlah faktor yang menentukan, yakni: "*the degree of economic development, ... a sense of national of national identity, ... historical experience and element of civic culture*". Ini menunjukkan, faktor yang ketiga yakni *civic culture and history* memiliki kontribusi terhadap perkembangan demokrasi dalam hal bahwa pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan demokrasi lebih lanjut, yaitu sebuah demokrasi yang konsolidasi. Winataputra dan Budimansyah (2007: 220) menjelaskan: *Civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan ... *a set of ideas that can be embodied effectively in cultural representations for the purpose of shaing civic identities* atau seperangkat ide-ide yang diwujudkan secara efektif dalam representatif kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara... *civic culture* berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individu dari ikatan budaya komuniter (keluarga, suku, masyarakat lokal) ke dalam ikatan budaya kewargaan suatu negara.

Dari definisi di atas dapat diambil makna, bahwa *civic culture* dapat dijadikan faktor penentu bagi terciptanya konsolidasi demokratis. Perlunya pengembangan *civic culture*, karena aspek-aspek orientasi politik yang terdapat di dalam *civic culture* mencakup: (1) aspek mikro politik (tataran politik pada individu), (2) aspek makro politik (sistem politik nasional), yang saling terkait. Orientasi politik pada aspek mikro politik, berkenaan terutama dengan orientasi politik parokhial sebagai sub-kultur misalnya kekuatan individu pada agama dan etnis, serta orientasi partisipan terutama yang berkenaan dengan tindakan aktif dan

rasional individu sebagai budaya peranan (*role culture*). Sementara makro politik terutama berkenaan dengan orientasi politik loyalitas kepada sistem politik nasional, kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemerintah (Cholisin, 2004).

Memperhatikan unsur-unsur orientasi politik yang terkandung dalam *civic culture*, memperlihatkan beberapa unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan bagi pengembangan sistem politik yang demokratis dan stabil. Hal ini menunjukkan *civic culture* dapat menjadi jembatan antara mikro politik dan makro politik. Dalam istilah Almond dan Verba (Simamora, 1990: 37), *civic culture* merupakan mata rantai penghubung antara mikro dan makro politik.

Selain aspek orientasi politik, ternyata *civic culture* dalam pengembangannya juga menyangkut tentang karakter bangsa, yang meliputi; *civic disposition* (sikap dan kepribadian demokratis), *civic commitment* (kesediaan dan kemauan berdemokrasi), dan *civic participation* (partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab), dimana ke tiga komponen tersebut terkandung dalam *civic virtue* (kebijaksanaan warga negara) sebagai inti peradaban demokrasi. Dalam proses penumbuhan *civic culture*, individu yang berada dalam *communitarian culture* (keluarga, suku, etnis, kelompok, daerah) - sebagai warga negara - dapat berkesesuaian secara harmoni dengan *political culture* (negara, lembaga politik) yang ditopang oleh *civic virtue* sebagai inti demokrasi (Winataputra, 2005).

Dari penjelasan di atas, maka dalam konteks penelitian ini, fokus masalah akan ditekankan pada Pembangunan Masyarakat Multikultural, yang berkaitan dengan upaya bagaimana individu sebagai warga negara yang berada dalam *communitarian culture*, dapat menempatkan identitas dirinya secara harmoni dengan *political culture* dalam ruang ke-Indonesia-an.

C. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik dengan metode *grounded theory*. Metode ini memberikan peluang yang sangat besar untuk menemukan teori baru, disusun dan dibuktikan melalui pengumpulan data yang sistematis, dan analisis data yang berkenaan dengan fenomena itu. Peneliti tidak memulai penyelidikan dengan pegangan pada suatu teori tertentu lalu

membuktikannya, melainkan dengan berpegang pada suatu kajian dan hal-hal yang terkait dengan kajian tersebut (Strauss dan Corbin, 2003: 10-11). Sesuai dengan pendekatan dan metode yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi: studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dengan demikian, dalam penelitian naturalistik ini, peneliti berperan sekaligus sebagai instrumen (*human instrument*) pengumpul data (Bogdan dan Biklen, 1982: 27).

2. Penentuan Subjek Penelitian

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian, yakni latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*events*), dan proses (*process*) (Miles dan Huberman, 1984: 38).

Berdasarkan kriteria di atas dan fokus penelitian yang telah dirumuskan di muka, maka penetapan subjek penelitian yang purposif ditujukan pada tokoh etnis Tionghoa Medan, yang berarti: kriteria latar (*setting*) dalam penelitian ini adalah situasi Kota Medan pasca reformasi 1998 sebagai tempat berlangsungnya proses pengumpulan data. Studi dokumentasi, observasi, dan wawancara akan sering dilakukan di lingkungan kantor, lembaga/ organisasi, di rumah, atau di tempat lainnya, baik secara formal maupun informal. Sedangkan kriteria pelaku (*actors*) dalam penelitian ini adalah para tokoh etnis Tionghoa yang mempunyai peran yang besar yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berdasarkan observasi yang cermat, peneliti kemudian akan memfokuskan pemilihan subjek penelitian pada tahap *continuous adjustment* atau *focusing* (Lincoln dan Guba, 1982: 202) pada beberapa orang yang dianggap kompeten, yang kemudian ditetapkan sebagai subjek penelitian terfokus. Selanjutnya mengenai peristiwa (*events*) sebagai kriteria ketiga adalah perspektif pemikiran dari para subjek penelitian terfokus mengenai pandangan dan gagasan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sementara proses (*process*) sebagai kriteria keempat adalah proses wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian terfokus baik secara formal maupun informal berkenaan dengan perspektif pemikirannya terhadap "integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa" pasca reformasi 1998 untuk menumbuhkan budaya kewarganegaraan yang demokratis.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analytic comparison*. Menurut Neuman (2004: 427), *analytic comparison* dapat digunakan untuk analisis kualitatif. *Analytic comparison* di dalam penggunaannya mencakup *method of agreement* dan *method of difference*. Guna keperluan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua cakupan tersebut dalam menganalisis. Ini berarti dalam menganalisis dengan *method of agreement* dan *method of difference*, peneliti menganalisis pernyataan-pernyataan yang sama dan yang berbeda dari para informan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, peneliti memilah-milah pernyataan-pernyataan yang sama dan yang berbeda pada masing-masing pertanyaan, kemudian dibandingkan antara satu informan dengan informan lainnya. Setelah itu peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori yang ada.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Rekonseptualisasi Integrasi

Para tokoh etnis Tionghoa di kota Medan yang tampil dalam penelitian ini, memiliki perspektif pemikiran yang berbeda berkenaan dengan tema yang pertama "rekonseptualisasi integrasi". Pasca Orde Baru telah memunculkan kembali wacana asimilasi versus integrasi. Versus ini bukan dimaksudkan untuk memilih, namun yang terpenting mengkaji ulang dan melakukan konstruksi yang pas bagi integrasi bangsa ini.

Ada perbedaan gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa dalam merekonseptualisasi integrasi, namun secara general, perspektif pemikiran tersebut mempunyai kesamaan yaitu menempatkan Persatuan Indonesia sebagai tujuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sinergi dari gagasan-gagasan yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan rekonseptualisasi integrasi, telah menghasilkan suatu konsep integrasi yang lebih pas bagi Indonesia pasca reformasi. Konsep itu diusulkan dengan nama "*integrated pluralism*", suatu konsep "keberagaman yang disatukan atas dasar penghargaan terhadap keberbedaan".

Gagasan *integrated-pluralism* sebagai suatu kebijakan yang merupakan sinergis dari beberapa model (asimilasi alamiah, strategi integrasi, integrasi-asimilasi, integrasi budaya, persatuan Indonesia, dan multikulturalisme), menunjukkan di kalangan etnis Tionghoa sendiri telah tumbuh realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Tionghoa yang plural. Untuk itu integrasi yang koeksistensi (pluralisme budaya) dalam koridor *integrated pluralism* merupakan strategi yang paling dibutuhkan bagi Indonesia yang *polyethnic* ini.

Beberapa pemikiran; gagasan, tuntutan dan harapan, dari para tokoh etnis Tionghoa nampaknya dapat menjadi masukan berarti bagi negara dalam merumuskan ulang kebijakan yang pernah ada. Gagasan, tuntutan dan harapan yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Integrasi yang dibutuhkan bagi masyarakat dapat diterapkan melalui model asimilasi alamiah, sebagai kebijakan koeksistensi yang dapat mengayomi seluruh identitas budaya yang begitu beragam dan berbeda-beda. Melalui model ini, dibelajarkan perilaku mau memahami dan menerima keberagaman dan perbedaan etnis yang ada, sikap saling menghargai, solidaritas di semua lingkup kehidupan, dan *senses of belonging* terhadap semua identitas yang ada sebagai milik bangsa Indonesia. Konsep asimilasi alamiah dalam penerapannya tetap memerlukan rekayasa. Program rekayasa tetap dirancang untuk mengeliminir prasangka-prasangka rasial, mendekonstruksi nilai-nilai stereotipik, dan perilaku diskriminatif. Jelasnya rekayasa itu dalam bingkai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan model ini menuntut "penghapusan diskriminasi". Oleh karenanya, *action* sebagai metode yang dianggap paling ampuh dalam membelajarkan pluralisme, hendaknya diiring-dengan contoh dan tauladan sehingga diskriminasi yang telah menjadi penyakit kronis secara bertahap dapat terkikis dalam membangun integrasi. Kontribusi dari tuntutan ini, akan membawa harapan akan terwujudnya "masyarakat yang anti diskriminasi".

Berdasarkan gagasan, tuntutan dan harapan di atas, jelas model ini menghendaki integrasi bangsa yang dibangun bukan sekedar datang dari atas oleh negara, bukan lagi jenis integrasi bangsa yang dibangun dengan paksaan dan kekerasan maupun kesadaran palsu, melainkan jenis kesadaran yang dibangun

oleh integrasi bangsa dari bawah oleh masyarakat (*popular nations integration*) sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masa kini dan mendatang.

2. Strategi integrasi (*integrasionis*) yang pernah digagas pada masa lalu, nampaknya perlu disesuaikan dengan alam di era reformasi ini. Integrasi yang wajar, yang nonras, yang mengakui semua suku yang ada di Nusantara sebagai bagian dari bangsa Indonesia, termasuk suku peranakan Tionghoa. Untuk tercapainya integrasi yang wajar, seluruh anggota masyarakat berinteraksi secara terbuka saling mengisi kebutuhan, tidak saling merintang, dan yang penting ada konsensus, yaitu konsensus terhadap konsep bangsa Indonesia yang lebih modern. Konsep bangsa Indonesia yang tidak lagi berbau ras, tapi konsep bangsa Indonesia yang ditempatkan dalam batasan arti politik, bahwa warga negara Indonesia sejati dilihat bukan dari keturunannya. Tuntutan ini, akan membawa pada harapan: semua suku-suku yang ada di Nusantara bersatu-padu, berintegrasi membangun Indonesia yang satu.

3. Memadukan strategi integrasi dengan asimilasi secara bersamaan, merupakan gagasan alternatif yang bisa menjadi masukan. Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dilihat melalui pendekatan integrasi, dalam arti sebagai strategi yang mengharuskan semua suku yang ada masuk ke dalam *mainstream* bangsa Indonesia. Namun integrasi itu harus bersifat fungsional, yaitu penyatupaduan yang didasari dengan adanya saling bergantung antara bagian-bagian dalam suatu sistem sosial untuk mewujudkan penyatuan yang harmoni. Tapi pada sisi lain, suku-suku yang ada di Nusantara ini pun secara natural berhubungan dan bergabung membentuk sebuah kelompok yang baru, yang lebih besar, yakni bangsa Indonesia. Integrasi yang diusulkan bersifat fungsional, dan asimilasi yang dipilih dengan jenis amalgamasi. Tuntutan dari jenis model ini menghendaki dihindarinya, tindakan-tindakan yang bersifat hegemonik. Melalui tuntutan yang demikian, diharapkan terbangun Indonesia yang demokratis dan bersih dari segala bentuk diskriminasi, kemiskinan, korupsi, kebodohan, dan ketidakadilan.

4. Gagasan mengangkat integrasi budaya untuk dikonstruksi dalam membangun integrasi bangsa, menjadi gagasan alternatif berikutnya. Alasannya, secara hukum dan politik, sudah ada kesepakatan integrasi bangsa dibangun atas dasar persamaan dan kesederajatan. Tapi secara budaya, terutama pada kehidupan

masyarakat, belum terjadi kesepakatan secara menyeluruh. Mungkin ini akibat pengaruh hukum dan politik kolonial yang sudah mengakar lama, dampaknya nilai-nilai yang berlaku pada masing-masing kelompok dalam kehidupan masyarakat menjadi bahan pertentangan. Gagasan membangun integrasi budaya, diperjuangkan untuk mengangkat ketidakadilan yang masih tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perjuangan dalam menghapus ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah hasil dari konstruksi sosial-budaya, yang mengakibatkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dan marjinal. Ada semacam benang biru, perjuangan dalam gender identik dengan perjuangan dalam membangun integrasi budaya. Perjuangan untuk gender adalah untuk membangun budaya, budaya yang mau menerima dan menghargai perbedaan dalam kebersamaan. Tidak perlu lagi membeda-bedakan, karena semua punya hak yang sama tanpa melihat darimana asal-usulnya. Harapan yang diperjuangkan dalam membangun integrasi budaya, yaitu integrasi atas dasar persamaan hak dan kesederajatan.

5. Menolak istilah *integrasionis* dan *assimilasionis*, karena dua istilah itu sudah cacat secara politik, menjadi latar belakang gagasan dalam menelorkan istilah Persatuan Indonesia, yang dipandang pas lebih mengindonesia. Strategi konsep Persatuan Indonesia, tergambar dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya bersatu tanpa menghilangkan identitas budaya dan suku dari masing-masing komponen masyarakat. Jadi konsep itu jelas tidak berdasarkan ras, tapi yang ada adalah *nation* Indonesia. *Nation* Indonesia merupakan suatu kesepakatan bersama untuk mewujudkan Persatuan Indonesia. Konsep integrasi yaitu konsep menjadi warga negara dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya tanpa menghilangkan identitas budaya dan suku dari masing-masing komponen masyarakat, termasuk masyarakat Tionghoa. Konsep Integrasi yang diperjuangkan seperti ini sangat identik dengan teori pluralisme atau multikulturalisme. Namun keidentikan konsep Persatuan Indonesia dengan multikulturalisme, menjadi berbeda, karena konsep Persatuan Indonesia dibangun berdasarkan *geist*-nya Indonesia, yang berbeda dengan konsep multikulturalisme yang berasal dari *geist*-nya Barat. Gagasan dari konsep Persatuan Indonesia ini,

menuntut dibangunnya Indonesia berdasarkan persatuan yang demokratis, dengan harapan dapat membawa kepada: Persatuan Indonesia yang *welfare*, yang sejahtera.

6. Integrasi dikonstruksi bukan berdasarkan etnisitas dan agama, tapi dibangun berdasarkan konsensus politik atas dasar perbedaan dan penghargaan. Kemajemukan bangsa ini, sudah saatnya ditempatkan dalam bingkai multikulturalisme bukan pluralisme. Selama ini kita hanya diajak untuk belajar tentang keberagaman, namun perbedaan dan penghargaan belum diajarkan sampai akar rumput. Kita hanya diajak untuk menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan yang ada, tetapi pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya orang lain belum dijadikan *trend*. Pandangan ini menunjukkan integrasi bangsa untuk saat ini sudah saatnya ditempatkan dalam bingkai multikulturalisme.

2. Formulasi Identitas Bangsa

Pandangan dan gagasan para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan tema yang kedua "formulasi identitas bangsa" juga berbeda-beda. Namun perbedaan hanya terletak pada alur berpikir bukan pada hal yang prinsip, karena masing-masing tokoh tetap pada satu muara yaitu bangsa Indonesia. Pengakuan akan posisi identitasnya sebagai bagian integral dari identitas kebangsaan Indonesia, sekaligus membawa identitasnya untuk dapat menempatkan diri secara harmoni dalam suatu identitas yang lebih besar, yaitu identitas kebangsaan Indonesia.

Sinergi dari gagasan-gagasan yang dilontarkan para tokoh berkenaan dengan formulasi identitas bangsa, menghasilkan suatu formulasi identitas yang lebih pas bagi Indonesia pasca reformasi. Formulasi itu diusulkan dengan nama "identitas-hibrid: Indonesia Baru", suatu formulasi yang menggambarkan suatu identitas yang *fluid*, yang terbuka, yang dinamis yang membawa kepada identitas kebangsaan yang nonras, tidak rigid, tidak kaku, tidak tertutup, dan tidak statis terhadap perubahan, perkembangan, dan kebutuhan jaman.

Paparan di atas menjadi catatan, bahwa masalah identitas merupakan bagian penting dalam pemecahan 'masalah Tionghoa' di Indonesia. Namun demikian kepastian mengenai identitas Tionghoa sebagai bagian integral dalam identitas kebangsaan Indonesia, masih mencari format yang pas, dikarenakan

konsep identitas itu sendiri ditentukan oleh konsep bangsa yang dalam konteks politik berkembang dan berubah.

Jika dilihat dari format negara Indonesia yang *indigeneus nation* (negara suku) maka sudah selayaknya format yang pas adalah menempatkan etnis Tionghoa sama kedudukannya dengan suku-suku lainnya (Suryadinata, 1999). Di jaman Orde Lama, Bung Karno pernah memunculkan ide bahwa orang Tionghoa adalah salah satu suku di Indonesia yang setara dengan suku Jawa, Sunda, Minang, Batak dan sebagainya. Dengan demikian orang Tionghoa telah menjadi orang Indonesia sejati tanpa asimilasi total. Namun akibat meletusnya pemberontakan G30S PKI, ide tersebut kandas untuk diwujudkan (Suryadinata, 1993). Bahkan di era Orde Baru orang Tionghoa harus melakukan asimilasi total dengan meleburkan identitas etnisnya ke dalam identitas etnis Indonesia (Susetyo, 2002). Dari berbagai tekanan dan ketidakpastian tersebut, maka banyak orang Tionghoa berada di persimpangan jalan. Hal tersebut setidaknya tergambar dari temuan penelitian dari Lan (1998) yang menunjukkan bahwa sekarang ini berkembang berbagai orientasi identifikasi diri di kalangan orang Tionghoa di Indonesia. Setidaknya ada empat orientasi yang ditemukan, yaitu: kelompok pertama, adalah mereka yang percaya bahwa mereka adalah etnis Tionghoa dan akan selalu menjadi etnis Tionghoa. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi diri, mereka selalu kembali ke asal usul dan warisan budaya etnis Tionghoa. Kelompok kedua, adalah mereka yang merasa telah berhasil berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa asal usul etnis dan budaya mereka merupakan kutukan yang menyulitkan posisi mereka untuk menjadi bagian yang utuh dari masyarakat di mana mereka tinggal. Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkeyakinan bahwa mereka telah melampaui batas etnis, negara dan bangsa serta telah menjadi seorang yang globalis dan internasionalis. Sedangkan kelompok keempat, adalah mereka yang cenderung beranggapan bahwa hidup mereka ditentukan oleh pekerjaan mereka, sehingga mereka lebih suka menghindari pengidentifikasian diri secara budaya maupun politis.

Demikian pula temuan dari Tan (1998) yang meneliti tentang aspirasi dan partisipasi politik orang Tionghoa, ternyata terpilah-pilah menjadi lima kelompok

cara pandang, yaitu: kelompok pertama adalah yang merasa perlu menonjolkan identitas etnis mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai golongan, misalnya dengan mendirikan Partai Tionghoa. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau menjadikan etnis atau agama sebagai basis gerakan, melainkan melalui *platform* persamaan hak, misalnya dengan mendirikan Partai Bhineka Tunggal Ika. Kelompok ketiga adalah kelompok yang lebih menyukai sebuah forum yang tujuan utamanya lebih sebagai *pressure group*. Kelompok keempat adalah mereka yang membentuk paguyuban kelompok karena perasaan senasib sepenanggungan. Misalnya dengan mendirikan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Sedangkan kelompok kelima adalah mereka yang bergabung dalam partai politik yang terbuka seperti PDI Perjuangan, PAN dan lain sebagainya.

Dari paparan di atas, diperoleh gambaran tentang bagaimana dinamika pencarian identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Pada kenyataannya di tengah masyarakat etnis Tionghoa telah berkembang subkultur-subkultur baru yang merupakan respon terhadap realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Tionghoa yang plural.

3. Pembangunan Masyarakat Multikultural

Untuk tema yang ketiga yaitu mengenai "pembangunan masyarakat multikultural", masing-masing tokoh dengan latar belakang pekerjaan dan kompetensinya, telah memilih jalur yang dianggap pas bagi dirinya sebagai wadah dalam upaya pembangunan masyarakat multikultural.

Melalui kedudukan yang dimiliki, para tokoh etnis Tionghoa, telah menunjukkan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam membangun integrasi dan identitas kebangsaan Indonesia, melalui ruang-ruang yang berbeda. Tokoh pertama berbasis di pendidikan, tokoh kedua di bidang organisasi dan politik, tokoh ketiga dominan di perhimpunan, tokoh keempat di bidang politik, tokoh kelima di bidang ekonomi, dan tokoh keenam pada dunia pers dan LSM.

Satu hal yang menarik untuk kasus kota Medan adalah gairahnya tokoh-tokoh etnis Tionghoa dalam memasuki kancah politik. Hal ini ada beberapa alasan: Pertama, mungkin sebagian dari kawan-kawan ingin menjadikan pengabdian mereka terhadap Indonesia semakin sempurna, dengan

mengintegrasikan pengabdian sosial ekonomi yang telah dicapainya selama ini dengan pengabdian politik, melalui politik formal. Ini sebagai bentuk partisipasi politik yang konkrit karena selama puluhan tahun hak-hak politik kami dipasung oleh negara.

Kedua, terkait dengan kegelisahan sejumlah etnis Tionghoa yang sudah sukses secara ekonomi, namun masih banyak ketimpangan sosial dan kebijakan-kebijakan yang tidak mensejahterakan masyarakat. Sebagian dari mereka ada yang terjun ke dunia organisasi non politik. Bersama-sama dengan rakyat kecil berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dan sebagian lagi memilih untuk terjun ke politik praktis dengan bergabung ke partai politik. Tokoh-tokoh ini percaya bahwa di era reformasi saat ini, dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan membuat atau merevisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan belum adil.

Ketiga, dilihat secara statistik jumlah masyarakat etnis Tionghoa dewasa ini cukup signifikan baik di tingkat Sumut maupun di Medan. Dari 12,8 juta penduduk Sumut, sekitar 1,04 juta di antaranya adalah etnis Tionghoa. Sementara dari sekitar 2,1 juta penduduk kota Medan, sekitar 500.000 orang atau 25 persennya merupakan etnis Tionghoa. Data ini menunjukkan dari segi jumlah cukup signifikan dan wajar bila masyarakat Tionghoa memiliki wakil mereka di lembaga legislatif.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan adanya keagairahan berpolitik dari etnis Tionghoa di Sumut, khususnya di kota Medan yang pada tahun-tahun belakangan ini dinilai semakin meningkat terutama pada pemilu legislatif 2009 lalu. Fenomena ini harus dipandang positif sebagai bentuk konkrit partisipasi politik etnis Tionghoa di kota Medan untuk turut membangun Medan secara bersama. Satu hal juga yang menjadi catatan, kebijakan negara ternyata sangat berpengaruh terhadap peran mereka pada suatu ruang. Kalau dulu, etnis Tionghoa dibatasi pada ruang ekonomi, namun kini muncul fenomena menarik mereka sudah berani masuk pada ruang-ruang publik. Bahkan ruang politik, yang dulu dianggap paling tabu untuk didekati. Data ini, menunjukkan adanya pergeseran dari ruang yang stagnan ke arah terbukanya ruang-ruang sosial yang baru bagi mereka.

Berkaitan dengan kedudukan dan peran, mereka berapresiasi pada ruang-ruang publik yang berbeda, namun ada kesamaan dalam pengabdianya sebagai warga negara, yaitu menumbuhkan budaya kewarganegaraan yang "demokratis" melalui wujud nyata yaitu "partisipasi". Temuan ini, perlu dianalisis lebih lanjut melalui kajian teori.

Berdasarkan realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Almond dan Verba (1963) mengklasifikasikan budaya politik ke dalam: (1) Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah); (2) Budaya politik kaula (*subyek political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif; dan (3) Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi.

Berpegang pada klasifikasi budaya politik di atas, maka orientasi politik dari para tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini, masuk pada klasifikasi budaya politik partisipan. Mereka tampil sebagai warga negara yang aktif, memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai warga negara, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik, dan berperan sebagai aktivis dalam kehidupan masyarakat.

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat *efficacy* atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki kekuatan politik yang ditunjukkannya sebagai warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu mereka warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (*trust*) antar warga negara.

Profil para tokoh etnis Tionghoa ini, perlu dijadikan ikon bagi warga kota Medan, tujuannya adalah untuk melibatkan lebih banyak warga kota yang memiliki andil (*stakeholders*) dalam pembuatan keputusan di suatu daerah, sebagai suatu proses pembelajaran bagi masyarakat.

Namun untuk mencapai keadaan masyarakat kota yang demikian, diperlukan syarat adanya sejumlah kompetensi yang harus dimiliki warga kota. Kompetensi kewarganegaraan multikultural yang dimaksud, oleh Branson (1999: 8), diuraikan: (1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; (2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan (3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic knowledge*) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkenaan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic skill*) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kecakapan kewarganegaraan, meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participation skills*).

Dari kajian data di atas, maka diperoleh kesimpulan, bahwa profil para tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini, dengan *civic competence* yang dimilikinya, mampu memasuki klasifikasi budaya politik partisipan. Nilai-nilai demokrasi yang mereka terapkan dibarengi dengan partisipasi konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi indikasi tumbuhnya multikulturalisme di kota Medan. Satu hal yang menarik, dalam konteks keruangan, sebelum reformasi mereka terdogma pada ruang stagnan (ekonomi), kini mereka memiliki kebebasan dalam memilih ruang. Ruang-ruang sosial baru mereka apresiasi karena ada

penghargaan terhadap identitas yang berbeda. Namun komitmen (*civic commitment*) pun mereka tunjukkan, bagaimana identitas yang melekat padanya (*communitarian culture*) dapat ditempatkan secara harmoni dalam identitas yang lebih besar yaitu: identitas kebangsaan Indonesia (*political culture*). Hubungan fungsional antara tema rekonseptualisasi integrasi yang menghasilkan luaran "*integrated pluralism*" dengan tema rekonstruksi identitas bangsa yang menghasilkan luaran "identitas hybrid : Indonesia yang menjadi", mengarah kepada gagasan model pembangunan masyarakat multikultural yang dipandang cocok untuk kota Medan pasca reformasi. Para tokoh etnis Tionghoa kota Medan menawarkan alternatif model tersebut adalah model "Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika"

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sinergi dari gagasan-gagasan yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan rekonseptualisasi integrasi, telah menghasilkan suatu konsep integrasi yang lebih pas bagi Indonesia pasca reformasi. Konsep itu diusulkan dengan nama "*integrated pluralism*", suatu konsep "keberagaman yang disatukan atas dasar penghargaan terhadap keberbedaan". Gagasan *integrated-pluralism* sebagai suatu kebijakan yang merupakan sinergis dari beberapa model (asimilasi alamiah, strategi integrasi, integrasi-asimilasi, integrasi budaya, persatuan Indonesia, dan multikulturalisme), menunjukkan di kalangan etnis Tionghoa sendiri telah tumbuh realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Tionghoa yang plural. Untuk itu integrasi yang koeksistensi (*pluralisme budaya*) dalam koridor *integrated pluralism* merupakan strategi yang paling dibutuhkan bagi Indonesia yang *polyethnic* ini.
2. Sedangkan gagasan yang berkenaan dengan formulasi identitas bangsa, diusulkan dengan nama "identitas hibrid: Indonesia Baru", suatu formulasi yang menggambarkan suatu identitas yang *fluid*, yang terbuka, yang dinamis yang membawa kepada identitas kebangsaan yang nonras, tidak rigid, tidak

kaku, tidak tertutup, dan tidak statis terhadap perubahan, perkembangan, dan kebutuhan jaman. Sebelum reformasi, etnis Tionghoa dibatasi pada ruang ekonomi, namun kini muncul fenomena menarik, mereka sudah berani masuk pada ruang-ruang publik. Bahkan ruang politik, yang dulu dianggap paling tabu untuk didekati. Data ini, menunjukkan adanya pergeseran dari ruang yang stagnan ke arah terbukanya ruang-ruang sosial yang baru bagi mereka. Berkaitan dengan kedudukan dan peran, mereka berapresiasi pada ruang-ruang publik yang berbeda, namun ada kesamaan dalam pengabdianya sebagai warga negara, yaitu menumbuhkan budaya kewarganegaraan yang "demokratis" melalui wujud nyata yaitu "partisipasi".

3. Profil para tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini, dengan *civic competence* yang dimilikinya, mampu memasuki klasifikasi budaya politik partisipan. Nilai-nilai demokrasi yang mereka terapkan dibarengi dengan partisipasi konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi indikasi tumbuhnya budaya kewarganegaraan demokratis yang kondusif di kota Medan. Indikasi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota, untuk mengkongkritisasi wacana multikulturalisme, sekaligus untuk dicari peluang dan tantangannya bagi pembangunan masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. dan Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Boston: Little, Brown & Co.
- Bahmuller, C. F. (1997). "A Framework For Teaching Democratic Citizenship: An International Project". *The International Journal of Social Education*, 12, 2.
- Blusse, L. (1991). *The Role of Indonesian Chinese in Shaping Modern Indonesian Life*, in Indonesia, Cornell Southeast Asia Program.
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduce to Theory and Methods*. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.
- Branson, Margaret S. ((1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS dan TAF.

- Coppel, C. A. (1993). *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Cholisin. (2004). *Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan*. Jurnal Civics Vol 1 No. 1 Juni 2004. Yogyakarta: Jurusan PPKn FIS UNY.
- Durkheim, E. (1958). *Professional Ethnics and Civic Moral*. New York: Free Press.
- Habib, A. (2006). *Dinamika Hubungan Etnis Tionghoa dan Jawa*. Makalah disampaikan pada Seminar Sinologi Tgl. 3-4 Maret 2006. Malang: Lembaga Kebudayaan UMM.
- Hornby, A.S, Gatenby, E.V. and Wakefield, H. (1962). *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press.
- Hogg, M.A dan Abram, D. (1988). *Social Identification: A Social Psychology of Intergroup Relation and Group Process*. London: Routledge.
- Lan, T. J. (1998). *Pengalaman Etnik Tionghoa dalam Pembentukan Identitas (Nasional) Indonesia*. Makalah Simposium Etnis Tionghoa sebagai Minoritas di Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1998. Depok.
- Lincoln, Y.S dan Guba, E.G. (1985). *Naturalistik Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Mackie, J.A.C. (1976). "Anti-Chinese Outbreaks in Indonesia, 1959-68", dalam J.A.C Mackie (ed.). *The Chinese in Indonesia: Five Essays*. Melbourne: Nelson.
- Pattiradjawane, R. L. (2000). "Peristiwa Mei di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Tionghoa di Indonesia", dalam I. Wibowo, *Harga yang Harus Dibayar: Skesta Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Tionghoa.
- Sarwono, S.W. (1999). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shiraishi, S.S. (2001). *Pahlawan-pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Simbolon, P.T. (1991). *Tapping on the Wall: Ethnicity and Marketplace Trade in the Urban Context of Jakarta*. Amsterdam: VU University Press.
- Skinner, G.W. (1967). "The Chinese Minority", in Mc Very Ruth T. *Indonesia, Survey World Cultural Southeast Asia Studies*. Yale: University of Yale.

Sorenson, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Terjemahan I Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryadinata, L. (1993). *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.

Susetyo, D.P.B. (2002) *Stereotip dan Relasi Antar Etnis Cina dan Etnis Jawa Pada Mahasiswa Di Semarang*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Strauss, A dan Corbin, J. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritis Data*. Terjemahan M. Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tan, M.G. (1999). *Identitas Etnis Tionghoa Pasca Reformasi*. dalam Majalah Tempo. Edisi 14-22 Februari 1999.

Verdiansyah, C. (2007). *Jalan Panjang Menjadi WNI Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Williams, L.E. (1960). *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia 1900-1916*. Glencoe Illinois: The Free Press.

Winataputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. PS. PKn SPs UPI.



C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

Tiga belas tahun reformasi telah bergulir. Memang pasca kerusuhan Mei 1998 sepertinya sudah ada upaya dalam memperbaiki hubungan antaretnis antara etnis-etnis yang selama ini mengaku pribumi (mayoritas) dengan etnis Tionghoa (minoritas). Pemerintah reformasi pun sudah mengeluarkan berbagai peraturan yang mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, yang antara lain: Kepres No. 6/2000 tentang Pencabutan Inpres No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Inpres No.26/1998 tentang Penghapusan Penggunaan Istilah Pri dan Non Pri, Surat Edaran Mendagri No.471.2/1269/SJ tanggal 18 Juni 2002 perihal SBKRI, Surat Edaran Dirjen Imigrasi Depkeh dan HAM No. P.U.M. 01. 10. 0626 tanggal 14 April 2004 tentang SBKRI bagi Permohonan Paspor RI, Surat Edaran Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan No. 6 Tanggal 11 Juni 2004 tentang SBKRI dalam Dokumen Perbankan, serta Kepres No. 19/2002 tentang ditetapkannya Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional. Bahkan kesulitan dalam memperoleh status WNI telah teratasi dengan adanya kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12/2006.

Banyak elit yang mengatakan undang-undang tersebut merupakan hal yang revolusioner. Namun juga ada yang mengatakan undang-undang tersebut masih harus terus disosialisasikan, sehubungan dengan umurnya yang masih muda. Sayangnya, dalam praktik di lapangan masih menimbulkan pertanyaan, apakah adanya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12/2006 tersebut dapat menjamin kemudahan dalam memperoleh status WNI, khususnya bagi etnis Tionghoa. Pertanyaan ini sama halnya dengan masih perlukah SBKRI bagi etnis Tionghoa yang lahir dan berdomisili di Indonesia. Beberapa pakar justru membuktikan bahwa dalam praktiknya di lapangan SBKRI masih terus ditanyakan oleh pegawai Dinas Kependudukan kepada etnis Tionghoa yang hendak mengurus surat atau pun dokumen yang berkaitan dengan kependudukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disatu pihak negara menginginkan pembauran dan integrasi bangsa, namun dilain pihak perlakuan diskriminatif masih berlangsung baik secara formal maupun informal.

Kenyataan ini terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional tentang upaya menghapus diskriminasi etnis di Indonesia tanggal 21 April 2003. Dalam diskusi tersebut, Frans H. Winarta advokat dan anggota KHN menyatakan; sejumlah kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru adalah bentuk nyata *cultural genocide*. Pemberlakuan SBKRI dalam praktiknya di lapangan adalah salah satu kebiasaan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dan telah menjadi masalah yang berlarut-larut. Bahkan masalah SBKRI sudah beralih menjadi sumber KKN sehingga sulit dihapuskan dalam praktik sehari-hari.

Hasil diskusi di atas, hanyalah merupakan salah satu masalah terkendalanya integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa, malah merupakan *contraditio in terminis* dari konsep Bhineka Tunggal Ika (*unity in diversity*). Untuk itu di alam reformasi ini, masalah integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa, masih merupakan suatu upaya yang urgen untuk dilakukan sebagai input dalam mendukung agenda reformasi.

Dalam konteks dunia akademis, tema-tema integrasi dan identitas bangsa pasca-reformasi masih perlu banyak dilakukan guna mencari gagasan dan model yang pas bagi pembangunan masyarakat multikultural. Namun penelitian mengenai integrasi dan identitas di kalangan etnis Tionghoa yang berkaitan secara khusus dengan pembangunan masyarakat multikultural masih belum banyak dilakukan. Kajian ide multikulturalisme di kalangan etnis Tionghoa merupakan sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Alasannya bahwa sebaik apapun kebijakan yang dikeluarkan rezim dalam ruang publik yang berkenaan dengan integrasi dan identitas, masih akan terkendala manakala pada tataran *private space* belum tumbuh budaya *recognition and difference* di kalangan subyek-subyek individu warga negara. Upaya pembangunan masyarakat multikultural di Indonesia pasca-reformasi merupakan wahana bagi tumbuhnya kesadaran secara kolektif akan jatidiri sebagai bagian dari warga negara. Melalui pembangunan masyarakat multikultural yang demokratis, diharapkan para subyek dapat menempatkan identitasnya itu secara harmoni dalam ruang ke-Indonesia-an, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Pemikiran ini menjadi gagasan awal peneliti untuk mengkaji keberadaan komunitas etnis Tionghoa khususnya di Kota Medan dalam kaitannya dengan rekonseptualisasi integrasi, formulasi identitas, dan upaya pembangunan masyarakat multikultural pasca-reformasi. Ketiga konsep tersebut dikaji ulang melalui dialog dengan beberapa tokoh etnis Tionghoa sebagai masukan dalam memproyeksikan pembangunan masyarakat multikultural di kota Medan.

Pada tahun pertama, studi verifikatif pada level konseptual teoritikal dan studi empirikal telah menghasilkan sejumlah data mengenai perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa di Kota Medan berkenaan dengan rekonseptualisasi integrasi pasca-reformasi. Beberapa model yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa, yakni model: asimilasi alamiah; strategi integrasi; integrasi-asimilasi; integrasi budaya; persatuan Indonesia; dan multikulturalisme, secara sinergi menghasilkan "*integrated pluralism*" sebagai alternatif kebijakan yang dipandang lebih cocok untuk kondisi kota Medan pasca-reformasi 1998. Gagasan *integrated pluralism* ini mengusung *recognition and difference* dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila.

Perspektif pemikiran para tokoh Tionghoa juga digali berkenaan dengan rekonstruksi identitas bangsa di era globalisasi untuk menemukan luaran, yakni formulasi identitas bangsa. Beberapa model identitas yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa, yakni model: identitas dinamis; identitas nasional; identitas budaya; identitas sosial; identitas kelas; dan identitas multikultural, secara sinergi menghasilkan "identitas hibrid: keidentitasan Indonesia yang terus menjadi". Identitas hibrid: keidentitasan Indonesia yang terus menjadi, sebagai gagasan para tokoh dalam merekonstruksi identitas bangsa, dipandang lebih pas dalam membangun keidentitasan di era globalisasi, namun tetap pada ruang ke-Indonesia-an.

Hubungan fungsional antara model integrasi dan formulasi identitas bangsa, menjadi data empirik dalam menganalisis model pembangunan masyarakat multikultural yang di pandang pas untuk kota Medan sebagai masukan bagi pemerintah kota. Sinergi gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa mengenai model pembangunan masyarakat multikultural, mengarah pada tawaran model

"Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika" sebagai model alternatif yang dipandang cocok untuk Kota Medan pasca-reformasi.

Pada tahun kedua, model pembangunan masyarakat multikultural versi tokoh etnis Tionghoa di atas, akan dikomparasikan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan *decision makers*, tokoh etnis kota, pakar akademisi dan tokoh masyarakat. Hasil dari kegiatan FGD ini diharapkan akan menghasilkan kesepakatan bersama, mengenai model pembangunan masyarakat multikultural yang dipandang dan dinilai cocok bagi kota Medan sebagai miniaturnya Indonesia.



LAPORAN EKSEKUTIF

MODEL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL MELALUI REKONSEPTUALISAI INTEGRASI DAN REKONSTRUKSI IDENTITAS BANGSA (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh Etnis Tionghoa di Kota Medan)¹

Oleh

Deny Setiawan, Onggal Sihite, Yusna Melianti, Liber Siagian²

I. PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Model pembangunan pemerintah yang selama ini bersifat *uniform* dan *top-down*, telah menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pembangunan di Indonesia mengalami persoalan ketika bidang ekonomi yang diletakkan sebagai prioritas utama, berdampak tidak hanya mempengaruhi penataan infrastruktur, tetapi juga struktur serta suprastruktur yang menyangkut ide multikulturalisme. Berbagai kajian pembangunan di Indonesia menunjukkan, perbedaan-perbedaan etnis telah dikesampingkan karena dianggap sebagai faktor penghambat integrasi dan karenanya menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi yang sah bagi orde baru. Kini salah satu persoalan mendesak berkaitan dengan masalah pembangunan di era reformasi adalah upaya mengintegrasikan perbedaan-perbedaan etnis tersebut dalam bingkai multikulturalisme. Tujuan dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran faktual mengenai perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa mengenai rekonseptualisasi integrasi, rekonstruksi identitas bangsa, dan menghasilkan model pembangunan masyarakat multikultural yang cocok untuk kota Medan.

II. INOVASI IPTEKS

a. Kontribusi Terhadap Pembaharuan dan Pengembangan Ipteks

Diharapkan kajian empirik yang menggunakan pendekatan naturalistik ini memiliki urgensi bagi pengembangan Pendidikan Multikultural. Tema-tema integrasi, identitas, dan multikulturalisme, dapat dijadikan sebagai bahan kajian esensial dalam proses pembelajaran Pendidikan Multikultural.

b. Perluasan Cakupan Penelitian

¹ Penelitian dibiayai melalui hibah bersaing tahun anggaran 2011
² Dosen Jurusan PPKn FIS Unimed

IV. Manfaat Bagi Institusi

a. Keterlibatan Unit-Unit Lain di Perguruan Tinggi

Penelitian hibah bersaing tahun I (pertama) melibatkan pakar akademisi dari perguruan tinggi yang ada di kota Medan diantaranya; IAIN Sumut dan Universitas Sumatera Utara.

b. Keterlibatan Mahasiswa

Penelitian hibah bersaing tahun I (pertama) melibatkan 2 (dua) mahasiswa yakni:

Nama : Mei Yanti Siagian

NIM : 071233110051

Judul Skripsi : UPAYA ORGANISASI NON PEMERINTAH PERKUMPULAN SADA AHMO (PESADA) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK BERWAWASAN GENDER (STUDI KASUS PESADA CABANG MEDAN)

Nama : Fandi Setiawan

NIM : 071233110005

Judul Skripsi : PERSPEKTIF MASYARAKAT MENGENAI PENGEMBANGAN BATIK MEDAN DALAM MENUMBUHKAN NASIONALISME

c. Kerjasama dengan pihak luar : Tidak Ada

V. Publikasi Ilmiah

a. Daftar Publikasi Ilmiah

Deny Setiawan, 2011, Integrasi Dalam Proses Pembentukan Identitas Bangsa Untuk Menumbuhkan Budaya Kewarganegaraan (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh Etnis Tionghoa Di Kota Medan). JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 3 Nomor II Desember 2011. ISSN: 2085 - 482X

b. Copian Artikel Ilmiah:



JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL
(JUPIIS)

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Psr V Kotak Pos No. 1589, Medan 20221 Telp. (061) 6625973,
6613276, 6618754, 6613365, Fax. (061) 6614002

SURAT KETERANGAN

No: 016 /JPS/V.3.2/IX/2011

Ketua Penyunting Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Negeri Medan dengan ini menerangkan:

Nama : Dr. Deny Setiawan, M.Si
NIP : 196803081993031003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/IVb
Fakultas/Jurusan : FIS/PP-Kn
Jabatan : Dosen PPKn UNIMED

telah mengirim artikel dengan judul "Model Pembangunan Masyarakat Multikultural Melalui Rekonseptualisasi Integrasi dan Rekonstruksi Identitas Bangsa (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh Etnis Tionghoa Di Kota Medan)", dan akan dimuat pada jurnal JUPIIS (ISSN: 2085 – 482X) Volume 3 Nomor II Desember 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 20 September 2011
Ketua Penyunting,



Dr. Sugiharto, M.Si

Volume 1 Nomor 11 Desember 2011

ISSN 2073-2425

JUPIIS

JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL

Model Pembangunan Masyarakat Multikultural Melalui Rekonseptualisasi Integrasi dan Rekonstruksi Identitas Bangsa sebagai Naturalistik Terhadap Tokoh Dan Pemimpin di Kota Medan

Dr. Dedy Satrio, M.Si.

Migrasi Dan Adaptasi Etnis Cina Di Kelurahan Lajang Tengah Kecamatan Kuala Terengganu Kabupaten Labuhan Batu Utara

Linda H Simanung, S.Pd, dan Des. Kamariah Purnani, M.Si.

Funksi Langit Dapur (Smanas) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba Di Desa Solungan XI Utara Kecamatan Kongsong XI Utara Kabupaten Sintang

Ramasta Simalanga, S.Pd, dan Des. Yusra Melharri, M.H.

kebudukan *Loat*, Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kelurahan Sadahan Kecamatan Padang Sumpang Utara Kota Padang Sumpang

Nora Amelia Putri, S.Pd, dan Sri Hadaningrum, SH, M.Hum.

Persepsi Siswa Terhadap Metode Ceramah Guru Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X di SMA Negeri 11 Medan Tahun Pelajaran 2010/2011

Fisca Yuliana Silironga, S.Pd, dan Drs. Marwan Saizum

Empower Analisis Wacana Terhadap Pengaruh Nasta R. Javase Sosials Bagi Masyarakat Kota Medan 1963-1965

Yusuf Adil Ambar, S.Pd, dan Des. Heriana Siregawa Lubis, M.Si.

kegiatan Sekolah Tinggi pada Abad XVIII

Heni Reubadhyanti Setiati, S.Pd, dan Drs. Luvika Singsih, M.Hum.

Persepsi Adat Ceramah Perkawinan Pada Masyarakat Tatal Di Mandailing

Yenni Lurida, Pd, dan Des. Fitrianti

Persepsi Masyarakat Rumpun Aceh Terhadap Perilaku Batak Di Kota Medan

Yoniasrizka, S.Pd, dan Des. Fitrianti Andayani, M.Si.



DIPERIKHKAN OLEH KELEKTIKAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

**MODEL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL
MELALUI REKONSEPTUALISAI INTEGRASI DAN
REKONSTRUKSI IDENTITAS BANGSA**
(Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh Etnis Tionghoa di Kota Medan)

Oleh: Deny Setiawan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan: (1) rekonseptualisasi integrasi pasca-reformasi di Kota Medan; (2) rekonstruksi identitas bangsa di era globalisasi; dan (3) gagasan para tokoh dalam memproyeksikan pembangunan masyarakat multikultural di Kota Medan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dalam situasi yang alami, wawancara dilakukan secara *purposive*, dan studi dokumentasi dilakukan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder. Temuan penelitian menunjukkan (1) perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa dalam merekonseptualisasikan integrasi mengarah kepada pilihan "*integrated-pluralism*" sebagai suatu kebijakan yang dipandang lebih sesuai dalam membangun integrasi pasca-reformasi di kota Medan, (2) sinergi gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa mengenai rekonstruksi identitas bangsa menghasilkan suatu formulasi identitas bangsa yang lebih pas bagi Indonesia di era globalisasi, yakni identitas hibrid: "Indonesia yang terus menjadi". Formulasi ini menggambarkan suatu identitas yang *fluid* dan dinamis mengarah kepada identitas kebangsaan yang non-ras, tidak rigid dan tidak statis terhadap perubahan, perkembangan dan kebutuhan zaman; dan (3) *Integrated-pluralism* dan identitas hibrid yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa memberikan kontribusi yang kondusif terhadap pembangunan masyarakat multikultural di kota Medan pasca-reformasi, utamanya dalam membangun model "Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika" dengan prinsip *social and political ideal of togetherness in difference*.

Kata Kunci: Integrasi, Identitas, Multikulturalisme

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Berawal dari tuntutan dan harapan pada saat reformasi meledak di bulan Mei 1998, sebuah tuntutan akan adanya perubahan dan sebuah harapan akan munculnya kehidupan demokratis yang kondusif di republik ini. Namun tuntutan dan harapan tersebut, teriris oleh suatu tragedi: kerusuhan, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap sesama anak bangsa. Tragedi kemanusiaan 13-15 Mei 1998 telah mencoreng citra bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang beringas. Salah satu mereka yang menjadi korban (di-korban-kan) dalam kerusuhan tersebut, adalah mereka yang selama ini kita golongan sebagai non-pribumi, yaitu minoritas etnis Tionghoa.

Reformasi yang selayaknya adalah suatu gerakan pembaharuan dalam mencari perubahan bentuk ideal kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, justru diwarnai oleh semacam tumpuhan dendam, yaitu dendam terhadap rezim yang selama 32 tahun mengukung kebebasan hingga menjalar pada dendam terhadap etnis Tionghoa yang selama ini dianggap diistimewakan.

Bermula dari masa kolonial melalui politik *divide et impera*, segregasi dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini memang telah diciptakan. Berlanjut pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, yang justru melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan rezim, telah mengentalkan segregasi dan diskriminasi hingga melestarikan *prejudice* atau prasangka dan *stereotype* pada tataran *private space*.

Hubungan antar etnis yang tidak harmonis ini, diperparah ketika suatu program pembangunan yang dicanangkan rezim mengalami kegagalan, yang kemudian rezim menuding segelintir etnis Tionghoa dianggap sebagai biang keladi kegagalan tersebut. Pengkambinghitaman ini telah menyulut potensi konflik yang bersifat laten pada dimensi horizontal menjadi konflik terbuka, karena dipicu oleh faktor vertikal seperti kecemburuan ekonomi dan kepentingan politik elit. Namun lagi-lagi konflik tersebut berulang terjadi, seakan-akan mengikuti dinamika dari sejarah bangsa ini.

Tiga belas tahun reformasi telah bergulir, memang pasca kerusuhan Mei 1998 sepertinya sudah ada upaya dalam memperbaiki hubungan antar etnis antara mayoritas (pribumi) dengan minoritas (etnis Tionghoa). Pemerintah reformasi pun sudah mengeluarkan berbagai peraturan yang mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, yang antara lain : Kepres No. 6/2000 tentang Pencabutan Inpres No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Inpres No.26/1998 tentang Penghapusan Penggunaan Istilah Pri dan Non Pri, Surat Edaran Mendagri No.471.2/1269/SJ tanggal 18 Juni 2002 perihal SBKRI, Surat Edaran Dirjen Imigrasi Depkeh dan HAM No. P.U.M. 01. 10. 0626 tanggal 14 April 2004 tentang SBKRI bagi Permohonan Paspor RI, Surat Edaran Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan No. 6 Tanggal 11 Juni 2004 tentang SBKRI dalam Dokumen Perbankan, Serta Kepres No. 19/2002 tentang Ditetapkannya Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional. Bahkan kesulitan dalam memperoleh status WNI telah teratasi dengan adanya kebijakan pemerintah dalam UU Kewarganegaraan No. 12/2006.

Banyak elit yang mengatakan undang-undang tersebut merupakan hal yang revolusioner. Namun juga ada yang mengatakan undang-undang tersebut masih harus terus disosialisasikan, sehubungan dengan umurnya yang masih berusia lima tahun. Namun sayangnya, dalam praktik di lapangan masih menimbulkan pertanyaan, apakah adanya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12/2006 tersebut dapat menjamin kemudahan dalam memperoleh status WNI, khususnya bagi etnis Tionghoa. Pertanyaan ini sama halnya dengan masih perlukah SBKRI bagi etnis Tionghoa yang lahir dan berdomisili di Indonesia. Beberapa pakar justru membuktikan bahwa dalam praktiknya di lapangan SBKRI masih terus ditanyakan oleh pegawai Dinas Kependudukan kepada etnis Tionghoa yang hendak mengurus surat atau pun dokumen yang berkaitan dengan kependudukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disatu pihak negara menginginkan pembauran dan integrasi bangsa, namun dilain pihak perlakuan diskriminatif masih berlangsung baik secara formal maupun informal.

Fakta di atas, hanyalah merupakan salah satu masalah terkendalanya integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa, malah merupakan *contraditio in terminis* dari konsep Bhineka Tunggal Ika (*unity in diversity*).

Dalam konteks dunia akademis, tema-tema integrasi dan identitas bangsa pasca reformasi masih perlu banyak dilakukan guna mencari gagasan dan model yang pas bagi pembangunan masyarakat multikultural yang demokratis. Namun penelitian mengenai integrasi dan identitas di kalangan etnis Tionghoa yang berkaitan secara khusus dengan pembangunan masyarakat multikultural, masih belum banyak dilakukan. Kajian pembangunan masyarakat multikultural di kalangan etnis Tionghoa merupakan sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Alasannya bahwa sebaik apapun kebijakan yang dikeluarkan rezim dalam ruang publik yang berkenaan dengan integrasi dan identitas, masih akan terkendala manakala pada tataran *private space* belum tumbuh sikap *recognition and difference* di kalangan subyek-subyek individu etnis Tionghoa itu sendiri. Pembangunan masyarakat multikultural bagi generasi etnis Tionghoa di Indonesia pasca reformasi, merupakan wahana bagi tumbuhnya kesadaran secara kolektif akan jatidirinya sebagai bagian dari generasi bangsa ini. Bahkan melalui pembangunan masyarakat multikultural dalam konteks pengembangan karakter dan nilai-nilai demokratis, diharapkan mereka dapat menempatkan identitasnya itu secara harmoni dalam ruang ke-Indonesia-an.

Pemikiran ini menjadi gagasan awal peneliti untuk mengkaji keberadaan komunitas etnis Tionghoa, khususnya para tokoh etnis Tionghoa di Kota Medan, dalam kaitannya dengan rekonseptualisasi integrasi dan formulasi identitas, serta pengaruhnya terhadap pembangunan masyarakat multikultural pasca/reformasi 1998.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diajukan: "Bagaimanakah perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa di Kota Medan, mengenai integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa untuk pembangunan masyarakat multikultural?"

Rumusan masalah ini selanjutnya, dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang difokuskan pada tiga tema besar, yakni: (1) rekonseptualisasi integrasi, dengan pertanyaan penelitian: bagaimanakah gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa mengenai rekonseptualisasi integrasi pasca reformasi 1998?; (2)

formulasi identitas bangsa, dengan pertanyaan penelitian: bagaimanakah gagasan dari para tokoh dalam merekonstruksi identitas bangsa dalam ruang ke-Indonesia-an?; dan (3) pembangunan masyarakat multikultural, dengan pertanyaan penelitian: apakah perspektif pemikiran para tokoh dalam menggagas rekonseptualisasi integrasi dan formulasi identitas bangsa berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat multikultural pada era demokratisasi di kota Medan?

3. Tujuan Penelitian

Dari masalah pokok di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan:

- (1) memperoleh gambaran faktual tentang perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa mengenai integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa untuk menumbuhkan budaya kewarganegaraan pasca reformasi di Kota Medan; (2) menghasilkan rekonseptualisasi integrasi dan formulasi identitas bangsa yang dipandang pas bagi tumbuhnya budaya kewarganegaraan yang demokratis dalam ruang ke-Indonesia-an; (3) menemukan pola pembangunan masyarakat multikultural yang dilakukan para tokoh etnis Tionghoa di kota Medan sebagai upaya pengembangan karakter warga negara yang demokratis.

B. Kajian Teoretis

1. Integrasi Etnis Tionghoa di Indonesia

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional terdapat dua aliran yang sudah sering kita kenal yaitu, asimilasionis dan pluralis dalam meletakkan identitas golongan minoritas, terutama yang berkaitan dengan penerapan suatu kebijakan. Wirth (1945: 347) mengatakan bahwa kebijakan asimilasionis merupakan upaya untuk menggabungkan para anggota minoritas ke-dalam masyarakat lebih luas dengan cara melarang kebudayaan mereka dan mengharuskannya mengadopsi sistem nilai dan gaya hidup kelompok dominan atau superordinat. Hal tersebut adalah berbeda dengan upaya yang dianut oleh kaum pluralis. Kelompok dominan bersikap toleran terhadap kebudayaan kelompok subordinat, atau dengan kata lain golongan minoritas diperkenankan mempertahankan kebudayaan mereka. Jika diperbandingkan, maka kebijakan asimilasi yang diterapkan bagi orang Tionghoa di Indonesia dengan berbagai

suku-bangsa yang ada di Indonesia, terdapat perbedaan. Untuk orang-orang Tionghoa yang telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia berlaku kebijakan yang bersifat asimilasionis; sedangkan untuk berbagai suku-bangsa di Indonesia cenderung berlaku paham pluralis. Namun dalam perjalannya, ke dua kebijakan tersebut, sejak jaman kolonial, Orde Lama, hingga berakhirnya rezim Orde Baru, dalam penerapannya selalu menimbulkan masalah berkenaan dengan posisi etnis Tionghoa di Indonesia. Begitu dianggap penting persoalan etnis Tionghoa di Indonesia, sehingga memunculkan suatu isu khusus, yang dikenal dengan istilah "Masalah Cina".

Blusse (1991: 1) mengemukakan bahwa "Masalah Cina" merupakan isu yang hangat dibicarakan dalam masyarakat Indonesia, dan tanpa bisa dihindari, persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan; apakah etnis Tionghoa di Indonesia harus *survive* pada identitas kebudayaan mereka sendiri, atau harus berintegrasi ke dalam kebudayaan Indonesia. Namun pertanyaan ini belum bisa dijawab final, karena sejak jaman kolonial hingga reformasi 1998, kerusuhan antar etnis - dalam hal ini terhadap etnis Tionghoa di Indonesia - selalu berulang terjadi, seolah-olah terus mengikuti dinamika sejarah Indonesia.

Mengapa kerusuhan terhadap etnis Tionghoa berulang kali terjadi di Indonesia? Kata kuncinya adalah segregasi atau keterpisahan. Pada dasarnya memang sudah menjadi niat penguasa kolonial untuk mencegah terjadinya persatuan antar etnis. Pemerintah kolonial menganggap bahwa monopoli dan otoritas mereka akan terancam apabila berbagai kelompok etnis yang ada saat itu menggabungkan kekuatan untuk melawan mereka (Simbolon, 1991: 40).

Kebijakan penting yang ikut meningkatkan keterpisahan etnis Tionghoa dari masyarakat pribumi adalah sistem status yang membagi stratifikasi sosial secara hierarkhis menjadi tiga kelompok golongan, yaitu: golongan Eropa di atas, golongan Timur Asing di tengah, dan golongan pribumi di bawah. Masing-masing golongan memiliki status dan hak-hak yang berbeda, dan secara umum orang Tionghoa yang masuk kategori Timur Asing berada pada posisi yang lebih menguntungkan daripada golongan pribumi (Coppel, 1993: 13). Oleh karena itu, asimilasi dengan golongan pribumi akan mengakibatkan penurunan status sosial dan sekaligus kehilangan hak-hak istimewanya.

Keterpisahan etnis Tionghoa di Hindia Belanda juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi pemerintah kolonial. Penguasa waktu itu memberikan berbagai monopoli dari penarikan pajak, distribusi perdagangan komoditas tertentu, dan lain-lain kepada segelintir orang Tionghoa yang kaya dan mempunyai koneksi dekat dengan mereka. Di satu pihak dengan memanfaatkan orang Tionghoa, para penguasa kolonial memperoleh hasil pajak yang besar tanpa harus kerja keras sendiri. Di pihak lain, individu-individu Tionghoa yang menjadi kroni penguasa tersebut juga berhasil membuat keuntungan yang tidak kalah besarnya dari kolusi itu (Williams, 1960: 24-27). Namun demikian, setiap kali muncul kritik atau protes terhadap penurunan kesejahteraan penduduk pribumi, para pejabat kolonial seringkali mengkaitkannya dengan orang Tionghoa yang kegiatannya sebagai pemungut cukai/pajak dan rentenir bisa mudah dituduh menggerogoti kesejahteraan rakyat.

Dua kebijakan di atas, hanya merupakan contoh, bahwa kebijakan pemerintah kolonial mempunyai pengaruh yang besar dalam membuat golongan etnis Tionghoa terpisah dari masyarakat Indonesia. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, pemerintah mulai melancarkan proses pribumisasi di sektor ekonomi untuk mengurangi kekuatan ekonomi etnis Tionghoa dan mengembangkan wiraswasta pribumi. Tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1959 yang melarang orang Tionghoa melakukan perdagangan di pedesaan (Mackie, 1976: 77). Larangan tersebut mengakibatkan eksodusnya orang-orang Tionghoa ke perkotaan, dan dengan begitu semakin mempertegas dikotomi domisili.

Orde Baru pun tidak berbeda dari Orde Lama. Walaupun dalam ruang publik (*public-space*), Orde Baru menghendaki kebijakan asimilasi, namun dalam ruang pribadi (*private-space*) masyarakat masih melakukan diskriminasi. Karena itu, dalam batas tertentu, Orde Baru cenderung menerapkan kebijakan kesetaraan legal daripada kebijakan koeksistensi (*pluralisme-budaya*) terhadap kelompok minoritas etnis Tionghoa. Olsen menggambarkan kesetaraan legal sebagai kebijakan yang munafik, sebab meskipun dalam ruang publik ada pengakuan kesetaraan, tetapi dalam ruang privat malah terjadi permusuhan terhadap etnik minoritas. Kesetaraan legal merupakan kebijakan mendua; yang satu pihak,

menetapkan kendala legal terhadap diskriminasi formal oleh organisasi terhadap kelompok minoritas, sedangkan di lain pihak menerima diskriminasi informal dalam hubungan antar-pribadi dengan individu etnik minoritas (Habib, 2006).

Dari gambaran di atas, memperlihatkan segregasi dan diskriminatif telah berlangsung lama. Bahkan sampai pada tanggal 13-15 Mei 1998, segregasi dan diskriminatif itu diwarnai oleh kerusuhan yang oleh Pattiradjawane (2000: 213) dinilai sebagai titik terendah dalam sejarah etnis Tionghoa di Indonesia.

Apa yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah turut memberikan kontribusi terhadap keterpisahan etnis Tionghoa di Indonesia. Masalah konflik antar etnik di Indonesia adalah masalah yang lebih banyak berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Pernyataan ini sekaligus menunjuk pemerintah sebagai aktor yang mempunyai peran sentral dalam melakukan proses integrasi sosial. Namun sebaliknya dalam *private-space*, individu sebagai warga negara, juga mempunyai peran penting dalam mendukung terciptanya hubungan antar etnik yang intergratif.

2. Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia

Dalam pandangan teori identitas sosial, keinginan untuk memiliki identitas sosial yang positif dipandang sebagai motor psikologik penting dibalik tindakan-tindakan individu dalam setiap interaksi sosial. Hal tersebut berlangsung melalui proses *social comparison* yang dipandang sebagai cara untuk menentukan posisi dan status identitas sosialnya. Proses *social comparison* merupakan serangkaian perbandingan dengan orang/kelompok lain yang secara subyektif membantu individu membuat penilaian khusus tentang identitas sosialnya dibanding identitas sosial yang lain (Hogg dan Abram, 1988). Selalu ada upaya-upaya untuk mempertahankan identitas sosial yang positif dan memperbaiki citra, jika ternyata identitas sosialnya sedang terpuruk baik dalam skala individual maupun skala kelompok. Dalam konteks makro sosial (kelompok, masyarakat) maka upaya mencapai identitas sosial positif dicapai melalui: mobilitas sosial dan perubahan sosial.

Mobilitas sosial adalah perpindahan individu dari kelompok yang lebih rendah ke kelompok yang lebih tinggi. Mobilitas sosial hanya mungkin terjadi jika

peluang untuk berpindah itu cukup terbuka. Namun demikian jika peluang untuk mobilitas sosial tidak ada, maka kelompok bawah akan berusaha meningkatkan status sosialnya sebagai kelompok. Pilihan pertama adalah dengan menggeser statusnya ke tingkat lebih atas. Kalau kemungkinan menggeser ke posisi lebih atas tidak ada, maka usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan citra mengenai kelompok agar kesannya tidak terlalu jelek (Hogg dan Abram, 1988).

Dinamika pencarian identitas etnis Tionghoa sebenarnya terkait perlakuan yang diterima dari pihak penguasa. Sarwono (1999) dan Susetyo (2002) mengemukakan bahwa pada jaman pemerintahan kolonial Belanda, perbedaan status etnis diberlakukan dengan tegas. Orang Eropa diberi status tertinggi dan mempunyai hak dan fasilitas terbaik. Orang Tionghoa yang waktu itu disebut orang Timur Asing (*vreemde osterlingen*) mempunyai status di bawah orang Eropa, namun berada di atas golongan pribumi (*inlander*). Dengan demikian golongan pribumi diberi status yang paling rendah (kecuali bangsawan yang diberi status seperti Eropa). Dalam statusnya yang di tengah ini, orang Tionghoa meningkatkan citranya dengan melakukan mobilitas sosial, yaitu mengadopsi berbagai identitas yang melekat pada orang Eropa ataupun Belanda. Dengan demikian, yang menonjol pada orang Tionghoa di era kolonial Belanda adalah perpaduan antara identitas Tionghoa tradisional dan identitas ala Eropa.

Namun demikian situasinya nampak berbeda sama sekali ketika memasuki era kemerdekaan. Persoalan yang mengedepan terutama adalah tentang kepastian status kewarganegaraan. Dikemukakan oleh Coppel (1994), orang Tionghoa pada masa itu terjepit antara berbagai kepentingan baik yang berskala nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia pada waktu itu tidak bisa segera memberikan kepastian. Bahkan undang-undang yang mengatur hal ini ditengarai akan membatasi jumlah orang Tionghoa yang bisa menjadi warganegara. Sementara pemerintah RRC pada waktu itu masih memberlakukan kewarganegaraan ganda bagi orang Tionghoa di perantaraan. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, sejumlah tokoh Tionghoa mendirikan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang inti perjuangannya ingin menempatkan etnis Tionghoa sejajar dengan etnis/suku lain dengan konsep integrasi. Sementara kelompok Tionghoa yang lain menghendaki asimilasi sebagai solusi. Namun

demikian sejak terjadinya peristiwa pemberontakan PKI 1965, keadaannya berbalik sama sekali. Konsep integrasi secara politis telah dikategorikan sebagai bagian dari ideologi komunis sosialis (Lan, 1998). Keadaan ini telah menjadikan pilihan satu satunya yang diberi ruang oleh penguasa adalah dengan asimilasi. Sebenarnya disinilah akar permasalahannya, mengapa pencarian identitas etnis Tionghoa menjadi sedemikian rumit. Pasca peristiwa 1965, status etnis Tionghoa sedang dalam kondisi terendah. Mereka dipojokkan oleh penguasa maupun masyarakat bukan Tionghoa. Pada saat itu berbagai kekerasan massa anti Tionghoa mulai marak.

Mengacu pada teori identitas sosial, maka ketika suatu kelompok citranya sedang terpuruk selalu ada upaya untuk bereaksi terhadap keadaan dalam rangka meraih kembali citra/identitas sosial yang positif. Adapun modus yang biasa terjadi adalah dengan mobilitas sosial dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang dilakukan nampaknya cukup bervariasi tergantung dari persepsi masing-masing kelompok tentang bagaimana harus memperbaiki citra. Salah satu reaksi yang muncul adalah dengan eksodus ke luar negeri seperti ke Belanda, kembali ke RRC dan sebagainya. Sementara kelompok asimilasi nampaknya mendapat angin, salah satu tokohnya Junus Jahja mendorong orang Tionghoa untuk memeluk agama Islam sebagai kunci pembauran total.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susetyo (2002), ditemukan juga bahwa ada kecenderungan subyek dari etnis Tionghoa untuk mengadopsi sifat-sifat positif dari etnis di luar dirinya sebagai identitas sosialnya. Hal ini nampak menjadi salah satu solusi dalam pencarian identitas ini. Pada akhirnya mereka akan menemukan identitas Tionghoa yang Jawa, Tionghoa yang Batak, Tionghoa yang Padang, Tionghoa yang Sunda dan sebagainya. Namun demikian ketika mereka tidak dapat menemukan hal-hal yang mendukung perbaikan citra dirinya sebagaimana hal di atas, banyak juga yang akhirnya pindah ke luar negeri menjadi kelompok yang beridentitas kosmopolitan, internasional, lintas etnis maupun lintas negara.

Selain melalui mobilitas sosial, nampaknya juga ada kecenderungan melakukan perubahan sosial, yaitu dengan memperbaiki citra dari ke-Tionghoa-an. Salah satunya adalah dengan menggeser orientasi ke-Tionghoa-an dari yang

berorientasi tradisional menjadi ke-Tionghoa-an yang berorientasi nasional. Kecenderungan ini lebih banyak berkembang di kalangan generasi yang lebih muda, di mana mereka sudah tidak begitu menguasai lagi adat istiadat Tionghoa tradisional, tidak bisa berbicara dalam bahasa mandarin, dan memiliki pendidikan yang modern. Artinya pada masa kini, ke-Tionghoa-an tampil dalam kemasan dan citra baru yang lebih bisa diterima dan tidak lagi berasosiasi dengan masa lalu yang traumatis.

3. Pembangunan Masyarakat Multikultural

Istilah multikultur berakar dari kata kultur. Pada umumnya, kultur diartikan sebatas pada budaya dan kebiasaan sekelompok orang pada daerah tertentu (Yaqin, 2005: 6). Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham) (Tilaar, 2004). Multi-kultur sebenarnya merupakan kata dasar yang mendapat awalan. Kata dasar itu adalah kultur yang berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan sedang awalnya adalah multi yang berarti banyak, ragam, atau aneka. Dengan demikian multikultur berarti keragaman kebudayaan, keaneka kesopanan, atau banyak pemeliharaan.

Multikulturalisme dapat dikatakan berkembang dari negara besar demokrasi yaitu Amerika Serikat. Sebagai pentolan demokrasi, masyarakat Amerika dapat hidup dengan subur dalam segregasi dan diskriminasi ras. Sejarah mencatat terjadinya perang saudara pada pertengahan abad ke-19 sebenarnya merupakan cikal-bakal lahirnya multikulturalisme di dunia. Abraham Lincoln sebagai pejuang demokrasi dengan politik abolisinya dapat menghapus perbudakan. Hasil perjuangannya menempatkan ras negro pada tempat yang layak di Amerika Serikat. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa ras dengan kultur minoritas dapat berbaur dengan ras dan kultur yang lebih kompleks. Ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat multikultural, ras dan kultur yang bervariasi dapat bersinergi dalam pembangunan.

Namun yang jelas Indonesia bukanlah Amerika Serikat, yang memiliki sejarah, *geist* dan nilai-nilai, serta ideologi yang berbeda. Untuk itu pencarian model multikulturalisme di Indonesia di alam reformasi, demokratisasi, dengan

terpaan globalisasi, merupakan upaya yang masih dipandang urgen dalam pembangunan masyarakat multikultural di Indonesia. Singkatnya kajian mengenai multikulturalisme dalam ruang ke-Indonesia-an, perlu diperdalam minimal meliputi dimensi: multikulturalisme sebagai *politic of recognition*, multikultur dalam *ethnic and cultural group*, dan multikulturalisme dalam karakteristik sosial.

Multikulturalisme sebagai *politic of recognitions* sebagai sebuah paham menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme ada pada kesetaraan budaya (Abdullah dalam Kompas, 16 Maret 2003). Sementara multikultur dalam *ethnic and cultural groups*, sebenarnya merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku (etnis), dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Wahid dalam Kompas, 23 Juni 2004). Sedangkan multikulturalisme dalam dimensi karakteristik sosial, digunakan dalam rangka berjalannya interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial (Abidin dkk, 2003: 108).

Sekaitan dengan tiga dimensi multikulturalisme di atas, Parekh (1997) secara jelas menguraikan adanya lima model multikulturalisme yang dapat menjadi alternatif tawaran bagi pembangunan masyarakat multikultural. Tentu saja pembagian kelima bentuk multikulturalisme itu tidak kedap air (*zoaertinght*), sebaiknya bisa tumpang tindih dalam segi-segi tertentu. Kelima model multikulturalisme tersebut adalah:

Pertama, multikulturalisme isolasionis yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. *Kedua*, multikulturalisme akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi

kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Kepedulian pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok yang dominan. Mereka menentang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar.

Keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.

Kelima, multikulturalisme kosmopolitan, yakni paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme jenis ini, yang sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernis memandang seluruh budaya sebagai *resources* yang dapat mereka pilih dan diambil secara bebas.

Dari beberapa pengertian tersebut, ada benang merah yang dapat dijadikan pijakan, yaitu hal yang paling utama dari makna dan pemahaman multikulturalisme adalah kesejajaran budaya. Masing-masing budaya manusia atau kelompok etnis harus diposisikan sejajar dan setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih dominan. Semua kebudayaan pada dasarnya mempunyai kearifan-kearifan tradisional yang berbeda-beda.

C. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik dengan metode *grounded theory*. Metode ini memberikan peluang yang sangat besar untuk menemukan teori baru, disusun dan dibuktikan melalui pengumpulan data yang sistematis, dan analisis data yang berkenaan dengan fenomena itu. Peneliti tidak memulai penyelidikan dengan pegangan pada suatu teori tertentu lalu membuktikannya, melainkan dengan berpegang pada suatu kajian dan hal-hal yang terkait dengan kajian tersebut (Strauss dan Corbin, 2003: 10-11). Sesuai dengan pendekatan dan metode yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi: studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dengan demikian, dalam penelitian naturalistik ini, peneliti berperan sekaligus sebagai instrumen (*human instrument*) pengumpul data (Bogdan dan Biklen, 1982: 27).

2. Penentuan Subjek Penelitian

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian, yakni latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*events*), dan proses (*process*) (Miles dan Huberman, 1984: 38).

Berdasarkan kriteria di atas dan fokus penelitian yang telah dirumuskan di muka, maka penetapan subjek penelitian yang purposif ditujukan pada tokoh etnis Tionghoa Medan, yang berarti: kriteria latar (*setting*) dalam penelitian ini adalah situasi Kota Medan pasca reformasi 1998 sebagai tempat berlangsungnya proses pengumpulan data. Studi dokumentasi, observasi, dan wawancara akan sering dilakukan di lingkungan kantor, lembaga/ organisasi, di rumah, atau di tempat lainnya, baik secara formal maupun informal. Sedangkan kriteria pelaku (*actors*) dalam penelitian ini adalah para tokoh etnis Tionghoa yang mempunyai peran yang besar yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berdasarkan observasi yang cermat, peneliti kemudian akan memfokuskan pemilihan subjek penelitian pada tahap *continuous adjustment* atau *focusing* (Lincoln dan Guba, 1982: 202) pada beberapa orang yang dianggap kompeten, yang kemudian ditetapkan sebagai subjek penelitian terfokus. Selanjutnya mengenai peristiwa (*events*) sebagai

kriteria ketiga adalah perspektif pemikiran dari para subjek penelitian terfokus mengenai pandangan dan gagasan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sementara proses (*process*) sebagai kriteria keempat adalah proses wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian terfokus baik secara formal maupun informal berkenaan dengan perspektif pemikirannya terhadap “integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa” pasca reformasi 1998 untuk menumbuhkan budaya kewarganegaraan yang demokratis.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analytic comparison*. Menurut Neuman (2004: 427), *analytic comparison* dapat digunakan untuk analisis kualitatif. *Analytic comparison* di dalam penggunaannya mencakup *method of agreement* dan *method of difference*. Guna keperluan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua cakupan tersebut dalam menganalisis. Ini berarti dalam menganalisis dengan *method of agreement* dan *method of difference*, peneliti menganalisis pernyataan-pernyataan yang sama dan yang berbeda dari para informan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, peneliti memilah-milah pernyataan-pernyataan yang sama dan yang berbeda pada masing-masing pertanyaan, kemudian dibandingkan antara satu informan dengan informan lainnya. Setelah itu peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori yang ada.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Rekonseptualisasi Integrasi

Para tokoh etnis Tionghoa di kota Medan yang tampil dalam penelitian ini, memiliki perspektif pemikiran yang berbeda berkenaan dengan tema yang pertama “rekonseptualisasi integrasi”. Pasca Orde Baru telah memunculkan kembali wacana asimilasi versus integrasi. Versus ini bukan dimaksudkan untuk memilih, namun yang terpenting mengkaji ulang dan melakukan konstruksi yang pas bagi integrasi bangsa ini.

Ada perbedaan gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa dalam merekonseptualisasi integrasi, namun secara general, perspektif pemikiran

tersebut mempunyai kesamaan yaitu menempatkan Persatuan Indonesia sebagai tujuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sinergi dari gagasan-gagasan yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan rekonseptualisasi integrasi, telah menghasilkan suatu konsep integrasi yang lebih pas bagi Indonesia pasca reformasi. Konsep itu diusulkan dengan nama "*integrated pluralism*", suatu konsep "keberagaman yang disatukan atas dasar penghargaan terhadap keberbedaan".

Gagasan *integrated-pluralism* sebagai suatu kebijakan yang merupakan sinergis dari beberapa model (asimilasi alamiah, strategi integrasi, integrasi-asimilasi, integrasi budaya, persatuan Indonesia, dan multikulturalisme), menunjukkan di kalangan etnis Tionghoa sendiri telah tumbuh realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Tionghoa yang plural. Untuk itu integrasi yang koeksistensi (pluralisme budaya) dalam koridor *integrated pluralism* merupakan strategi yang paling dibutuhkan bagi Indonesia yang *polyethnic* ini.

Beberapa pemikiran; gagasan, tuntutan dan harapan, dari para tokoh etnis Tionghoa nampaknya dapat menjadi masukan berarti bagi negara dalam merumuskan ulang kebijakan yang pernah ada. Gagasan yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa tersebut adalah sebagai berikut: (1) integrasi yang dibutuhkan bagi masyarakat dapat diterapkan melalui model asimilasi alamiah, sebagai kebijakan koeksistensi yang dapat mengayomi seluruh identitas budaya yang begitu beragam dan berbeda-beda. Melalui model ini, dibelajarkan perilaku mau memahami dan menerima keberagaman dan perbedaan etnis yang ada, sikap saling menghargai, solidaritas di semua lingkup kehidupan, dan *senses of belonging* terhadap semua identitas yang ada sebagai milik bangsa Indonesia. Konsep asimilasi alamiah dalam penerapannya tetap memerlukan rekayasa. Program rekayasa tetap dirancang untuk mengeliminir prasangka-prasangka rasial, mendekonstruksi nilai-nilai stereotipik, dan perilaku diskriminatif. Jelasnya rekayasa itu dalam bingkai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika; (2) strategi integrasi (integrasionis) yang pernah digagas pada masa lalu, nampaknya perlu disesuaikan dengan alam di era reformasi ini. Integrasi yang wajar, yang nonras, yang mengakui semua suku yang ada di Nusantara sebagai bagian dari bangsa

Indonesia, termasuk suku peranakan Tionghoa. Untuk tercapainya integrasi yang wajar, seluruh anggota masyarakat berinteraksi secara terbuka saling mengisi kebutuhan, tidak saling merintangi, dan yang penting ada konsensus, yaitu konsensus terhadap konsep bangsa Indonesia yang lebih modern. Konsep bangsa Indonesia yang tidak lagi berbau ras, tapi konsep bangsa Indonesia yang ditempatkan dalam batasan arti politik, bahwa warga negara Indonesia sejati dilihat bukan dari keturunannya; (3) memadukan strategi integrasi dengan asimilasi secara bersamaan, merupakan gagasan alternatif yang bisa menjadi masukan. Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dilihat melalui pendekatan integrasi, dalam arti sebagai strategi yang mengharuskan semua suku yang ada masuk ke dalam *mainstream* bangsa Indonesia. Namun integrasi itu harus bersifat fungsional, yaitu penyatupaduan yang didasari dengan adanya saling bergantung antara bagian-bagian dalam suatu sistem sosial untuk mewujudkan penyatuan yang harmoni. Tapi pada sisi lain, suku-suku yang ada di Nusantara ini pun secara natural berhubungan dan bergabung membentuk sebuah kelompok yang baru, yang lebih besar, yakni bangsa Indonesia. Integrasi yang diusulkan bersifat fungsional, dan asimilasi yang dipilih dengan jenis amalgamasi; (4) gagasan mengangkat integrasi budaya untuk dikonstruksi dalam membangun integrasi bangsa, menjadi gagasan alternatif berikutnya. Alasannya, secara hukum dan politik, sudah ada kesepakatan integrasi bangsa dibangun atas dasar persamaan dan kesederajatan. Tapi secara budaya, terutama pada kehidupan masyarakat, belum terjadi kesepakatan secara menyeluruh. Mungkin ini akibat pengaruh hukum dan politik kolonial yang sudah mengakar lama, dampaknya nilai-nilai yang berlaku pada masing-masing kelompok dalam kehidupan masyarakat menjadi bahan pertentangan. Gagasan membangun integrasi budaya, diperjuangkan untuk mengangkat ketidakadilan yang masih tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perjuangan dalam menghapus ketidakadilan gender; (5) menolak istilah integrasionis dan assimilasionis, karena dua istilah itu sudah cacat secara politik, menjadi latar belakang gagasan dalam menelorkan istilah Persatuan Indonesia, yang dipandang pas lebih mengindonesia. Strategi konsep Persatuan Indonesia, tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam

suku dan budaya bersatu tanpa menghilangkan identitas budaya dan suku dari masing-masing komponen masyarakat. Jadi konsep itu jelas tidak berdasarkan ras, tapi yang ada adalah *nation* Indonesia. *Nation* Indonesia merupakan suatu kesepakatan bersama untuk mewujudkan Persatuan Indonesia. Konsep integrasi yaitu konsep menjadi warga negara dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya tanpa menghilangkan identitas budaya dan suku dari masing masing komponen masyarakat, termasuk masyarakat Tionghoa. Konsep Integrasi yang diperjuangkan seperti ini sangat identik dengan teori pluralisme atau multikulturalisme. Namun keidentikan konsep Persatuan Indonesia dengan multikulturalisme, menjadi berbeda, karena konsep Persatuan Indonesia dibangun berdasarkan *geisi*-nya Indonesia, yang berbeda dengan konsep multikulturalisme yang berasal dari *geist*-nya Barat; dan (6) integrasi dikonstruksi bukan berdasarkan etnisitas dan agama, tapi dibangun berdasarkan konsensus politik atas dasar perbedaan dan penghargaan. Kemajemukan bangsa ini, sudah saatnya ditempatkan dalam bingkai multikulturalisme bukan pluralisme. Selama ini kita hanya diajak untuk belajar tentang keberagaman, namun perbedaan dan penghargaan belum diajarkan sampai akar rumput. Kita hanya diajak untuk menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan yang ada, tetapi pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya orang lain belum dijadikan *trend*. Pandangan ini menunjukkan integrasi bangsa untuk saat ini sudah saatnya ditempatkan dalam bingkai multikulturalisme.

2. Rekonstruksi Identitas Bangsa

Pandangan dan gagasan para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan tema yang kedua "formulasi identitas bangsa" juga berbeda-beda. Namun perbedaan hanya terletak pada alur berpikir bukan pada hal yang prinsip, karena masing-masing tokoh tetap pada satu muara yaitu bangsa Indonesia. Pengakuan akan posisi identitasnya sebagai bagian integral dari identitas kebangsaan Indonesia, sekaligus membawa identitasnya untuk dapat menempatkan diri secara harmoni dalam suatu identitas yang lebih besar, yaitu identitas kebangsaan Indonesia.

Sinergi dari gagasan-gagasan yang dilontarkan para tokoh berkenaan dengan formulasi identitas bangsa, menghasilkan suatu formulasi identitas yang lebih pas bagi Indonesia pasca reformasi. Formulasi itu diusulkan dengan nama "identitas hibrid: Indonesia Baru", suatu formulasi yang menggambarkan suatu identitas yang *fluid*, yang terbuka, yang dinamis yang membawa kepada identitas kebangsaan yang nonras, tidak rigid, tidak kaku, tidak tertutup, dan tidak statis terhadap perubahan, perkembangan, dan kebutuhan jaman.

Paparan di atas menjadi catatan, bahwa masalah identitas merupakan bagian penting dalam pemecahan 'masalah Tionghoa' di Indonesia. Namun demikian kepastian mengenai identitas Tionghoa sebagai bagian integral dalam identitas kebangsaan Indonesia, masih mencari format yang pas, dikarenakan konsep identitas itu sendiri ditentukan oleh konsep bangsa yang dalam konteks politik berkembang dan berubah.

Jika dilihat dari format negara Indonesia yang *indigenus nation* (negara suku) maka sudah selayaknya format yang pas adalah menempatkan etnis Tionghoa sama kedudukannya dengan suku-suku lainnya (Suryadinata, 1999). Di jaman Orde Lama, Bung Karno pernah memunculkan ide bahwa orang Tionghoa adalah salah satu suku di Indonesia yang setara dengan suku Jawa, Sunda, Minang, Batak dan sebagainya. Dengan demikian orang Tionghoa telah menjadi orang Indonesia sejati tanpa asimilasi total. Namun akibat meletusnya pemberontakan G30S PKI, ide tersebut kandas untuk diwujudkan (Suryadinata, 1993). Bahkan di era Orde Baru orang Tionghoa harus melakukan asimilasi total dengan meleburkan identitas etnisnya ke dalam identitas etnis Indonesia (Susetyo, 2002). Dari berbagai tekanan dan ketidakpastian tersebut, maka banyak orang Tionghoa berada di persimpangan jalan. Hal tersebut setidaknya tergambarkan dari temuan penelitian dari Lan (1998) yang menunjukkan bahwa sekarang ini berkembang berbagai orientasi identifikasi diri di kalangan orang Tionghoa di Indonesia. Setidaknya ada empat orientasi yang ditemukan, yaitu: kelompok pertama, adalah mereka yang percaya bahwa mereka adalah etnis Tionghoa dan akan selalu menjadi etnis Tionghoa. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi diri, mereka selalu kembali ke asal usul dan warisan budaya etnis Tionghoa. Kelompok kedua, adalah mereka yang merasa telah berhasil berasimilasi ke dalam

masyarakat Indonesia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa asal usul etnis dan budaya mereka merupakan kutukan yang menyulitkan posisi mereka untuk menjadi bagian yang utuh dari masyarakat di mana mereka tinggal. Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkeyakinan bahwa mereka telah melampaui batas etnis, negara dan bangsa serta telah menjadi seorang yang globalis dan internasionalis. Sedangkan kelompok keempat, adalah mereka yang cenderung beranggapan bahwa hidup mereka ditentukan oleh pekerjaan mereka, sehingga mereka lebih suka menghindari pengidentifikasian diri secara budaya maupun politis.

Demikian pula temuan dari Tan (1998) yang meneliti tentang aspirasi dan partisipasi politik orang Tionghoa, ternyata terpilah-pilah menjadi lima kelompok cara pandang, yaitu: kelompok pertama adalah yang merasa perlu menonjolkan identitas etnis mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai golongan, misalnya dengan mendirikan Partai Tionghoa. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau menjadikan etnis atau agama sebagai basis gerakan, melainkan melalui *platform* persamaan hak, misalnya dengan mendirikan Partai Bhineka Tunggal Ika. Kelompok ketiga adalah kelompok yang lebih menyukai sebuah forum yang tujuan utamanya lebih sebagai *pressure group*. Kelompok keempat adalah mereka yang membentuk paguyuban kelompok karena perasaan senasib sepenanggungan. Misalnya dengan mendirikan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Sedangkan kelompok kelima adalah mereka yang bergabung dalam partai politik yang terbuka seperti PDI Perjuangan, PAN dan lain sebagainya.

Dari paparan di atas, diperoleh gambaran tentang bagaimana dinamika pencarian identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Pada kenyataannya di tengah masyarakat etnis Tionghoa telah berkembang subkultur-subkultur baru yang merupakan respon terhadap realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Tionghoa yang plural.

3. Pembangunan Masyarakat Multikultural

Untuk tema yang ketiga yaitu mengenai "pembangunan masyarakat multikultural", masing-masing tokoh dengan latar belakang pekerjaan dan kompetensinya, telah memilih jalur yang dianggap pas bagi dirinya sebagai wadah dalam upaya menumbuhkan budaya kewarganegaraan.

Melalui kedudukan yang dimiliki, para tokoh etnis Tionghoa, telah menunjukkan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam membangun integrasi dan identitas kebangsaan Indonesia, melalui ruang-ruang yang berbeda. Tokoh pertama berbasis di pendidikan, tokoh kedua di bidang organisasi dan politik, tokoh ketiga dominan di perhimpunan, tokoh keempat di bidang politik, tokoh kelima di bidang ekonomi, dan tokoh keenam pada dunia pers dan LSM.

Satu hal yang menarik untuk kasus kota Medan adalah gairahnya tokoh-tokoh etnis Tionghoa dalam memasuki kancah politik. Hal ini ada beberapa alasan: Pertama, mungkin sebagian dari kawan-kawan ingin menjadikan pengabdian mereka terhadap Indonesia semakin sempurna, dengan mengintegrasikan pengabdian sosial ekonomi yang telah dicapainya selama ini dengan pengabdian politik, melalui politik formal. Ini sebagai bentuk partisipasi politik yang konkrit karena selama puluhan tahun hak-hak politik kami dipasung oleh negara.

Kedua, terkait dengan kegelisahan sejumlah etnis Tionghoa yang sudah sukses secara ekonomi, namun masih banyak ketimpangan sosial dan kebijakan-kebijakan yang tidak mensejahterakan masyarakat. Sebagian dari mereka ada yang terjun ke dunia organisasi non politik. Bersama-sama dengan rakyat kecil berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dan sebagian lagi memilih untuk terjun ke politik praktis dengan bergabung ke partai politik. Tokoh-tokoh ini percaya bahwa di era reformasi saat ini, dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan membuat atau merevisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan belum adil.

Ketiga, dilihat secara statistik jumlah masyarakat etnis Tionghoa dewasa ini cukup signifikan baik di tingkat Sumut maupun di Medan. Dari 12,8 juta penduduk Sumut, sekitar 1,04 juta di antaranya adalah etnis Tionghoa. Sementara dari sekitar 2,1 juta penduduk kota Medan, sekitar 500.000 orang atau 25 persennya merupakan etnis Tionghoa. Data ini menunjukkan dari segi jumlah cukup signifikan dan wajar bila masyarakat Tionghoa memiliki wakil mereka di lembaga legislatif.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan adanya kegairahan berpolitik dari etnis Tionghoa di Sumut, khususnya di kota Medan yang pada tahun-tahun belakangan ini dinilai semakin meningkat terutama pada pemilu legislatif 2009 lalu. Fenomena ini harus dipandang positif sebagai bentuk konkrit partisipasi politik etnis Tionghoa di kota Medan untuk turut membangun Medan secara bersama. Satu hal juga yang menjadi catatan, kebijakan negara ternyata sangat berpengaruh terhadap peran mereka pada suatu ruang. Kalau dulu, etnis Tionghoa dibatasi pada ruang ekonomi, namun kini muncul fenomena menarik mereka sudah berani masuk pada ruang-ruang publik. Bahkan ruang politik, yang dulu dianggap paling tabu untuk didekati. Data ini, menunjukkan adanya pergeseran dari ruang yang stagnan ke arah terbukanya ruang-ruang sosial yang baru bagi mereka.

Berkaitan dengan kedudukan dan peran, mereka berapresiasi pada ruang-ruang publik yang berbeda, namun ada kesamaan dalam pengabdianya sebagai warga negara, yaitu menumbuhkan budaya kewarganegaraan yang "demokratis" melalui wujud nyata yaitu "partisipasi". Temuan ini, perlu dianalisis lebih lanjut melalui kajian teori.

Berdasarkan realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Almond dan Verba (1963) mengklasifikasikan budaya politik ke dalam: (1) Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah); (2) Budaya politik kaula (*subyek political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif; dan (3) Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi.

Berpegang pada klasifikasi budaya politik di atas, maka orientasi politik dari para tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini, masuk pada klasifikasi budaya politik partisipan. Mereka tampil sebagai warga negara yang aktif, memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai warga negara, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik, dan berperan sebagai aktivis dalam kehidupan masyarakat.

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga

negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat *efficacy* atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki kekuatan politik yang ditunjukannya sebagai warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu mereka warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (*trust*) antar warga negara.

Profil para tokoh etnis Tionghoa ini, perlu dijadikan ikon bagi warga kota Medan, tujuannya adalah untuk melibatkan lebih banyak warga kota yang memiliki andil (*stakeholders*) dalam pembuatan keputusan di suatu daerah, sebagai suatu proses pembelajaran bagi masyarakat.

Namun untuk mencapai keadaan masyarakat kota yang demikian, diperlukan syarat adanya sejumlah kompetensi yang harus dimiliki warga kota. Kompetensi kewarganegaraan multikultural yang dimaksud, oleh Branson (1999: 8), diuraikan: (1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; (2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan (3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic knowledge*) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkenaan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic skill*) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan

bernegara. Sedangkan kecakapan kewarganegaraan, meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participation skills*).

Dari kajian data di atas, maka diperoleh kesimpulan, bahwa profil para tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini, dengan *civic competence* yang dimilikinya, mampu memasuki klasifikasi budaya politik partisipan. Nilai-nilai demokrasi yang mereka terapkan dibarengi dengan partisipasi konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi indikasi tumbuhnya multikulturalisme di kota Medan. Satu hal yang menarik, dalam konteks keruangan, sebelum reformasi mereka terdogma pada ruang stagnan (ekonomi), kini mereka memiliki kebebasan dalam memilih ruang. Ruang-ruang sosial baru mereka apresiasi karena ada penghargaan terhadap identitas yang berbeda. Namun komitmen (*civic commitment*) pun mereka tunjukkan, bagaimana identitas yang melekat padanya (*communitarian culture*) dapat ditempatkan secara harmoni dalam identitas yang lebih besar yaitu: identitas kebangsaan Indonesia (*political culture*). Hubungan fungsional antara tema rekonseptualisasi integrasi yang menghasilkan luaran "*integrated pluralism*" dengan tema rekonstruksi identitas bangsa yang menghasilkan luaran "identitas hybrid : Indonesia yang menjadi", mengarah kepada gagasan model pembangunan masyarakat multikultural yang dipandang cocok untuk kota Medan pasca reformasi. Para tokoh etnis Tionghoa kota Medan menawarkan alternatif model tersebut adalah model "Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika"

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sinergi dari gagasan-gagasan yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan rekonseptualisasi integrasi, telah menghasilkan suatu konsep integrasi yang lebih pas bagi Indonesia pasca reformasi. Konsep itu diusulkan dengan nama "*integrated pluralism*", suatu konsep "keberagaman yang disatukan atas dasar penghargaan terhadap keberbedaan". Gagasan *integrated-pluralism* sebagai suatu kebijakan yang merupakan sinergis dari

beberapa model (asimilasi alamiah, strategi integrasi, integrasi-asimilasi, integrasi budaya, persatuan Indonesia, dan multikulturalisme), menunjukkan di kalangan etnis Tionghoa sendiri telah tumbuh realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Tionghoa yang plural. Untuk itu integrasi yang koeksistensi (pluralisme budaya) dalam koridor *integrated pluralism* merupakan strategi yang paling dibutuhkan bagi Indonesia yang *polyethnic* ini.

2. Sedangkan gagasan yang berkenaan dengan formulasi identitas bangsa, diusulkan dengan nama "identitas hibrid: Indonesia Baru", suatu formulasi yang menggambarkan suatu identitas yang *fluid*, yang terbuka, yang dinamis yang membawa kepada identitas kebangsaan yang nonras, tidak rigid, tidak kaku, tidak tertutup, dan tidak statis terhadap perubahan, perkembangan, dan kebutuhan jaman. Sebelum reformasi, etnis Tionghoa dibatasi pada ruang ekonomi, namun kini muncul fenomena menarik, mereka sudah berani masuk pada ruang-ruang publik. Bahkan ruang politik, yang dulu dianggap paling tabu untuk didekati. Data ini, menunjukkan adanya pergeseran dari ruang yang stagnan ke arah terbukanya ruang-ruang sosial yang baru bagi mereka. Berkaitan dengan kedudukan dan peran, mereka berapresiasi pada ruang-ruang publik yang berbeda, namun ada kesamaan dalam pengabdianya sebagai warga negara, yaitu menumbuhkan budaya kewarganegaraan yang "demokratis" melalui wujud nyata yaitu "partisipasi".
3. Profil para tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini, dengan *civic competence* yang dimilikinya, mampu memasuki klasifikasi budaya politik partisipan. Nilai-nilai demokrasi yang mereka terapkan dibarengi dengan partisipasi konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi indikasi tumbuhnya budaya kewarganegaraan demokratis yang kondusif di kota Medan. Indikasi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota, untuk mengkongkritisasi wacana multikulturalisme, sekaligus untuk dicari peluang dan tantangannya bagi pembangunan masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. dan Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Boston: Little, Brown & Co.
- Bahmuller, C. F. (1997). "A Framework For Teaching Democratic Citizenship: An International Project". *The International Journal of Social Education*, 12, 2.
- Blusse, L. (1991). *The Role of Indonesian Chinese in Shaping Modern Indonesian Life*, in Indonesia, Cornell Southeast Asia Program.
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduce to Theory and Methods*. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.
- Branson, Margaret S. ((1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS dan TAF.
- Coppel, C. A. (1993). *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Cholisin. (2004). *Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan*. Jurnal Civics Vol I No. 1 Juni 2004. Yogyakarta: Jurusan PPKn FIS UNY.
- Durkheim, E. (1958). *Professional Ethnics and Civic Moral*. New York: Free Press.
- Habib, A. (2006). *Dinamika Hubungan Etnis Tionghoa dan Jawa*. Makalah disampaikan pada Seminar Sinologi Tgl. 3-4 Maret 2006. Malang: Lembaga Kebudayaan UMM.
- Hornby, A.S, Gatenby, E.V. and Wakefield, H. (1962). *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press.
- Hogg, M.A dan Abram, D. (1988). *Social Identification: A Social Psychology of Intergroup Relation and Group Process*. London: Routledge.
- Lan, T. J. (1998). *Pengalaman Etnik Tionghoa dalam Pembentukan Identitas (Nasional) Indonesia*. Makalah Simposium Etnis Tionghoa sebagai Minoritas di Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1998. Depok.
- Lincoln, Y.S dan Guba, E.G. (1985). *Naturalistik Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.

- Mackie, J.A.C. (1976). "Anti-Chinese Outbreaksin Indonesia, 1959-68", dalam J.A.C Mackie (ed.). *The Chinese in Indonesia: Five Essays*. Melbourne: Nelson.
- Pattiradjawanc, R. L. (2000). "Peristiwa Mei di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Tionghoa di Indonesia", dalam I. Wibowo, *Harga yang Harus Dibayar: Skesta Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Tionghoa.
- Sarwono, S.W. (1999). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shiraishi, S.S. (2001). *Pahlawan-pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Simbolon, P.T. (1991). *Tapting on the Wall: Ethnicity and Marketplace Trade in the Urban Context of Jakarta*. Amsterdam: VU University Press.
- Skinner, G.W. (1967). "The Chinese Minority", in Mc Very Ruth T. *Indonesia, Survey World Cultural Southeast Asia Studies*. Yale: University of Yale.
- Sorenson, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Terjemahan I Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryadinata, L. (1993). *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Susetyo, D.P.B. (2002) *Stereotip dan Relasi Antar Etnis Cina dan Etnis Jawa Pada Mahasiswa Di Semarang*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Strauss, A dan Corbin, J. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritis Data*. Terjemahan M. Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tan, M.G. (1999). *Identitas Etnis Tionghoa Pasca Reformasi*. dalam Majalah Tempo. Edisi 14-22 Februari 1999.
- Verdiansyah, C. (2007). *Jalan Panjang Menjadi WNI Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Williams, L.E. (1960). *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia 1900-1916*. Glencoe Illinois: The Free Press.
- Winataputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. PS. PKn SPs UPI.